BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Telaah Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajeman kepemerintahan.

Arah Pembangunan tahap pertama dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai fokus pembangunan maka arah pembangunan tahap I melingkupi beberapa poin sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan
2. Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
4. Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.

5. Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.
6. Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
7. Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah.
8. Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.
9. Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
10. Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
11. Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
12. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarustamaan gender.
14. Penguatan Toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional.
15. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
16. Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
17. Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam.
18. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 2 (dua) "Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan

yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat". Selanjutnya misi ke 2 (dua) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Membuat regulasi daerah tentang tata niaga dalam rangka protesi sektor pertanian.
3. Mendorong percepatan reforma agrarian tingkat daerah.
4. Meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan fungsi koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD, BUMDes dan swasta melalui program kemitraan.
5. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan kerja.
6. Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global.
7. Mengendalikan inflasi dengan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Cabang Sumatera Selatan.
8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar kawasan guna memperlancar arus barang dan jasa antar daerah.
9. Mendukung program restorasi lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
10. Mendukung upaya menjaga ekosistem laut, daerah pesisir dan hutan mangrove.
11. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
12. Melanjutkan revitalisasi pasar-pasar trandisional.
13. Mendorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
14. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

Berdasarkan penelaahan visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029 diatas, maka pilar pembangunan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dari sisi Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Pilar Kinerja Bapenda

"……Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kualitas Pembangunan Sumatera Selatan yang adil merata……"

Nilai nilai dalam pilar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kapasitas Fiskal Daerah yang terus meningkat dan berkembang, menunjukan bahwa daerah kinerja sisi pendapatan daerah harus optimal dengan potensi kemampuan daerah yang ada;
2. Ruang konsolidasi dan harmonisasi fiskal Pusat dan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berbasis inovasi, keunggulan dan daya saing, mengurangi ketergantungan Transfer ke Daerah (TKD) dengan menciptakan investasi, penguatan basis pajak daerah;
3. Implementasi dan menciptakan impact Indikator Kinerja Utama dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. Dimensi Pembangunan Kinerja:
   a. *Customer Perspektif*, dengan melaksanakan:
      - Penguatan Basis Pajak Daerah,
      - Sinergi dan Kolaborasi
      - Kepatuhan Wajib Pajak
      - Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pembayaran
   b. *Internal Process,* dengan melaksanakan:

- Program Prioritas Daerah
- Peningkatan nilai outcomes kegiatan sub kegiatan
- Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
- Analisis deviasi keterlambatan pelaksanaan

c. *Learning and Growth*, dengan melaksanakan:

- Pengawasan secara intensif berbasis skala risiko dan skala dampak
- Menggali potensi PAD berbasis kemampuan daerah
- Kelembagaan organisasi yang kuat
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang Pendapatan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah atau Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dalam matriks tahapan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bapenda Prov. Sumsel

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon II						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,95	2,02	2,09	2,15	2,21	2,28	2,28
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)	%	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	8,51
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	0,520
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	%	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	1,48
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,25	1,252	1,256	1,258	1,260	1,270	1,270
5.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	55,64
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	NA
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	NA

2. Bidang Pajak

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Pajak						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	%	1,61	1,73	1,81	1,84	1,93	1,96	1,96
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,53	14,81	14,91	15,02	15,19	15,28	15,28
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,19	5,02	4,93	4,88	4,71	4,62	4,62
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pendapatan
Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang PDLL						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	%	95,12	95,43	95,67	95,84	95,93	96,00	96,00
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,45	89,78	89,85	89,91	89,97	90,08	90,08
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,71	83,93	84,06	84,17	84,27	84,39	84,39
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,42	84,83	84,94	85,02	85,13	85,27	85,27

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Tabel 2.4
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pengawasan
dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Wasbin						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,64	92,91	93,06	93,21	93,34	93,61	93,61
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	17,03	16,85	16,71	16,53	16,29	16,19	16,19
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,88	12,74	12,59	12,51	12,38	12,29	12,29

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

Tabel 2.5
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pengembangan
dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang P2PATDA						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Penggalian Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	81,89	82,19	82,31	82,44	82,69	82,89	82,89
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,69	83,81	83,96	84,06	84,16	84,32	84,32
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,41	93,62	93,74	93,88	93,97	94,15	94,15
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

6. Sekretariat

Tabel 2.6
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Sekretariat						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,83	94,96	95,01	95,17	95,28	95,43	95,43
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	5,02	4,92	4,72	4,61	4,43	4,28	4,28
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,78	80,92	81,14	81,32	81,63	81,92	81,92

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

Tabel 2.7
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB Puslia						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,34	62,67	62,71	62,84	62,93	63,06	63,06
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,32	91,54	91,70	91,82	91,94	92,14	92,14
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	78,93	79,21	79,38	79,52	79,73	79,81	79,81
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,46	41,78	41,86	42,03	42,26	42,48	42,48
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.8
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB PPD						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,87	8,62	8,41	8,33	8,24	8,12	8,12
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,72	9,60	9,58	9,41	9,32	9,21	9,21

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan serta sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja diperoleh melalui hasil analisa *cascading* atau penjenjangan pohon kinerja yang dimulai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah "Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah".

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian

tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran strategis pendapatan dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian /kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja Bapenda yang telah disusun baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 akan menjelaskan rumusan hasil indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bapenda Prov. Sumsel Tahun 2025

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	IKU	1,95
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)	IKU	5,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	IKU	0,434
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKU	1,26
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKU	1,25
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	IKU	48,45

6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,03
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,96
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,12

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

Tabel 2.10
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pajak Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,61 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,53 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,19 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

Tabel 2.11
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pendapatan Lain Lain,
Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	95,12 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,45 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,71 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,42 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Tabel 2.12
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,64 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	17,03 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,88 %

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

Tabel 2.13
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Penggalian Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	81,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,69 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,41 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

e. Sekretariat

Tabel 2.14
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,83 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,78 %

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

Tabel 2.15
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,34 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,32 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	78,93 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,46 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2025)

g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.16
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,87 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,72 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

2.4 Konsep Jejaring Kausalitas Pembangunan Kinerja

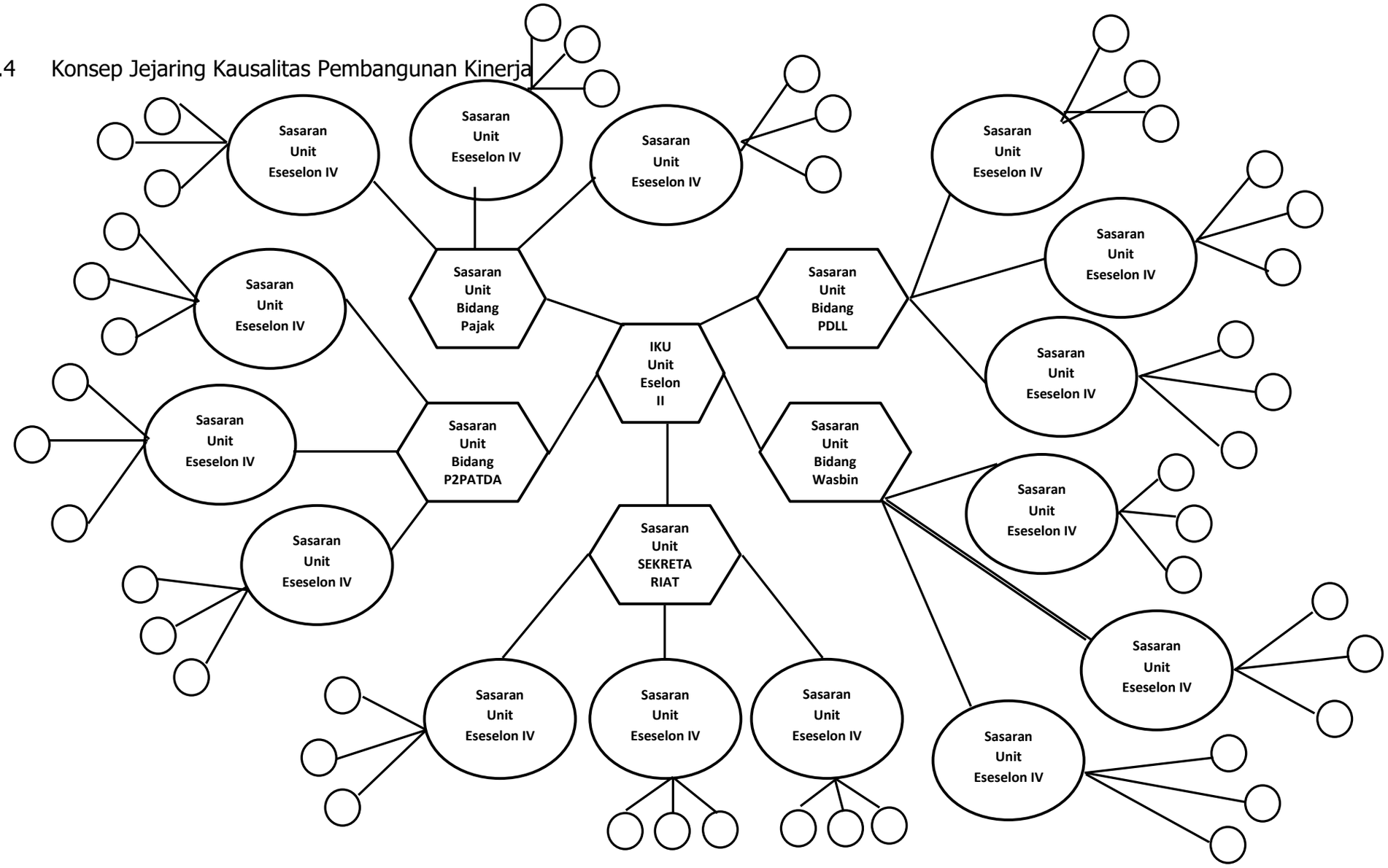

Gambar 2.2
Sumber : Bapenda Sumsel 2025

3 Teknik Analisa Data Indikator

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software eviews versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif

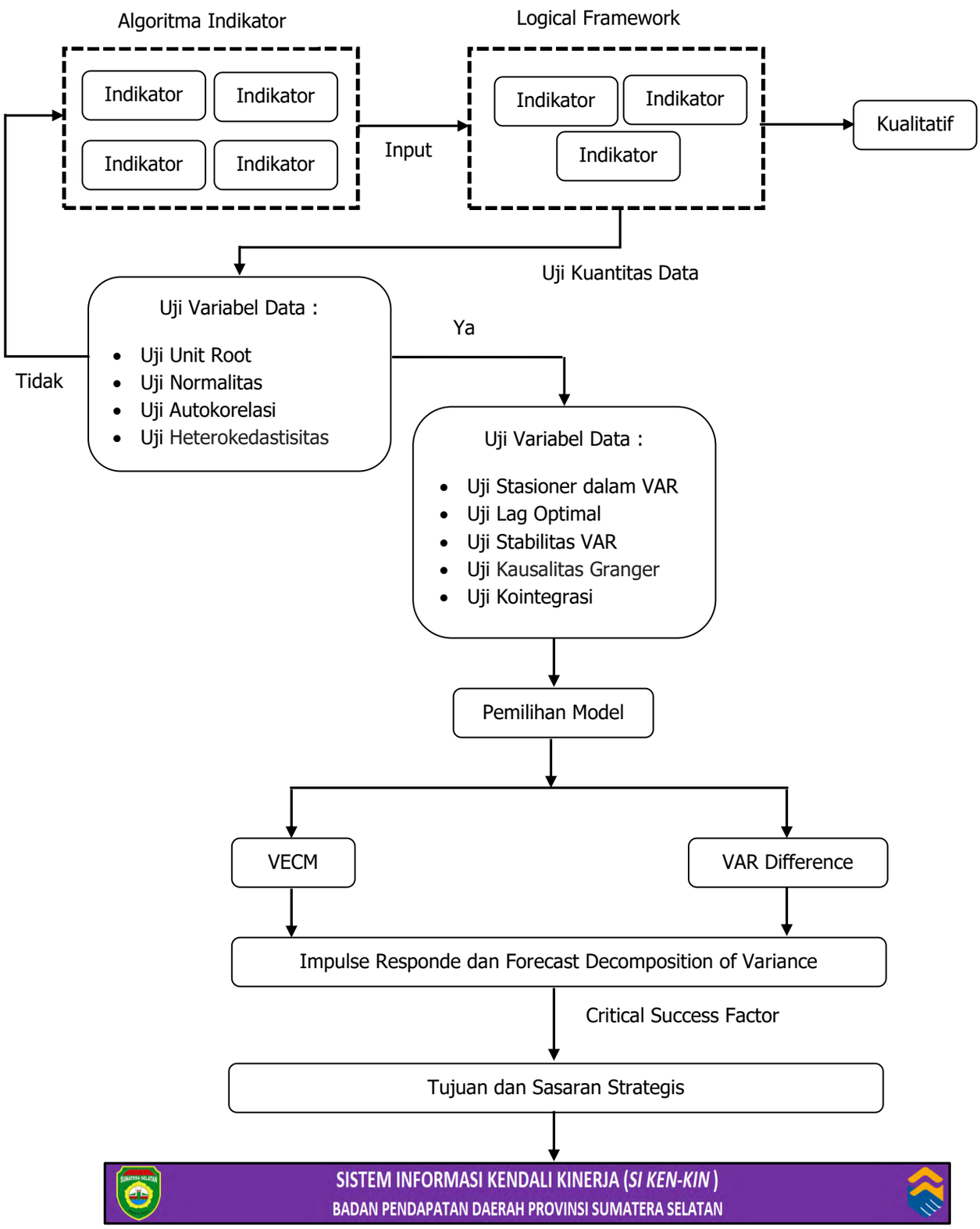

Gambar 2.3 Teknik Analisis Data
Sumber : Bapenda Sumsel (Software Eviews 13)

Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

Tabel 2.17
Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK
IKSS1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	Sasaran Strategis 1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS2	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Sasaran Strategis 2	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS3	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Sasaran Strategis 3	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Sasaran Strategis 4	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS6	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sasaran Strategis 6	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS7	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 7	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS8	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 8	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pajak
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Doleansi

IKSSO10	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Retribusi
IKSSO12	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software eviews versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut:

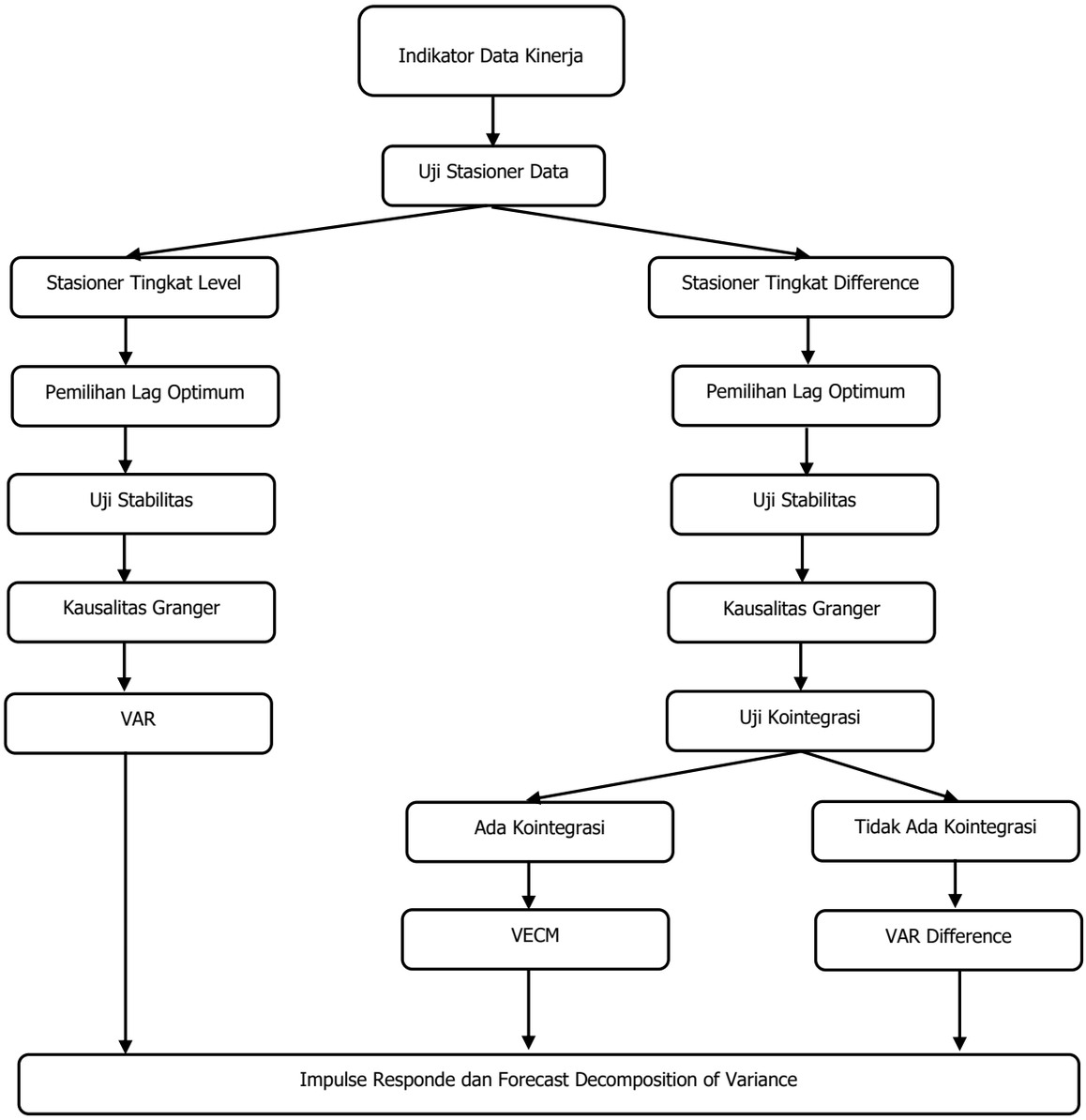

Gambar 2.4 Metodologi *vector error correction model (VECM)*
Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model* (VECM) yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

a. Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.

b. Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum
c. Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
d. Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan lm dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan lm dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta lnY_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta lnY_{t-j} + \varepsilon_t \qquad (1)$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS),

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi parameter p, identik dalam deret waktu (yaitu, p, p untuk semua t), sedangkan urutan lag p, dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol p = 0 untuk semua t terhadap hipotesis alternatif p < 0 untuk semua t. Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi pi menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika p, = O terhadap hipotesis alternatif p <0, (t=1,..., t); p = 0, (t=t,..... t) untuk semua t. Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural (ln).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$x_t = A_1 x_{t-p} + \cdots + A_P\, x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \qquad (2)$$

Dimana: x, adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y, adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut:

$$\Delta lnIKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSS1_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSS1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO1_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO2_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO2_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO3_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO3_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO4} \pi_{6t,l}\, \Delta lnIKKSO4 + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta lnIKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO1_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO8_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO8_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO9_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO9_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO10_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO10_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\Delta lnIKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO2_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO2_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO11_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO11_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO12_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO12_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO13_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO13_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (5)$$

$$\Delta lnIKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO3_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO3_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO14_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO14_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO15_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO15_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO16_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO16_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (6)$$

$$\Delta lnIKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO4_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO4_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO17_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO17_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO19_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO19_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO20_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO20_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (7)$$

$$\Delta lnIKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO5_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO5_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO20_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO20_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO21_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO21_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO22_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO22_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta lnIKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO6_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO6_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO23_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO23_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO24_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO24_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO25_t} \theta_{3t,l}\, \Delta lnIKSSO25_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

$$\Delta lnIKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO7_t} \beta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO7_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO26_t} \gamma_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO26_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIIKSSO27_t} \delta_{1t,l}\, \Delta lnIKSSO27_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

Dimana t adalah periode waktu (t = 1,..., t); l lag dari setiap variabel data; lnIKSS adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; lnIKSSO adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan IKSSO Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1\ \varepsilon_2\ \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara IKSS dan IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya Y, 0 (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis $\beta_{1t}\ dan\ \theta_{1t} =$

0 berarti antara IKSS, IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 dan Y tidak ada hubungan sebab akibat satu sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t}\,\beta_{1t}\,\delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t}\,\beta_{1t}\,\delta_{1t} \# 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software eviews versi 13 sebagai berikut

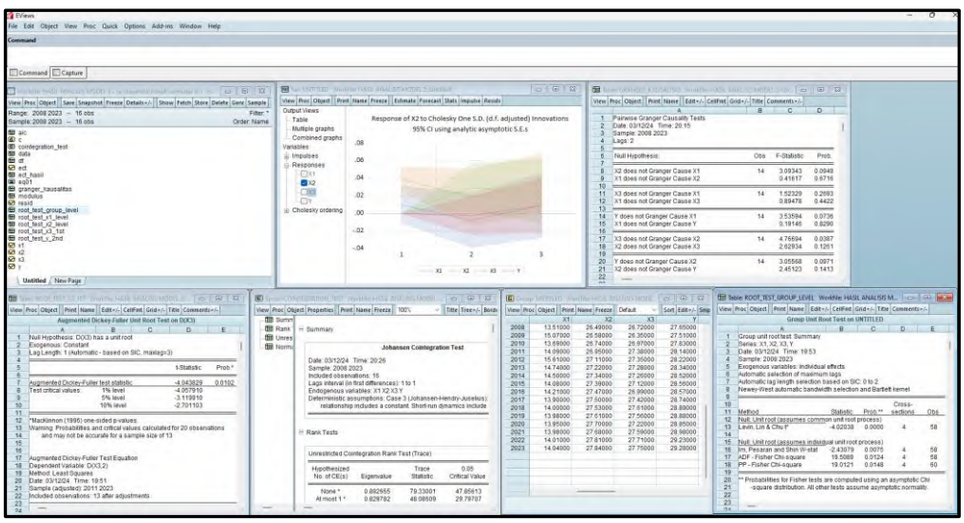

Gambar 2.5 Tampilan Awal eviews versi 13

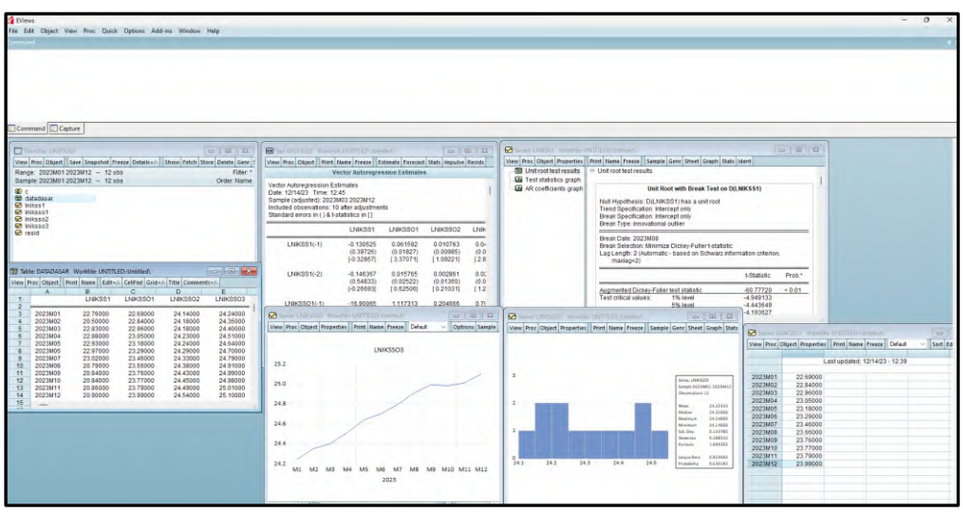

Gambar 2.6 Tampilan Running Data

Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.18
Hasil Pengujian Unit Root

Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta\ (lnIKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta\ (lnIKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta\ (lnIKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta\ (lnIKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta\ (lnIKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta\ (lnIKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta\ (lnIKSS7)$	-7.081123	-3.451682	-3.724587	-2.261899	0.0001
$\Delta\ (lnIKSS8)$	-7.050415	-3.620184	-2.076314	-2.810604	0.0018
$\Delta\ (lnIKSSO1)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401
$\Delta\ (lnIKSSO2)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100
$\Delta\ (lnIKSSO3)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029
$\Delta\ (lnIKSSO4)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta\ (lnIKSSO5)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta\ (lnIKSSO6)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta\ (lnIKSSO7)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta\ (lnIKSSO8)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta\ (lnIKSSO9)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta\ (lnIKSSO10)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta\ (lnIKSSO11)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta\ (lnIKSSO12)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta\ (lnIKSSO13)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta\ (lnIKSSO14)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta\ (lnIKSSO15)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta\ (lnIKSSO16)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta\ (lnIKSSO17)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta\ (lnIKSSO18)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta\ (lnIKSSO19)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta\ (lnIKSSO20)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta\ (lnIKSSO21)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014
$\Delta\ (lnIKSSO22)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042

$\Delta\ (lnIKSSO23)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta\ (lnIKSSO24)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta\ (lnIKSSO25)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta\ (lnIKSSO26)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta\ (lnIKSSO27)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

Null Hypothesis : $\Delta(lnIKSS); \Delta(lnIIKSSO\ Level\ 1); \Delta(lnIKSSO\ Level\ 2)$ has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)
*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut lnIKSS; lnIKSSO Level 1; lnIKSSO Level 2; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).

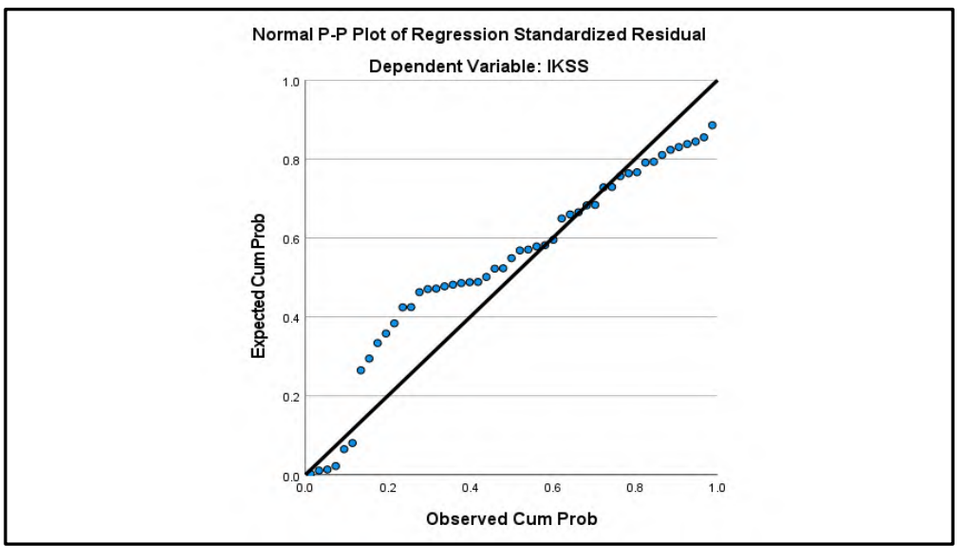

Gambar 2.7
Distribusi Variabel

Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.

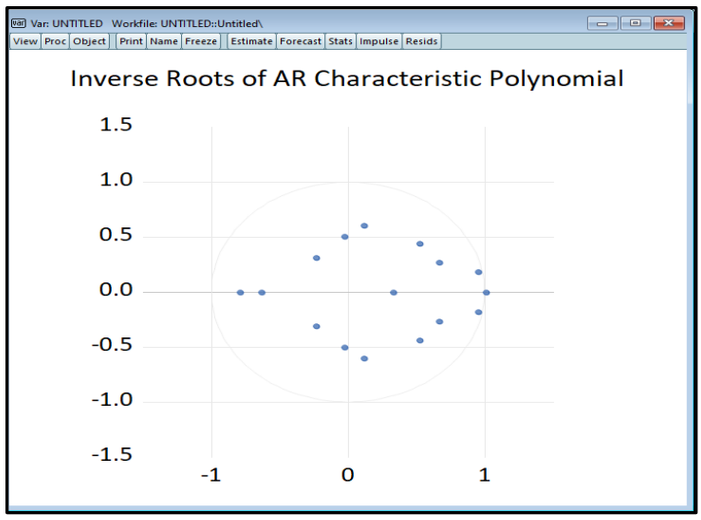

Gambar 2.8
Distribusi Variabel Polinomial

Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukan bahwa penentuan panjang pada lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 35 (tiga puluh lima) variabel data yang diuji.

Tabel 2.19
Hasil Pengujian Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.1810	NA	162.6512	19.28095	19.48370*	19.35614*
1	-403.6441	26.83645	252.2089	19.71110	20.92759	20.16223
2	-360.2234	65.13107*	114.2664*	18.87379*	21.10403	19.70087
3	-341.1326	24.29740	168.5682	19.14239	22.38637	20.34541
4	-313.5341	28.85291	191.8342	19.02428	23.28200	20.60325

*indicate lag order selected by the criterion
AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |18.87379|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Tabel 2.20
Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Optimum Lag	$\Delta\ (lnIKSS)$	$\Delta\ (lnIKSSO1)$	$\Delta\ (lnIKSSO2)$	$\Delta\ (lnIKSSO3)$	$\Delta\ (lnIKSSO4)$	Joint
$\Delta\ Lag\ one$	2.561499	4.752189	1.749800	14.90229	2.404408	26.20479
	[0.7672]***	[0.4469]**	[0.8826]	[0.0108]***	[0.7908]	[0.3967]
$\Delta\ Lag\ two$	4.661034	1.807226	3.341873	2.993611	114.9873	157.2580
	[0.4586]	[0.8751]	[0.6474]**	[0.7010]	[0.0000]***	[0.0000]
Df	5	5	5	5	5	25

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion
Significant level ***1%, **5% and *10%
Number in [ ] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Tabel 2.21
Hasil Pengujian Test Terhadap Model Vektor Koreksi Kesalahan (VECM)

Trace Test				
Null Hypothesized (H_0)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	128.4782	69.81889	0.0000
At most 1*	0.456632	65.34761	47.85613	0.0005
At most 2*	0.287481	37.89900	29.79707	0.0047
At most 3*	0.270480	22.64630	15.49471	0.0035
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036
Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H_0)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	63.13059	33.87687	0.0000
At most 1	0.456632	27.44861	27.58434	0.0520
At most 2	0.287481	15.25269	21.13162	0.2716
At most 3	0.270480	14.19159	14.26460	0.0513

At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$D(lnIKSS,2) = 0.357687854138 \quad {}^{*}D(lnIKSS(-1),2) + 0.255696325482 * D(lnIKKSO1(-1),2 + 0.363554788223 * D(lnIKSSO2(-1),2 + 0.222569874236 * D(lnIKSSO3(-1),2 + 0.555889632566 * D(lnIKSSO4(-1),2) + 0.666889566336 * D(lnIKSSO5(-1),2) + 0.110225577956 * D(lnIKSSO6(-1),2) + 0.330000561142 * D(lnIKSSO7(-1),2) \quad (11)$$

$$D(lnIKSSO1,2) = 1.6134766894 \quad {}^{*}D(lnIKSSO8(-1),2) + 0.618968722732 * D(lnIKSSO9(-2),2 + 0.185263624107 * D(lnIKSSO10(-1),2) \quad (12)$$

$$D(lnIKSSO2,2) = 0.61326312845 \quad {}^{*}D(lnIKSSO11(-1),2) + 0340396781481 * D(lnIKSSO12(-2),2 + 0.116692533601 * D(lnIKSSO13(-1),2 \quad (13)$$

$$D(lnIKSSO3,2) = 1.07193559441 \quad {}^{*}D(lnIKSSO14(-1),2) + 0.5599794065846 * D(lnIKSSO15(-2),2 + 0.500636698415 * D(lnIKSSO16(-1),2 \quad (14)$$

$$D(lnIKSSO4,2) = 0.420313895269 \quad {}^{*}D(lnIKSSO17(-1),2) + 0.200233652213 * D(lnIKSSO18(-1),2 + 0.339965221000 * D(lnIKSSO19(-1),2) \quad (15)$$

$$D(lnIIKSSO5,2) = 0.604814176085 \quad {}^{*}D(lnIIKSSO20(-1),2) + 0.66800500123622 * D(lnIKSSO21(-1),2 + 0.558999622300 * D(lnIKSSO22(-1),2) \quad (16)$$

$$D(lnIKSSO6,2) = 0.460615311019 \quad {}^{*}D(lnIKSSO23(-1),2) + 0.004125563678 * D(lnIKSSO24(-1),2 + 0.445012300622 * D(lnIKSSO25(-1),2 \quad (17)$$

$$D(lnIKSSO7,2) = 0.00731308357823 \quad {}^{*}D(lnIKSSO27(-1),2) + 0.008852003166 * D(lnIKSSO27(-1),2) \quad (18)$$

Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22
Hasil Estimasi Model VEC

Dependent Variabel	C	$\Delta\,(lnIKSS1_{t-1})$	$\Delta\,(lnIKSS2_{t-1})$	$\Delta\,(lnIKSS3_{t-1})$	$\Delta\,(lnIKSS4_{t-1})$	$\Delta\,(lnIKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta\,(lnIKSSO1)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	R^2 : 0.8557 Adj. R^2 : 0.538 F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta\,(lnIKSSO2)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	R^2 : 0.8663 Adj. R^2 : 0.342 F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta\,(lnIKSSO3)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	R^2 : 0.9063 Adj. R^2 : 0.312 F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta\,(lnIKSSO4)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	R^2 : 0.8264 Adj. R^2 : 0.491 F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta\,(lnIKSSO5)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	R^2 : 0.9380 Adj. R^2 : 0.911 F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291

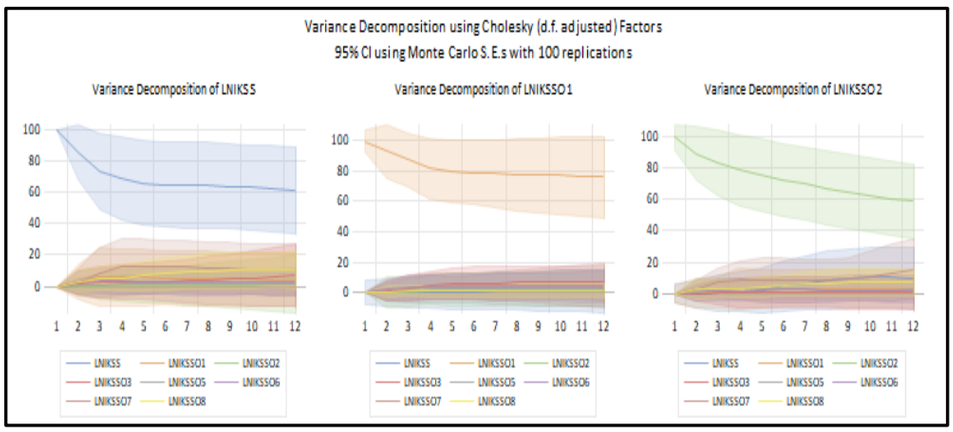

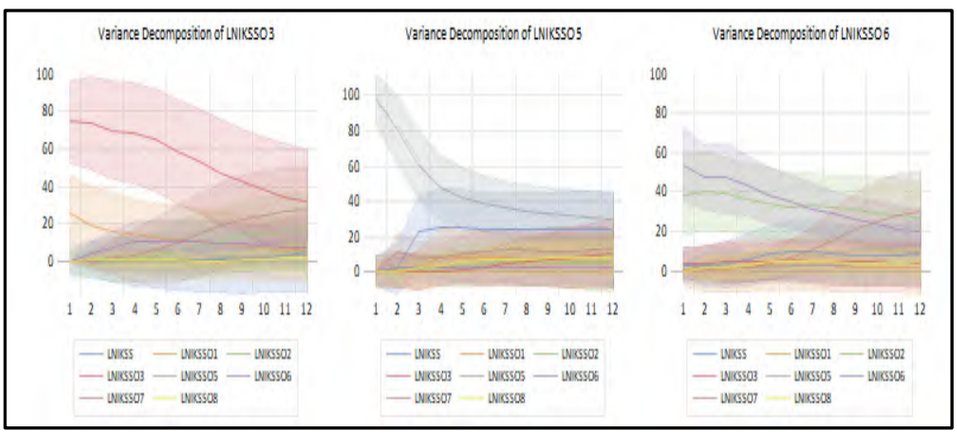

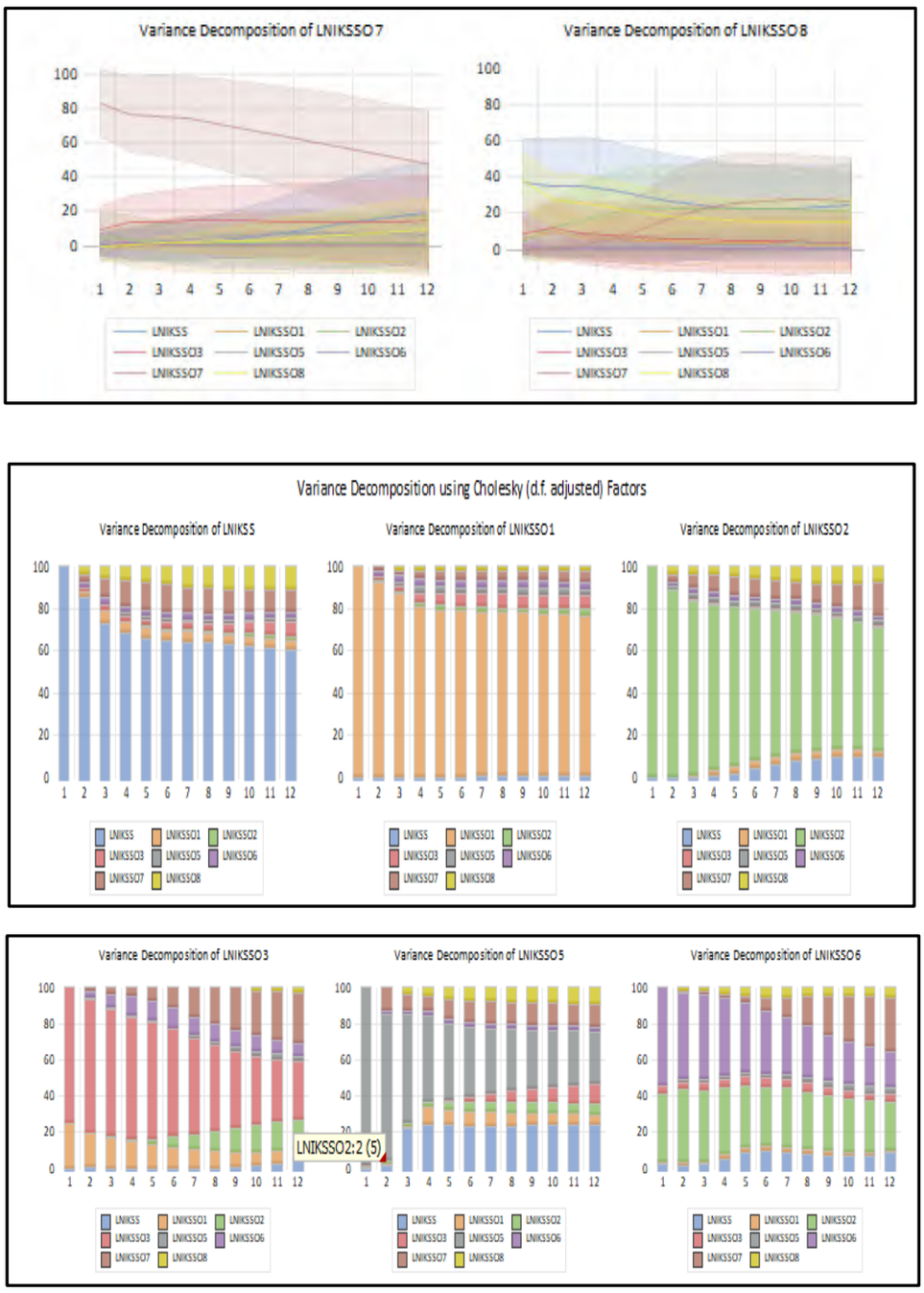

Gambar 2.9
Dekomposisi Variabel

6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukan hasil sebagai berikut:

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

Tabel 2.23
Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja IKSS0 Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta\ (lnIKSS1)$	$\Delta\ (lnIKSS2)$	$\Delta\ (lnIKSS3)$	$\Delta\ (lnIKSS4)$	$\Delta\ (lnIKSS5)$	$\Delta\ (lnIKSS6)$	$\Delta\ (lnIKSS7)$	$\Delta\ (lnIKSS8)$
$\Delta\ (lnIKSSO1)$	64.17	51.12	49.63	57.18	48.71	52.26	66.02	60.18
$\Delta\ (lnIKSSO2)$	71.26	67.13	64.47	66.54	58.96	44.53	63.25	70.07
$\Delta\ (lnIKSSO3)$	51.41	52.16	60.28	76.34	59.26	64.11	60.30	52.42
$\Delta\ (lnIKSSO4)$	57.81	68.36	62.54	73.12	63.04	63.09	70.23	62.25
$\Delta\ (lnIKSSO5)$	66.23	61.17	69.51	58.71	63.58	74.35	63.32	61.25
$\Delta\ (lnIKSSO6)$	63.41	63.14	62.72	51.77	69.14	65.14	63.27	64.01
$\Delta\ (lnIKSSO7)$	72.54	60.31	72.15	56.08	70.41	66.34	60.60	74.23

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

Tabel 2.24
Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja IKSS0 Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta\ (lnIKSSO1)$	$\Delta\ (lnIKSSO2)$	$\Delta\ (lnIKSSO3)$	$\Delta\ (lnIKSSO4)$	$\Delta\ (lnIKSSO5)$	$\Delta\ (lnIKSSO6)$	$\Delta\ (lnIKSSO7)$
$\Delta\ (lnIKSSO8)$	56.71	63.71	73.03	57.58	48.54	75.23	61.28
$\Delta\ (lnIKSSO9)$	61.12	62.24	59.31	54.69	54.63	64.15	72.54
$\Delta\ (lnIKSSO10)$	51.61	54.81	56.19	56.06	55.63	73.54	59.17
$\Delta\ (lnIKSSO11)$	53.26	64.53	70.14	57.16	64.15	66.24	63.31
$\Delta\ (lnIKSSO12)$	76.18	72.56	57.28	62.21	62.03	58.19	62.31
$\Delta\ (lnIKSSO13)$	63.25	60.34	76.15	65.01	64.48	63.21	65.24
$\Delta\ (lnIKSSO14)$	64.12	62.26	58.45	57.91	54.26	53.60	64.75
$\Delta\ (lnIKSSO15)$	55.72	54.61	51.83	54.36	57.18	56.90	57.21
$\Delta\ (lnIKSSO16)$	56.29	54.46	62.35	64.32	57.94	56.36	64.91
$\Delta\ (lnIKSSO17)$	50.13	53.16	56.32	55.47	58.62	55.13	56.31
$\Delta\ (lnIKSSO18)$	54.47	53.62	65.28	71.02	69.13	63.13	65.24
$\Delta\ (lnIKSSO19)$	56.13	58.47	56.32	54.57	57.12	55.62	64.52
$\Delta\ (lnIKSSO20)$	58.23	52.24	60.23	61.42	62.23	58.97	57.63
$\Delta\ (lnIKSSO21)$	54.63	62.58	59.23	54.41	53.62	57.21	54.78
$\Delta\ (lnIKSSO22)$	56.04	59.78	60.32	61.24	63.23	66.24	57.81
$\Delta\ (lnIKSSO23)$	57.03	64.21	64.88	72.02	74.36	53.60	54.63
$\Delta\ (lnIKSSO24)$	55.66	63.32	64.57	55.04	64.21	64.72	60.24
$\Delta\ (lnIKSSO25)$	54.63	57.16	63.02	65.24	66.58	66.32	58.02
$\Delta\ (lnIKSSO26)$	58.57	56.47	70.12	52.36	51.64	72.03	64.23
$\Delta\ (lnIKSSO27)$	66.34	64.45	56.23	56.63	54.47	59.63	56.23

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

b. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

Tabel 2.25
Persentase Cross Cutting IKSS0 Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta\ (lnIKSS1)$	$\Delta\ (lnIKSS2)$	$\Delta\ (lnIKSS3)$	$\Delta\ (lnIKSS4)$	$\Delta\ (lnIKSS5)$	$\Delta\ (lnIKSS6)$	$\Delta\ (lnIKSS7)$	$\Delta\ (lnIKSS8)$
$\Delta\ (lnIKSSO1)$	18.12	16.04	20.21	14.16	15.56	13.73	21.04	26.32
$\Delta\ (lnIKSSO2)$	17.23	23.12	14.26	18.23	19.19	15.76	13.65	14.32
$\Delta\ (lnIKSSO3)$	15.60	14.78	18.26	19.26	19.26	14.63	17.25	16.24
$\Delta\ (lnIKSSO4)$	13.64	16.62	17.42	14.56	20.14	14.16	15.82	16.16
$\Delta\ (lnIKSSO5)$	16.23	25.01	18.78	17.26	14.15	16.23	13.26	14.72
$\Delta\ (lnIKSSO6)$	16.26	15.78	14.57	15.26	14.69	15.26	16.44	15.55
$\Delta\ (lnIKSSO7)$	19.63	18.24	22.15	16.23	14.45	16.34	15.27	14.72

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 13 (2025)

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

Tabel 2.26
Persentase Cross Cutting IKSS0 Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta\ (lnIKSSO1)$	$\Delta\ (lnIKSSO2)$	$\Delta\ (lnIKSSO3)$	$\Delta\ (lnIKSSO4)$	$\Delta\ (lnIKSSO5)$	$\Delta\ (lnIKSSO6)$	$\Delta\ (lnIKSSO7)$
$\Delta\ (lnIKSSO8)$	16.45	12.28	15.62	14.23	11.24	17.18	18.23
$\Delta\ (lnIKSSO9)$	15.26	13.24	14.56	13.25	13.23	14.56	17.81
$\Delta\ (lnIKSSO10)$	14.58	14.23	13.36	14.56	15.28	14.23	17.12
$\Delta\ (lnIKSSO11)$	14.25	13.36	12.28	13.32	14.15	17.01	23.16
$\Delta\ (lnIKSSO12)$	12.28	11.58	14.23	13.36	14.25	17.17	16.40
$\Delta\ (lnIKSSO13)$	16.17	15.23	16.24	14.23	18.27	14.23	15.23
$\Delta\ (lnIKSSO14)$	14.05	13.26	14.23	15.23	16.24	14.52	13.23
$\Delta\ (lnIKSSO15)$	14.25	13.25	12.47	13.25	14.21	18.22	19.12
$\Delta\ (lnIKSSO16)$	16.25	13.24	17.24	16.23	15.21	14.27	21.26
$\Delta\ (lnIKSSO17)$	17.24	16.23	14.23	12.17	13.23	14.52	13.26
$\Delta\ (lnIKSSO18)$	16.24	14.22	13.26	16.24	15.47	14.23	13.26
$\Delta\ (lnIKSSO19)$	15.24	14.47	13.26	12.45	13.28	14.62	20.21
$\Delta\ (lnIKSSO20)$	18.21	17.24	16.52	14.14	13.25	14.21	15.01
$\Delta\ (lnIKSSO21)$	18.15	16.92	15.42	11.25	14.28	13.62	14.75
$\Delta\ (lnIKSSO22)$	13.35	14.26	13.25	14.23	14.25	13.38	12.36
$\Delta\ (lnIKSSO23)$	14.28	13.25	13.26	14.21	18.18	16.71	15.28
$\Delta\ (lnIKSSO24)$	13.26	12.48	13.25	14.14	15.24	14.21	14.26
$\Delta\ (lnIKSSO25)$	12.12	13.26	14.23	13.58	14.23	15.12	16.23

$\Delta\ (lnIKSSO26)$	14.27	13.32	14.71	11.81	19.24	20.12	15.61
$\Delta\ (lnIKSSO27)$	24.13	16.23	14.88	12.66	14.66	13.32	14.26

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

7. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

NO.	KENDALI KINERJA	SISTEM INFORMASI
1.	Kepala Badan	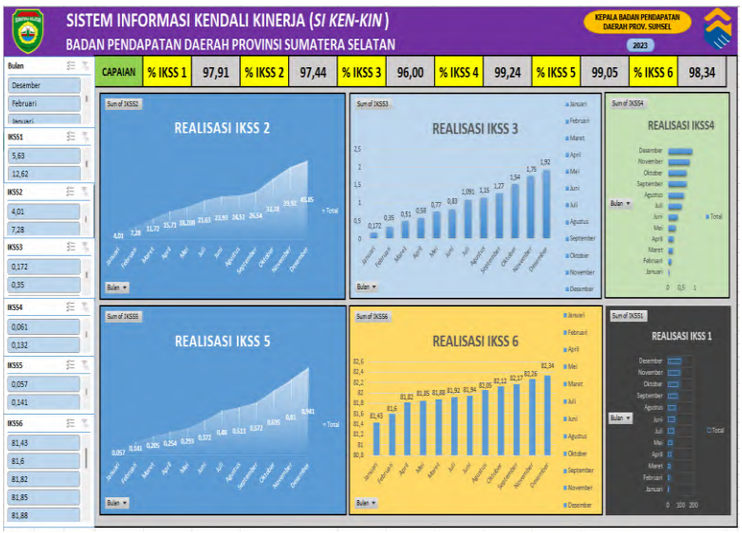
2.	Bidang Pajak	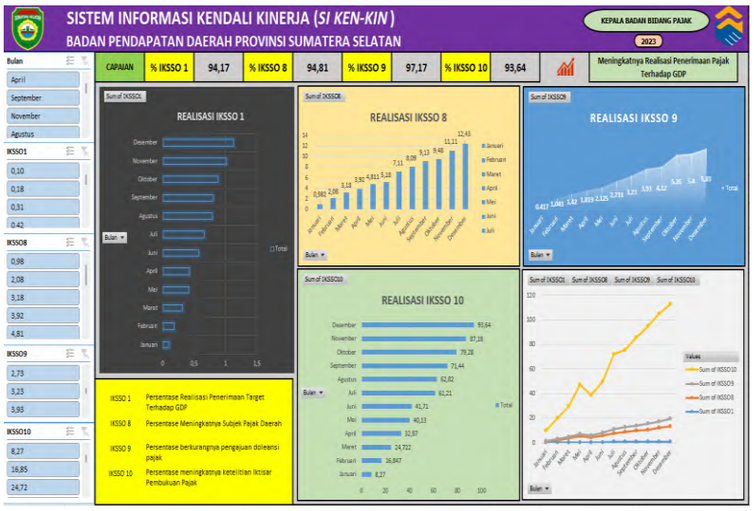
3.	Bidang PDLL	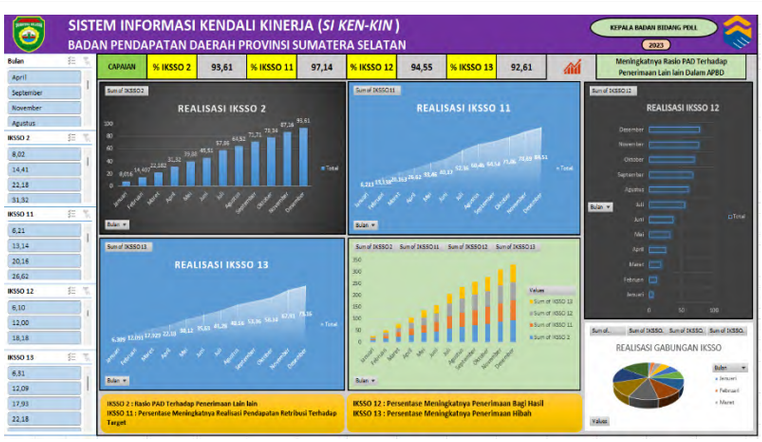

4.	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	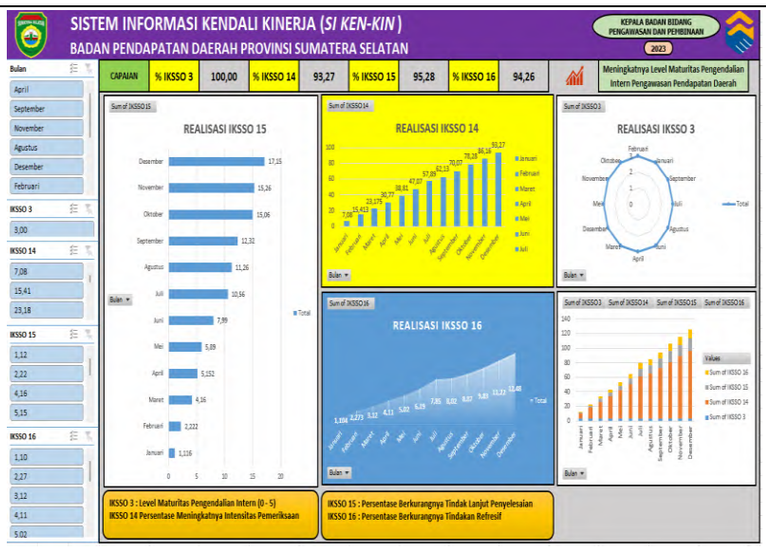
5.	Bidang P2PATDA	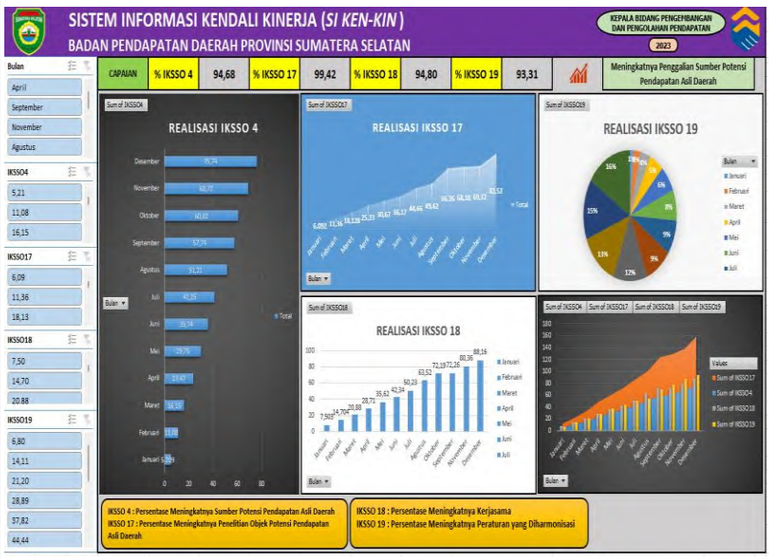
6.	Sekretariat	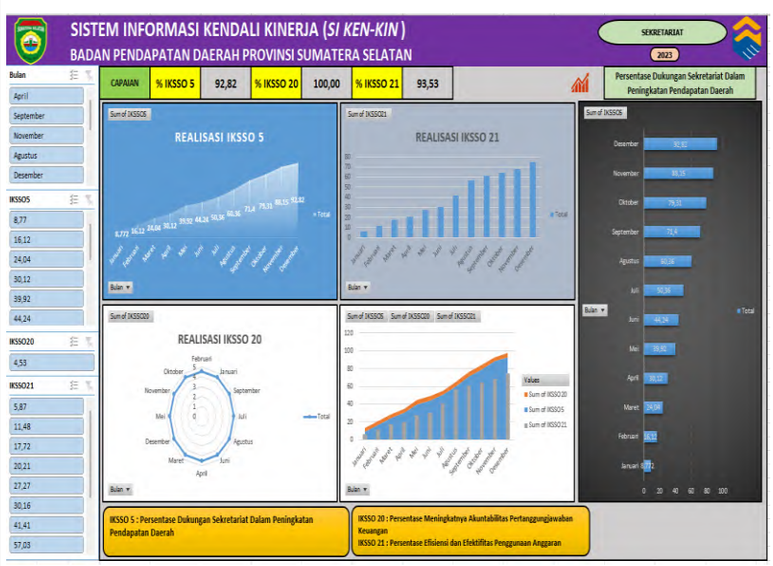

7.	UPTB Puslia	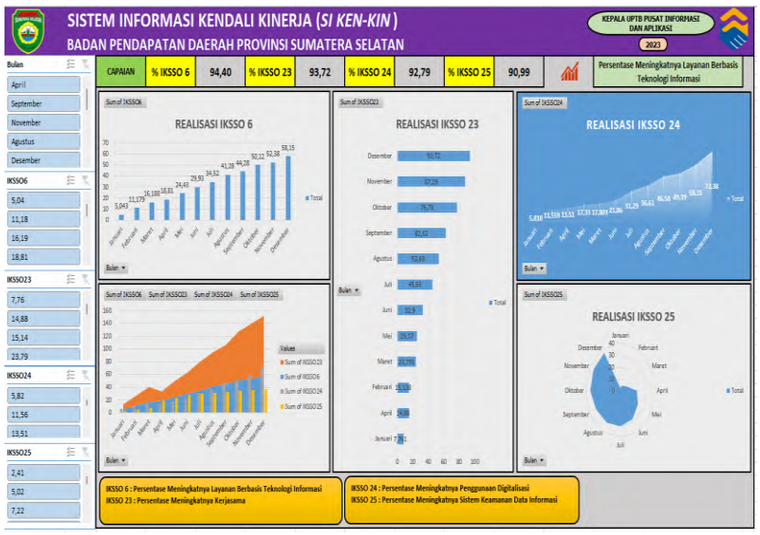

Gambar 2.10

Sumber : Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2025 dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025		PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOMES / OUTPUT	KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN [Rp.]	
		Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29	29	500.000.000	454.936.040
Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)	5,00	1,1187	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	2	312.400.000	284.937.838
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	980.400.000	814.937.400
Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3	3	535.000.000	456.199.100
Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	3	756.287.000	668.506.000
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	1	1.140.000.000	1.098.450.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli	92,03	93,198	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	634.000.000	550.200.000

	Daerah (PAD)								
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	300.000.000	257.345.430
	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,097	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	500.000.000	414.311.000

Sumber : Bapenda Prov Sumsel

3.1.1 Capaian Indikator Tujuan

Tujuan	**Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah**

"……Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan……"

Tujuan Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah dari sisi Pendapatan Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah digunakan peta Kapasitas Fiskal Daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran\ Pokok\ PUD]$$

Dimana:

$KFD_{Provinsi}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
TKD	=	Transfer ke Daerah
PTAD	=	Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA	=	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS	=	Dana Otonomi Khusus
DTI	=	Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS	=	Dana Istimewa
BP	=	Belanja Pegawai
BBH	=	Belanja Bagi Hasil
BB	=	Belanja Bunga
PUD	=	Pembayaran Utang Daerah

Untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah, dengan formula:

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja\ Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Dimana:

$RKFD_{Provinsi-i}$	=	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
$KFD_{Provinsi-i}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
BP	=	Belanja Pegawai Daerah Provinsi

3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukan angka peningkatan

Pengukuran data kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Data Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Tahun 2025

No.	Uraian		Realisasi [Rp.]	KFD	RKFD
[1]	[2]		[3]	[4]	
I	Pendapatan:		10.318.541.760.593,20		
	1.	PAD	4.509.197.075.145,67		
	2.	TKD	5.324.669.952.557,00		
	3.	PTAD	0,00		
	4.	LLPS	4.062.924.000,00		
	5.	SiLPA	1.082.013.492.798,21		
II	Pengeluaran:		5.937.293.561.806,30		
	1.	OTSUS	0,00		
	2.	DTI	0,00		
	3.	DAIS	0,00		
	4.	BP	2.818.836.811.555,00		
	5.	BBH	3.118.456.750.251,30		
	6.	BB	0,00		
	7.	PUD	0,00		
III	KFD			4.381.248.198.786,93	
IV	RKFD				1,554

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [10.318.541.760.593,20] - [5.937.293.561.806,30]$$

$$KFD_{Provinsi} = 4.381.248.198.786,93$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{4.381.248.198.786,93}{2.818.836.811.555,00}$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = 1,554$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja kapasitas fiskal daerah tahun 2025 yang telah ditentukan sebesar 1,95, maka realisasi tahun 2025 sebesar 1,554 atau tercapai sebesar 79,692 %.

Realisasi indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2025 sebesar 1,554 hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pendapatan tercapai realisasi sebesar Rp. 10.318.541.760.593,20 sementara dari sisi pengeluaran belanja pemerintah (*government expenditure*)

sebesar Rp. 5.937.293.561.806,30 sehingga kapasitas fiskal daerah diperoleh sebesar Rp. 4.381.248.198.786,93. Kondisi tahun 2025, sejak tanggal 05 Januari 2025 diberlakukannya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan nilai equivalen sama seperti pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB ini mengatur bahwa perubahan transfer ke Kabupaten/Kota semula dengan pola bagi hasil berubah menjadi *real time payment* ke RKUD Kabupaten/Kota, sehingga pencatatan realisasi dalam akuntansi mengalami penurunan. Dari sisi pengeluaran belanja, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga menambah pengeluaran belanja pegawai.

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend fluktuatif selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	2010	0,810	Rendah
2.	2011	0,740	Rendah
3.	2012	0,580	Rendah
4.	2013	0,540	Rendah
5.	2014	0,690	Rendah
6.	2015	0,340	Rendah
7.	2016	0,390	Rendah
8.	2017	1,160	Tinggi
9.	2018	1,117	Tinggi
10.	2019	0,794	Sedang
11.	2020	0,948	Tinggi
12.	2021	0,958	Tinggi

13.	2022	1,890	Sedang
14.	2023	1,832	Sedang
15.	2024	1,894	Sedang
16.	2025	1,554	Sedang

Sumber : Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukan trend yang terus mengalami peningkatan selama periode pengamatan dari mulai tahun 2010 sampai 2025. Hal ini mengindikasi bahwa kinerja kapsitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukan kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah ditunjukan dengan kinerja positif dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan dari transfer pusat ke daerah juga meningkat terutama jenis transfer pusat ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya.

Selama periode 2010 – 2025, kondisi indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dengan indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 1,894 dengan kategori sedang, sementara indeks kapasitas fiskal daerah terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,340 dengan kategori rendah.

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 secara *year-on-year* mengalami penurunan sebesar 0,34 poin walaupun masih tergolong dalam kapasitas sedang.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Pendapatan	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PAD	Rp 800.547.217.519,50	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 4.509.197.075.145,67
2	TKD	Rp 898.776.605.481,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 3.339.256.598.442,00	Rp 5.324.669.952.557,00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp 2.708.616.000,00	Rp 4.062.924.000,00
5	SILPA	Rp 911.033.505.651,00	Rp 1.794.023.508.720,22	Rp 1.705.434.949.456,33	Rp 480.611.808.891
Total		Rp 2.610.357.328.651,50	Rp 6.132.883.793.794,01	Rp 8.248.973.005.352,26	Rp 10.318.541.760.593,20

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 576.853.060.331,00	Rp 1.124.281.074.234,00	Rp 1.630.593.390.704,00	Rp 2.818.836.811.555,00
5	BBH	Rp 14.580.850.206,00	Rp 895.685.040.219,50	Rp 1.543.243.887.030,89	Rp 3.118.456.750.251,30
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 591.433.910.537,00	Rp 2.019.966.114.453,50	Rp 3.173.837.277.734,89	Rp 5.937.293.561.806,30

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 2.018.923.418.114,50	Rp 4.112.917.679.340,51	Rp 5.075.135.727.617,37	Rp 4.381.248.198.786,93
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	3,500	3,658	3,112	1,554

$$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran\ Pokok\ PUD]$$

Dimana:

$KFD_{provinsi}$ = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD = Pendapatan Asli Daerah
TKD = Transfer ke Daerah
PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS = Dana Otonomi Khusus
DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS = Dana Istimewa
BP = Belanja Pegawai
BBH = Belanja Bagi Hasil
BB = Belanja Bunga
PUD = Pembayaran Utang Daerah

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja\ Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{Provinsi-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
$KFD_{Provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah
Belanja Pegawai $_{Provinsi-i}$ = Belanja Pegawai

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 234.946.670.500,43	Rp 492.937.700.312,46	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.442.390.252.850,91	Rp 1.728.676.011.382,43	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.408.459.834.492,57	Rp 2.711.986.454.517,24	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.209.630.288.631,97	Rp 4.011.191.364.200,25	Rp 4.509.197.075.145,67
2	TKD	Rp 370.166.981.500,00	Rp 855.146.952.061,00	Rp 898.776.605.481,00	Rp 1.317.398.328.861,00	Rp 1.688.075.606.336,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 2.474.024.398.866,00	Rp 3.285.657.660.772,00	Rp 3.339.256.598.442,00	Rp 3.390.406.370.678,00	Rp 4.992.690.055.792,00	Rp 5.324.669.952.557,00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp 1.354.308.000,00	Rp 2.031.462.000,00	Rp 2.708.616.000,00	Rp 2.708.616.000,00	Rp 3.385.770.000,00	Rp 4.062.924.000,00
5	SILPA	Rp 534.741.994.674,79	Rp 1.103.848.724.368,84	Rp 911.033.505.651,00	Rp 1.638.002.186.525,87	Rp 1.914.008.302.821,05	Rp 1.794.023.508.720,22	Rp 1.600.870.097.753,00	Rp 1.939.507.314.860,07	Rp 1.705.434.949.456,33	Rp 720.042.671.239,43	Rp 1.082.013.492.798,21	Rp 480.611.808.890,56
Total		Rp 1.139.855.646.675,22	Rp 2.451.933.376.742,30	Rp 2.610.357.328.651,50	Rp 4.397.790.768.237,78	Rp 5.330.759.920.539,48	Rp 6.132.883.793.794,01	Rp 6.484.708.639.111,57	Rp 7.939.182.892.149,31	Rp 8.248.973.005.352,26	Rp 7.322.787.946.549,40	Rp 10.089.280.682.790,50	Rp 10.318.541.760.593,20

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 169.473.829.155,00	Rp 305.916.090.863,00	Rp 576.853.060.331,00	Rp 715.706.127.760,00	Rp 866.588.743.536,00	Rp 1.124.281.074.234,00	Rp 1.301.925.899.499,00	Rp 1.458.341.338.291,00	Rp 1.630.593.390.704,00	Rp 1.793.680.424.057,00	Rp 2.368.059.610.553,00	Rp 2.818.836.811.555,00
5	BBH	Rp -	Rp -	Rp 14.580.850.206,00	Rp 125.756.146.816,00	Rp 125.756.146.816,00	Rp 895.685.040.219,50	Rp 1.192.445.261.251,50	Rp 1.573.953.279.634,10	Rp 1.543.243.887.030,89	Rp 2.030.710.308.439,23	Rp 2.861.633.754.435,13	Rp 3.118.456.750.251,30
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 169.473.829.155,00	Rp 305.916.090.863,00	Rp 591.433.910.537,00	Rp 841.462.274.576,00	Rp 992.344.890.352,00	Rp 2.019.966.114.453,50	Rp 2.494.371.160.750,50	Rp 3.032.294.617.925,10	Rp 3.173.837.277.734,89	Rp 3.824.390.732.496,23	Rp 5.229.693.364.988,13	Rp 5.937.293.561.806,30

No.	Fiskal Daerah	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 970.381.817.520,22	Rp 2.146.017.285.879,30	Rp 2.018.923.418.114,50	Rp 3.556.328.493.661,78	Rp 4.338.415.030.187,48	Rp 4.112.917.679.340,51	Rp 3.990.337.478.361,07	Rp 4.906.888.274.224,21	Rp 5.075.135.727.617,37	Rp 3.498.397.214.053,17	Rp 4.859.587.317.802,33	Rp 4.381.248.198.786,93
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	5,726	7,015	3,500	4,969	5,006	3,658	3,065	3,365	3,112	1,950	2,052	1,554

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

$$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran\ Pokok\ PUD]$$

Dimana:

$KFD_{provinsi}$ = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD = Pendapatan Asli Daerah
TKD = Transfer ke Daerah
PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS = Dana Otonomi Khusus
DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS = Dana Istimewa
BP = Belanja Pegawai
BBH = Belanja Bagi Hasil
BB = Belanja Bunga
PUD = Pembayaran Utang Daerah

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja\ Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{Provinsi-i}$	=	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
$KFD_{Provinsi-i}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah
Belanja Pegawai $_{Provinsi-i}$	=	Belanja Pegawai

No.	Pendapatan	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PAD	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 5.309.757.143.255,46
2	TKD	Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 2.224.228.176.382,00	Rp 3.736.209.855.726,00	Rp 5.648.721.133.679,00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LLPS	Rp -	Rp 1.205.419.113.904,57	Rp 2.679.312.000,00	Rp 4.018.968.000,00
5	SiLPA	Rp 2.375.661.012.263,88	Rp 841.860.784.669,20	Rp 841.860.784.669,20	Rp 114.138.256.896,39
Total		Rp 4.631.586.069.340,62	Rp 6.715.068.597.971,74	Rp 8.352.204.171.065,60	Rp 11.076.635.501.830,90

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 351.201.408.431,00	Rp 1.272.510.439.766,00	Rp 1.792.563.627.554,00	Rp 2.528.391.380.267,00
5	BBH	Rp 391.842.644.792,00	Rp 1.401.122.947.393,32	Rp 2.670.833.973.089,92	Rp 4.296.405.699.936,00
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 743.044.053.223,00	Rp 2.673.633.387.159,32	Rp 4.463.397.600.643,92	Rp 6.824.797.080.203,00

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 3.888.542.016.117,62	Rp 4.041.435.210.812,42	Rp 3.888.806.570.421,68	Rp 4.251.838.421.627,85
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	11,072	3,176	2,169	1,682

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 962.599.471.629,47	Rp 1.289.700.964.348,92	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.718.780.543.810,12	Rp 2.067.741.539.381,43	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.961.452.532.073,49	Rp 3.358.658.622.632,28	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.164.009.649.440,50	Rp 5.309.757.143.255,46	Rp 5.309.757.143.255,46
2	TKD	Rp 584.354.834.800,00	Rp 872.568.153.400,00	Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 1.578.287.636.455,00	Rp 1.897.505.375.766,00	Rp 2.224.228.176.382,00	Rp 2.367.826.955.981,00	Rp 3.378.945.549.743,00	Rp 3.736.209.855.726,00	Rp 4.323.978.143.099,00	Rp 5.648.721.133.679,00	Rp 5.648.721.133.679,00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.009.484.000,00	Rp 2.679.312.000,00	Rp 3.014.226.000,00	Rp 4.018.968.000,00	Rp 4.018.968.000,00
5	SiLPA	Rp 984.336.427.290,38	Rp 974.049.365.602,38	Rp 2.375.661.012.263,88	Rp 2.676.414.579.737,69	Rp 2.412.829.783.000,71	Rp 841.860.784.669,20	Rp 624.209.805.743,07	Rp 985.764.031.620,41	Rp 841.860.784.669,20	Rp 1.059.034.333.863,57	Rp 114.138.256.896,39	Rp 114.138.256.896,39
Total		Rp 2.531.290.733.719,85	Rp 3.136.318.483.351,30	Rp 4.631.586.069.340,62	Rp 5.973.482.760.002,81	Rp 6.378.076.698.148,14	Rp 5.509.649.484.067,17	Rp 5.953.489.293.797,56	Rp 7.725.377.687.995,69	Rp 8.352.204.171.065,60	Rp 9.550.036.352.403,07	Rp 11.076.635.501.830,90	Rp 11.076.635.501.830,90

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 120.266.845.444,00	Rp 297.621.222.433,00	Rp 351.201.408.431,00	Rp 662.177.661.238,00	Rp 804.417.618.097,00	Rp 1.272.510.439.766,00	Rp 1.455.590.263.656,00	Rp 2.466.708.857.418,00	Rp 1.792.563.627.554,00	Rp 1.957.049.740.010,00	Rp 2.528.391.380.267,00	Rp 2.528.391.380.267,00
5	BBH	Rp -	Rp 391.842.644.792,00	Rp 391.842.644.792,00	Rp 586.012.148.087,00	Rp 1.069.585.316.056,40	Rp 1.401.122.947.393,32	Rp 1.830.453.794.364,32	Rp 2.214.867.726.882,32	Rp 2.670.833.973.089,92	Rp 3.043.458.635.724,04	Rp 4.296.405.699.936,00	Rp 4.296.405.699.936,00
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 120.266.845.444,00	Rp 689.463.867.225,00	Rp 743.044.053.223,00	Rp 1.248.189.809.325,00	Rp 1.874.002.934.153,40	Rp 2.673.633.387.159,32	Rp 3.286.044.058.020,32	Rp 4.681.576.584.300,32	Rp 4.463.397.600.643,92	Rp 5.000.508.375.734,04	Rp 6.824.797.080.203,00	Rp 6.824.797.080.203,00

No.	Fiskal Daerah	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 2.411.023.888.275,85	Rp 2.446.854.616.126,30	Rp 3.888.542.016.117,62	Rp 4.725.292.950.677,81	Rp 4.504.073.763.994,74	Rp 2.836.016.096.907,85	Rp 2.667.445.235.777,24	Rp 3.043.801.103.695,37	Rp 3.888.806.570.421,68	Rp 4.549.527.976.669,03	Rp 4.251.838.421.627,85	Rp 4.251.838.421.627,85
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	20,047	8,221	11,072	7,136	5,599	2,229	1,833	1,234	2,169	2,325	1,682	1,682

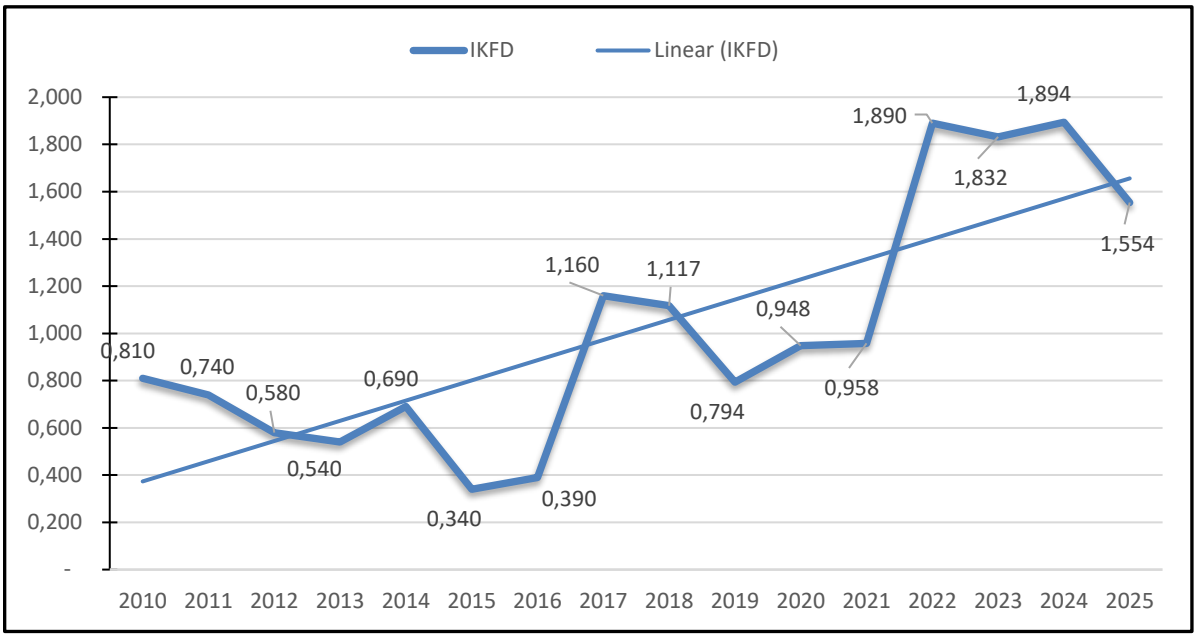

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target kinerja kapasitas fiskal daerah yang tertuang dalam dokumen jangka menengah RPJMD tahun 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,28. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 1,554 dengan capaian sebesar 68,15 %

Tabel 3.4
Target dan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,554	2,28	68,15

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Kondisi ketercapaian kinerja indeks kapasitas fiskal daerah tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan tingkat kemajuan sebesar 68,15 %, masih membutuhkan dukungan kinerja sebesar 31,85 % yang akan dicapai pada selama tahun 2026 – 2030.

Dibandingkan dengan periode Renstra tahun 2019 – 2024 (sebelumnya), kondisi indeks kapasitas fiskal daerah turun dari 1,894 menjadi 1,554 atau turun sebesar 17,95 %, hal ini disebakan karena perubahan regulasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah pada 10 provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional

No.	Provinsi Pulau Sumatera	Kinerja Tahun 2025	
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	Provinsi Aceh	0,849	Sangat Rendah
2.	Provinsi Sumatera Utara	2,351	Tinggi
3.	Provinsi Sumatera Barat	1,151	Rendah
4.	Provinsi Riau	2,074	Sedang
5.	Provinsi Jambi	1,542	Rendah
6.	Provinsi Sumatera Selatan	1,554	Sedang
7.	Provinsi Bengkulu	1,227	Rendah
8.	Provinsi Lampung	1,671	Sedang
9.	Provinsi Kepulauan Riau	1,432	Rendah
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,651	Rendah

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Posisi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Pulau Sumatera berada pada peringkat 3 (tiga) tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

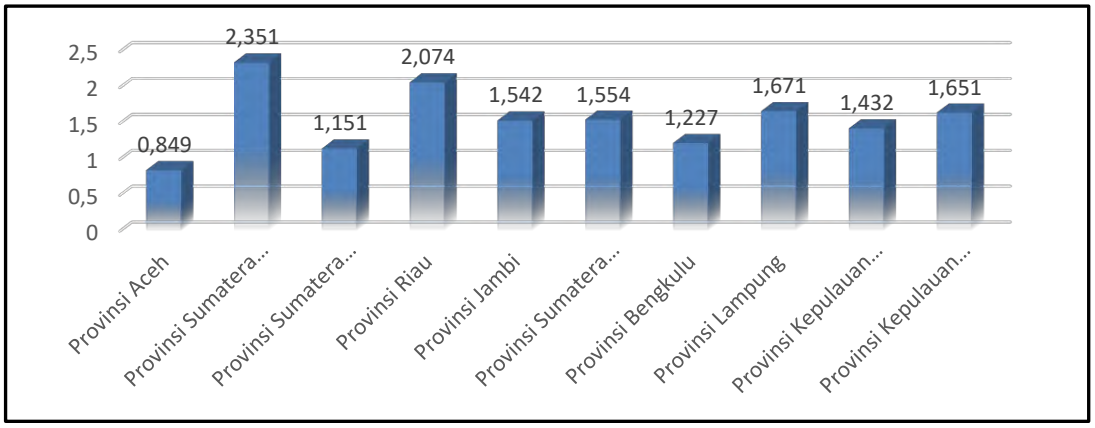

Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data KEMENKEU

Kondisi indeks kapasitas fiskal daerah dengan perbandingan pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,351, kemudian Provinsi Riau sebesar 2,074. Indeks kapasitas fiskal daerah terendah pada Provinsi Aceh sebesar 0,849, sementara posisi indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada kelima dengan indeks sebesar 1,554.

3.1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	79,692	Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan Pajak BBN-KB berupa equivalen sama seperti pembayaran pajak pelaksanaan UU 28 tahun 2009	
						Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) bersama dengan OPD terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja	
						Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah berbasis mitigasi risiko	
						Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara door to door service	
						Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja indeks kapasitas fiskal daerah dengan strategi:

1. Melaksanakan kegiatan *door to door service* yang merupakan bentuk penagihan pajak bagi wajib pajak dari satuan rumah tangga yang dilaksanakan penagihan;
2. Melaksanakan *updating* basis data pajak daerah untuk mencapai tingkat keakuratan data pajak sehingga dapat dipergunakan dalam menentukan proyeksi pendapatan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk sosialisasi langsung, penyebaran leflet, booklet, sosial media serta media lainnya ke masyarakat untuk mematuhi ketentuan bayar pajak sesuai dengan tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan sehingga pembangunan Sumatera Selatan terus berjalan;
4. Melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sehingga jangkauan layanan pembayaran pajak sampai ke tingkat kelurahan atau pedesaan;
5. Mempercepat proses deregulasi beberapa peraturan yang terkait dengan pajak daerah untuk memastikan kapasitas dan supremasi hukum di bidang perpajakan;
6. Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Tim Pembina Samsat di tingkat Provinsi untuk memastikan dukungan kinerja dari pihak Kepolisian dan Jasa Raharja;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses datakependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajakmenuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru.

Tabel 3.7
Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kinerja

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	79,692	500.000.000	454.936.040	90,98	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya *cross-cutting* bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung</u>: 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 6. Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan 7. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025 s.d 17 Desember 2025

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	79,692	500.000.000,00	454.936.040,00	90,98	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator tujuan sebesar 12,23 %, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 454.936.040,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja indeks kapasitas fiskal sebesar 1,554 indeks.

3.1.1.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 1,554 Indeks, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran program sebesar Rp. 3.348.725.040,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja indeks kapasitas fiskal sebesar 1,554 indeks.

3.1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.10

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	79,692	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang

				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang	58,42	Menunjang

					memiliki Piutang Pajak		
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.1.8 Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.11
Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**			**226.466.839.034,00**	**186.772.021.363,00**	**82,47**
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**174.300.000,00**	**98.055.116,00**	**56,26**
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.000.000,00	36.284.836,00	62,56
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	59.000.000,00	24.157.7052,00	40,95
		1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.300.000,00	37.612.578,00	65,64
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**168.827.292.000,00**	**137.776.114.439,00**	**81,61**
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168.426.842.000,00	137.441.519.398,00	81,60
		2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.450.000,00	199.340.000,00	82,22
		2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	158.000.000,00	135.255.041,00	85,60
	3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**16.600.000,00**	**5.504.000,00**	**33,16**
		3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.600.000,00	5.504.000,00	33,16
	4.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**319.180.000,00**	**224.233.306,00**	**70,25**
		4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	32.480.000,00	-	0,00
		4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	87.000.000,00	81.996.206,00	94,25
		4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	157.000.000,00	102.277.100,00	65,14
		4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.700.000,00	39.960.000,00	93,58
	5.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**936.843.524,00**	**429.603.060,00**	**45,86**
		5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	31.200.000,00	-	0,00
		5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	265.400.000,00	168.630.000,00	63,54
		5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	279.225.000,00	260.973.060,00	93,46
		5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	361.018.524,00	-	0,00
	6.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**22.892.747.920,00**	**19.586.238.672,00**	**85,56**
		6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	759.828.800,00	91,20
		6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	699.750.000,00	693.515.514,00	99,11
		6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500.000.000,00	495.912.000,00	99,18
		6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.809.062.220,00	1.667.268.137,00	92,16
		6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.419.362.980,00	5.417.617.167,00	99,97
		6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	45.650.000,00	91,30
		6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.400.000,00	138.455.600,00	97,92

		6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.400.000,00	546.548.924,00	90,88
		6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.838.600.000,00	9.821.442.530,00	76,50
	7.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.100.000.000,00**	**998.219.017,00**	**90,75**
		7.1	Pengadaan Mebel	400.000.000,00	398.819.017,00	99,70
		7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000,00	599.400.000,00	99,90
		7.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00	-	0,00
	8.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**25.160.520.204,00**	**22.299.748.124,00**	**88,63**
		8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.400.000,00	33.353.600,00	42,01
		8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.184.696.268,00	2.464.759.289,00	77,39
		8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.400.000,00	175.290.000,00	96,63
		8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.715.023.936,00	19.626.345.235,00	90,38
	9.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**7.039.355.386,00**	**5.354.305.629,00**	**76,06**
		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.000.000.000,00	1.595.047.591,00	79,75
		9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.789.635.180,00	1.760.598.978,00	63,11
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.304.945,00	401.819.000,00	83,14
		9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.766.415.261,00	1.596.840.060,00	90,40
II.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			**115.000.000,00**	**106.826.431,00**	**92,89**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**115.000.000,00**	**106.826.431,00**	**92,89**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	115.000.000,00	106.826.431,00	92,89
III.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	397.825.000,00	362.778.919,00	91,19
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	324.000.000,00	128.959.423,00	39,80
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	737.500.000,00	290.596.984,00	39,40
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	422.507.400,00	274.338.573,00	64,93
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	92.900.000,00	21.767.110,00	23,43
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	496.581.260,00	358.325.750,00	72,16
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50.300.000,00	34.018.860,00	67,63
		1.10	Penagihan Pajak Daerah	312.615.350,00	183.841.350,00	58,81
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.000.000,00	11.720.204,00	43,41
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	231.280.000,00	207.017.260,00	89,51
		1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.400.000,00	-	0,00

		1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	83.000.000,00	15.302.590,00	18,44
	JUMLAH			**231.980.748.044,00**	**190.018.241.762,00**	**81,91**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.2 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

SS.1	**Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal**

".....Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah*....."*

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Formula perhitungan IKSS.1:

$$y = (\frac{Nilai\ Absolut\ dari\ Total\ PAD\ dalam\ Realisasi}{Total\ PAD\ dalam\ APBD\ (sebelum\ APBD\ Perubahan)} - 1\ x\ 100\%$$

Dimana:

y = Nilai Deviasi

PAD = Realisasi PAD tahun ke n

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebelum perubahan)

3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran realisasi data kinerja IKSS.1 tahun 2025:

Tabel 3.12
Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1

No.	Bulan	Realisasi PAD	Total PAD	Nilai Deviasi	Target Tahunan 2025
1.	Januari	240.196.687.137,67	4.459.311.556.974,00	94,6136	5,00
2.	Februari	495.908.944.084,99	4.459.311.556.974,00	88,8792	
3.	Maret	800.547.217.519,50	4.459.311.556.974,00	82,0477	
4.	April	1.456.859.523.046,22	4.459.311.556.974,00	67,3299	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	4.459.311.556.974,00	60,9769	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	4.459.311.556.974,00	49,7032	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	4.459.311.556.974,00	41,3217	
8.	Agustus	2.920.093.533.483,03	4.459.311.556.974,00	34,5169	
9.	September	3.201.572.841.453,93	4.459.311.556.974,00	28,2048	
10.	Oktober	3.730.677.293.545,70	4.459.311.556.974,00	16,3396	
11.	November	4.011.191.364.200,25	4.459.311.556.974,00	10,0491	
12.	Desember	4.509.197.075.145,67	4.459.311.556.974,00	1,1187	
	Tahunan	4.509.197.075.145,67	4.459.311.556.974,00	1,1187	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian kinerja tahun 2025 $= \frac{1,1187}{5,000} x\ 100\% = 22,374\ \%$

Capaian kinerja untuk IKSS.1 tahun 2025 mencapai 22,374%, menunjukan bahwa pendapatan termobilisasi dengan baik, dengan nilai deviasi yang semakin menurun pada trend bulanan.

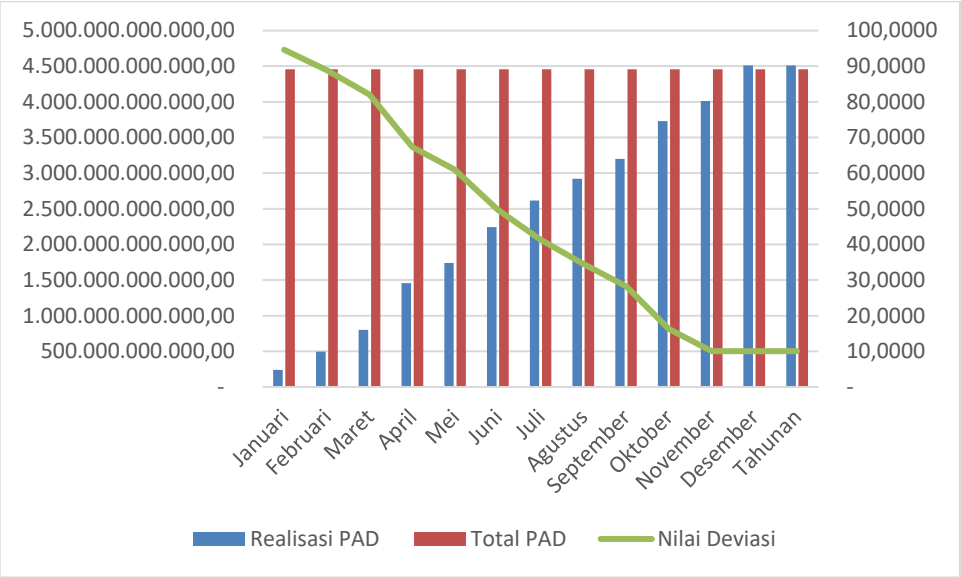

Gambar 3.3
Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga terus meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Dengan indiaktornya untuk mendekatkan pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) pada garis normal yang telah ditentukan sejak perencanaan awal. Efek deviasi yang terjadi, ketika jarak deviasi yang semakin kecil dari kondisi penerimaan pendapatan dari perencanaan awal, maka kondisi nya semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal semakin baik.

Kinerja indikator *revenue mobilization* pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 1,1187 menggambarkan kondisi bahwa kredibilitas atas kepercayaan pendapatan asli daerah semakin baik karena mendekati garis normal yang diinginkan. Kondisi ini menunjukan kinerja yang positif karena pendapatan asli daerah yang diharapkan sesuai dengan kondisi belanja pembiayaan pembangunan Sumatera Selatan pada tahun 2025.

3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Realisasi kinerja IKSS.1 tahun 2025 mencapai 1,1187 %, dimana

Tabel 3.13
Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Realisasi PAD [Rp]	APBD Bersumber PAD [Rp]	Nilai Deviasi
1.	2010	1.545.014.556.400,20	1.412.557.120.000,00	9,38 %
2.	2011	1.849.119.912.016,20	1.563.704.000.000,00	18,25 %
3.	2012	2.001.714.583.551,60	1.899.649.695.000,00	5,37 %
4.	2013	2.021.696.787.275,10	2.287.016.036.000,00	11,60 %
5.	2014	2.422.673.788.768,90	2.482.128.778.000,00	2,40 %
6.	2015	2.534.526.413.315,20	2.784.966.905.383,00	8,99 %
7.	2016	2.546.177.544.348,70	2.733.329.640.400,50	6,85 %
8.	2017	3.031.633.624.303,15	3.165.360.996.225,00	4,22 %
9.	2018	3.528.010.712.183,45	3.449.590.628.837,00	2,27 %
10.	2019	3.494.510.853.251,24	3.436.828.903.746,55	2,00 %
11.	2020	3.375.100.484.841,37	3.617.058.256.621,75	7,00 %
12.	2021	3.866.149.015.117,47	4.747.088.053.007,00	19,00 %
13.	2022	4.931.014.199.344,74	5.385.438.862.341,00	8,44 %
14.	2023	4.410.571.914.182,50	4.149.362.000.000,00	6,30 %
15.	2024	5.312.794.988.178,45	4.760.692.664.094,00	11,5 %
16.	2025	4.509.197.075.145,67	4.459.311.556.974,00	1,1187 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Perbandingan realisasi kinerja IKSS.1 tahun 2025 sebesar 1,1187 % mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 11,5 % atau turun sebesar 10,38 poin, hal ini menunjukan kinerja yang lebih baik dari tahun 2024.

Selama periode tahun 2010 – 2025 tingkat kredibilitas indikator *revenue mobilization*, kondisi yang mendekati garis normal dari perencanaan awal terbaik pada tahun 2025 dengan deviasi hanya 1,1187 %, sementara deviasi menjauh yang tidak baik terjadi pada tahun 2021 sebesar 19,00 %, hal ini dipengaruhi oleh pemulihan kondisi ekonomi secara nasional dan regional tingkat provinsi sebagai akibat dampak Covid-19.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.1	:	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
IKSS.1	:	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)

$$y = \left(\frac{Nilai\ Absolut\ dari\ Total\ PAD\ dalam\ Realisasi}{Total\ PAD\ dalam\ APBD\ (sebelum\ perubahan)} - 1 \text{ x } 100\% \right)$$

Dimana :
y = Nilai Deviasi
Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n
Belanja = Belanja yang bersumber dari PAD

No.	Uraian	Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD	Total PAD dalam APBD	Nilai Deviasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 4.459.311.556.974,00	82,0477
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 4.459.311.556.974,00	49,7032
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 4.459.311.556.974,00	28,2048
4	Triwulan IV	Rp 4.509.197.075.145,67	Rp 4.459.311.556.974,00	1,1187

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 495.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.533.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.730.677.293.545,70	Rp 4.011.191.364.200,25	Rp 4.509.197.075.145,67
2	Total PAD dalam APBD	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00
	Nilai Deviasi	94,6136	88,8792	82,0477	67,3299	60,9769	49,7032	41,3217	34,5169	28,2048	16,3396	10,0491	1,1187

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.1	:	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
IKSS.1	:	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)

$$y = \left(\frac{\textit{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\textit{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \text{ x } 100\% \right)$$

Dimana :
y = Nilai Deviasi
Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n
Belanja = Belanja yang bersumber dari PAD

No.	Uraian	Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD	Total PAD dalam APBD	Nilai Deviasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 4.760.692.664.094,00	76,429
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 4.760.692.664.094,00	48,672
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.760.692.664.094,00	20,779
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 4.760.692.664.094,00	11,597

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Total PAD dalam APBD	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00
	Nilai Deviasi	92,5513	85,1946	76,4288	64,0142	56,7756	48,6722	37,3015	28,9868	20,7793	12,4706	1,6802	11,5972

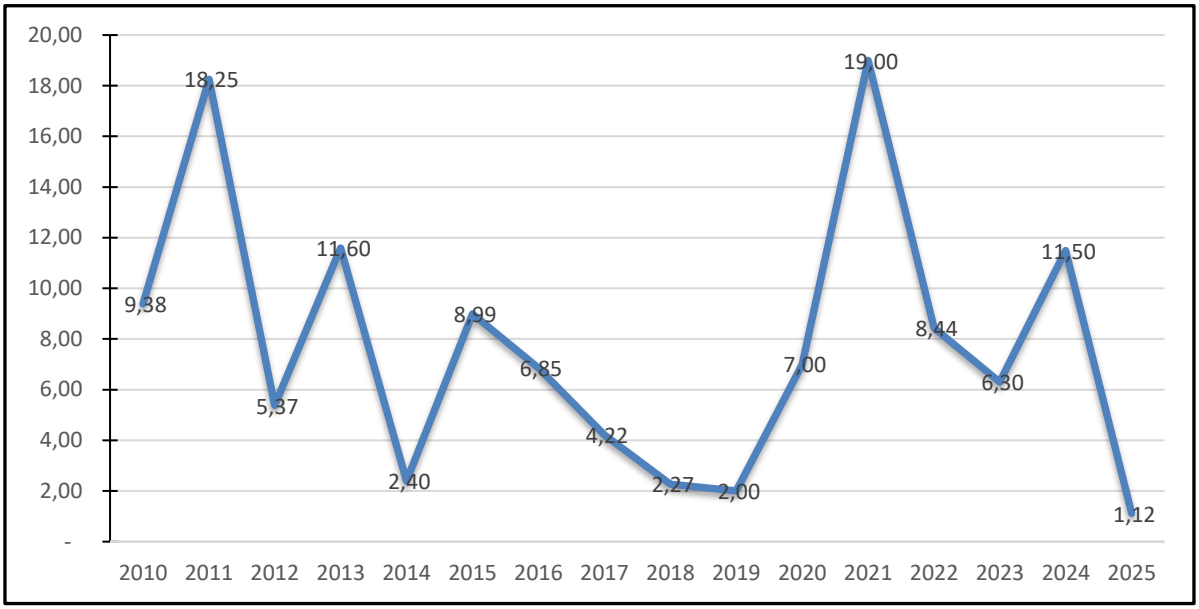

Gambar 3.4
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD Terhadap 2025 Dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja IKSS.1 tahun 2025 sebesar 1,1187 dan terhadap target jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 target kinerja IKSS.1 ini sebesar 8,51. Terhadap target jangka menengah bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 13,146 %.

Tabel 3.13
Perhitungan Capaian Data Kinerja IKSS 1Terhadap Target Realisasi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)	1,1187	8,51	13,146

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Kinerja indikator *revenue mobilization*, apablia dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra tahun 2025 – 2029 mencapai tingkat kemajuan 13,146 %, kondisi ini harus

dikendalikan untuk tetap terjaga pada garis normal yang diharapkan sehingga deviasi yang diharapkan semakin rendah untuk meningkatkan kredibilitas pendapatan asli daerah pada kondisi perencanaan awal

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi:

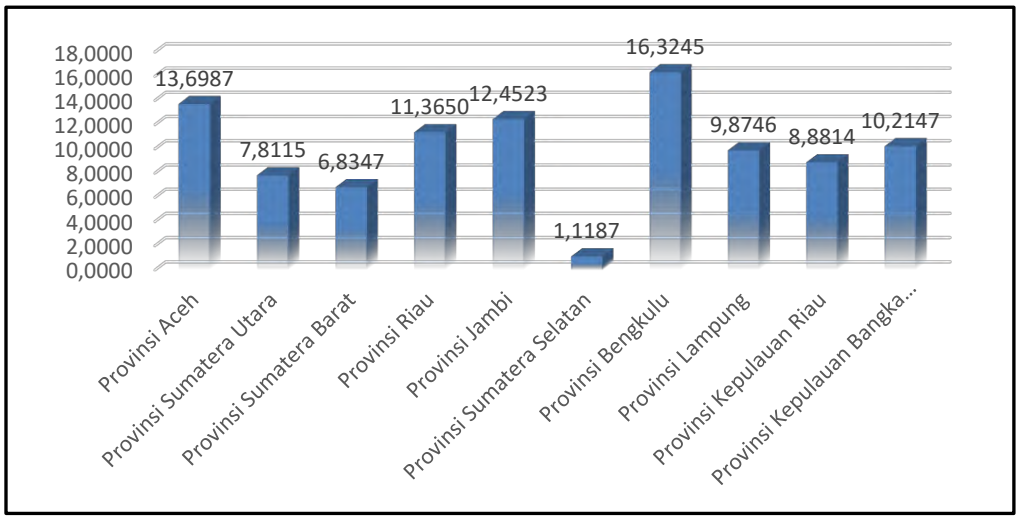

Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Nilai deviasi terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,1187 dan nilai deviasi tertinggi pada Provinsi Bengkulu dengan nilai deviasi sebesar 16,3245. Kondisi kredibilitas *revenue mobilization* pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi atau deviasi yang menjauh dari garis normal karena perubahan regulasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

Dimana pencatatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat pada akun Pemerintah Provinsi dan langsung diterima oleh rekening RKUD Kabupaten/Kota secara real time payment pada saat wajib pajak membayar pajak.

3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)	5,00	1,1187	22,374	Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor Retribusi	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja indikator *revenue mobilization* sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;
3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
4. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
5. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
6. Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive;
7. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
8. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD *(Revenue Mobilization*)	5,00	1,1187	22,374	312.400.000	284.937.838	91,21	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya *cross-cutting* bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung</u>: 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 3. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif 4. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas 5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.2.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.17
Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Angggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	5,00	1,1187	22,374	312.400.000	284.937.838	91,21	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD *(Revenue Mobilization*) sebesar 12,23 %, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 284.937.838,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja *Revenue Mobilization* sebesar 1,1187 %.

3.1.2.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.18

Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Angggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**4.981.929.010,00**	**2.871.335.054,00**	**57,64**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**4.981.929.010,00**	**2.871.335.054,00**	**57,64**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
	JUMLAH						**4.981.929.010,00**	**2.871.335.054,00**	**57,64**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD *(Revenue Mobilization*) sebesar 1,1187 %, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.871.335.054,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja *Revenue Mobilization* sebesar 1,1187 %.

3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.19

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja IKSS 1

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD *(Revenue Mobilization)*	22.374	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.3 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

SS.2 **Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah**

".....Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power,* diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, *performance* layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara yang lebih

representatif dan akuntabel, karena ekstraksi pendapatan menciptakan kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan desentralisasi fiskal daerah. Salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Formula Perhitungan IKSS.2:

$$IKF = 1 - \left(\frac{[Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}\right)$$

Dimana:

IKF = Indeks Kemandirian Fiskal

Tr_{GP} = *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)

Tr_{SP} = Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B = *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH = Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Kehutanan

REV_{OR} = Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1 = Nilai Invers

3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja:

Tabel 3.20

Pengukuran Realisasi Data Kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2025

No.	Uraian		Realisasi [Rp.]
[1]	[2]		[3]
I	Pembilang:		
	1	Tr_{GP}	1.707.438.208.818,00
	2	Tr_{SP}	1.130.609.940.339,00
	3	B	0,00
	4	REVSH	2.080.184.935.400,00
		Sub Total I	4.918.233.084.557,00
II	Penyebut:		
	1	REV_{OR}	4.509.197.075.145,67
	2	Tr_{GP}	1.707.438.208.818,00
	3	Tr_{SP}	1.130.609.940.339,00
	4	B	0,00
	5	REVSH	2.080.184.935.400,00
		Sub Total II	9.427.430.159.702,67

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian 2025: $IKF = 1 - \left(\frac{4.918.233.084.557,00}{9.427.430.159.702,67}\right) = 0,478$

Capaian indeks kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 47,80 % yang mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah otonom dengan kategori menuju mandiri (dibawah nilai 50%). Dalam membiayai pembangunan di Sumatera Selatan masih mempunyai ketergantungan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Terhadap target tahun 2025, nilai IKF = $\frac{0,478}{0,4340}\ x\ 100\ \% = 110,14\%$

Upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan mencapai 110,14 %, namun nilai indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan masih belum mandiri (menuju mandiri).

Realisasi capaian indeks kemandirian fiskal daerah pada tahun 2025 mencapai 47,80 %, hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan pembangunan Sumatera Selatan masih sangat tergantung dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat sebesar 52,20 %. Strategi untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama pada sektor pajak daerah.

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Nilai realisasi capaian kinerja IKSS.2 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun, posisi indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan mengalami fluktuatif antara mandiri dan menuju mandiri.

Tabel 3.21
Pengukuran Realisasi IKSS 2 Tahun 2025 serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi TKD	Rasio	IKF Invers
1.	2010	3,222,589,000,000.00	1,840,563,000,000.00	0.57	0.43
2.	2011	3,963,984,966,161.18	1,992,557,000,412.00	0.50	0.50
3.	2012	5,223,940,074,318.61	2,378,798,650,801.00	0.46	0.54
4.	2013	5,473,787,298,623.10	2,649,216,454,338.00	0.48	0.52
5.	2014	6,252,136,312,720.01	2,982,866,000,798.00	0.48	0.52
6.	2015	5,990,424,062,511.95	2,329,728,331,330.00	0.39	0.61
7.	2016	6,582,780,929,675.43	2,506,312,481,085.00	0.38	0.62
8.	2017	8,195,968,131,799.16	4,061,113,371,545.00	0.50	0.50
9.	2018	9,141,371,395,099.70	5,577,767,500,414.00	0.61	0.39
10.	2019	9,280,742,072,448.24	5,698,701,179,582.00	0.61	0.39
11.	2020	9,278,520,060,061.37	5,875,896,342,538.00	0.63	0.37
12.	2021	9,611,977,226,695.47	5,712,683,072,712.00	0.59	0.41
13.	2022	10,235,849,833,278.70	5,288,928,528,005.00	0.52	0.48
14.	2023	9,598,903,780,312.40	4,395,361,034,595.00	0.46	0.54
15.	2024	10,965,540,990,987.00	5,648,721,133,679.00	0.52	0.48
16.	2025	9.427.430.159.702,67	4.918.233.084.557,00	0.52	0.48

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.2	:	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
IKSS.2	:	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

$$\left(\frac{[\,Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH\,]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}\right)$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal
TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan
REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	TrGP	Rp 486.492.112.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.707.438.208.818,00
2	Tr_{SP}	Rp 7.055.512.461,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 547.785.603.568,00	Rp 1.130.609.940.339,00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 405.228.980.350,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 2.080.184.935.400,00
Total		Rp 898.776.605.481,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 3.332.767.305.442,00	Rp 4.918.233.084.557,00

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	REV_{OR}	Rp 800.547.217.519,50	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 4.509.197.075.145,67
5	Tr_{GP}	Rp 486.492.112.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.707.438.208.818,00
3	Tr_{SP}	Rp 7.055.512.461,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 547.785.603.568,00	Rp 1.130.609.940.339,00
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 405.228.980.350,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 2.080.184.935.400,00
Total		Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 6.534.340.146.895,93	Rp 9.427.430.159.702,67

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kemandirian Fiskal	0,5289	0,4831	0,5100	0,5217
IKF Invers	**0,4711**	**0,5169**	**0,4900**	**0,4783**

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	TrGP	Rp 243.345.202.000,00	Rp 365.017.803.300,00	Rp 486.492.112.670,00	Rp 666.548.627,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.031.586.430.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.515.673.613.354,00	Rp 1.515.673.613.354,00	Rp 1.707.438.208.818,00
2	Tr_{SP}	Rp -	Rp 275.132.837.961,00	Rp 7.055.512.461,00	Rp 344.913.670.956,00	Rp 394.532.065.681,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 532.677.888.716,00	Rp 786.810.709.818,00	Rp 547.785.603.568,00	Rp 861.068.863.569,00	Rp 1.079.980.757.438,00	Rp 1.130.609.940.339,00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 126.821.779.500,00	Rp 214.996.311.100,00	Rp 405.228.980.350,00	Rp 613.868.338.750,00	Rp 813.254.620.500,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.199.349.976.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 1.738.277.713.800,00	Rp 2.390.546.392.000,00	Rp 2.080.184.935.400,00
Total		Rp 370.166.981.500,00	Rp 855.146.952.361,00	Rp 898.776.605.481,00	Rp 959.448.558.333,00	Rp 1.996.007.914.851,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 2.763.614.296.286,00	Rp 3.571.792.411.692,00	Rp 3.332.767.305.442,00	Rp 4.115.020.190.723,00	Rp 4.986.200.762.792,00	Rp 4.918.233.084.557,00

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	REV_{OR}	Rp 240.196.687.137,67	Rp 495.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.706.709,94	Rp 2.920.093.533.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.730.677.293.545,70	Rp 4.011.191.364.200	Rp 4.509.197.075.146
2	Tr_{GP}	Rp 243.345.202.000,00	Rp 365.017.803.300,00	Rp 486.492.112.670,00	Rp 666.548.627,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.031.586.430.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.515.673.613.354,00	Rp 1.515.673.613.354	Rp 1.707.438.208.818
3	Tr_{SP}	Rp -	Rp 275.132.837.961,00	Rp 7.055.512.461,00	Rp 344.913.670.956,00	Rp 394.532.065.681,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 532.677.888.716,00	Rp 786.810.709.818,00	Rp 547.785.603.568,00	Rp 861.068.863.569,00	Rp 1.079.980.757.438	Rp 1.130.609.940.339
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 126.821.779.500,00	Rp 214.996.311.100,00	Rp 405.228.980.350,00	Rp 613.868.338.750,00	Rp 813.254.620.500,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.199.349.976.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 1.738.277.713.800,00	Rp 2.390.546.392.000,00	Rp 2.080.184.935.400
Total		Rp 610.363.668.637,67	Rp 1.351.055.896.445,99	Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 2.416.308.081.379,22	Rp 3.736.168.857.076,74	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 5.380.263.002.995,94	Rp 6.491.885.945.175,03	Rp 6.534.340.146.895,93	Rp 7.845.697.484.268,70	Rp 8.997.392.126.992,25	Rp 9.427.430.159.702,67

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,606	0,633	0,529	0,397	Rp 0,534	0,483	0,514	0,550	0,510	0,524	0,554	0,522
	IKF Invers	**0,394**	**0,367**	**0,471**	**0,603**	**0,466**	**0,517**	**0,486**	**0,450**	**0,490**	**0,476**	**0,446**	**0,478**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.2	:	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
IKSS.2	:	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

$$\left(\frac{[\,Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH\,]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}\right)$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal
TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan
REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	TrGp	Rp 489.925.420.000,00	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.806.673.215.634,00
2	Tr_{SP}	Rp 270.122.897.177,00	Rp 241.782.644.906,00	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.189.620.027.205,00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 373.725.738.760,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 2.244.228.176.382,00	Rp 3.732.897.085.226,00	Rp 5.642.095.592.679,00

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	REV_{OR}	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 5.312.866.005.773,45
2	Tr_{GP}	Rp 489.925.420.000,00	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.806.673.215.634,00
3	Tr_{SP}	Rp 270.122.897.177,00	Rp 241.782.644.906,00	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.189.620.027.205,00
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 373.725.738.760,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 7.504.351.303.896,40	Rp 10.954.961.598.452,40

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kemandirian Fiskal	0,5026	0,4787	0,4974	0,5150
IKF Invers	**0,4974**	**0,5213**	**0,5026**	**0,4850**

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	TrGP	Rp 122.481.355.000,00	Rp 367.444.065.000,00	Rp 489.925.420.000,00	Rp 687.105.311.100,00	Rp 809.586.666.100,00	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.067.379.920.400,00	Rp 1.194.513.368.400,00	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.557.665.355.630,00	Rp 1.806.673.215.634,00	Rp 1.806.673.215.634,00
2	Tr_{SP}	Rp 266.191.210.000,00	Rp 267.167.210.000,00	Rp 270.122.897.177,00	Rp 275.149.778.095,00	Rp 396.421.684.656,00	Rp 241.782.644.906,00	Rp 528.767.285.205,00	Rp 835.551.775.085,00	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.047.220.389.844,00	Rp 1.189.620.027.205,00	Rp 1.189.620.027.205,00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 193.849.918.800,00	Rp 237.952.406.400,00	Rp 373.725.738.760,00	Rp 616.032.547.260,00	Rp 691.497.025.010,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.070.377.510.378,00	Rp 1.647.578.166.258,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 1.510.958.441.255,00	Rp 2.645.802.349.840,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 582.522.483.800,00	Rp 872.563.681.400,00	Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 1.578.287.636.455,00	Rp 1.897.505.375.766,00	Rp 2.244.228.176.382,00	Rp 2.666.524.715.983,00	Rp 3.677.643.309.743,00	Rp 3.732.897.085.226,00	Rp 4.115.844.186.729,00	Rp 5.642.095.592.679,00	Rp 5.642.095.592.679,00

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	REV_{OR}	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.289	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552	Rp 5.312.866.005.773	Rp 5.312.866.005.773,45
2	Tr_{GP}	Rp 122.481.355.000,00	Rp 367.444.065.000,00	Rp 489.925.420.000,00	Rp 687.105.311.100,00	Rp 809.586.666.100	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.067.379.920.400	Rp 1.194.513.368.400	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.557.665.355.630	Rp 1.806.673.215.634	Rp 1.806.673.215.634,00
3	Tr_{SP}	Rp 266.191.210.000,00	Rp 267.167.210.000,00	Rp 270.122.897.177,00	Rp 275.149.778.095,00	Rp 396.421.684.656	Rp 241.782.644.906,00	Rp 528.767.285.205	Rp 835.551.775.085	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.047.220.389.844	Rp 1.189.620.027.205	Rp 1.189.620.027.205,00
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 193.849.918.800,00	Rp 237.952.406.400,00	Rp 373.725.738.760,00	Rp 616.032.547.260,00	Rp 691.497.025.010,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.070.377.510.378,00	Rp 1.647.578.166.258,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 1.510.958.441.255,00	Rp 2.645.802.349.840,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.404.660.494,04	Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.187,98	Rp 7.058.362.560.031,98	Rp 7.504.351.303.896,40	Rp 8.282.851.383.281,23	Rp 10.954.961.598.452,40	Rp 10.954.961.598.452,40

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,622	0,553	0,503	0,480	Rp 0,480	0,479	0,472	0,521	0,497	0,497	0,515	0,515
	IKF Invers	**0,378**	**0,447**	**0,497**	**0,520**	**0,520**	**0,521**	**0,528**	**0,479**	**0,503**	**0,503**	**0,485**	**0,485**

Secara rerata, kondisi indeks kemandirian fiskal daerah Sumatera Selatan selama periode 2010 – 2025, perkembangan indeks kemandirian fiskal daerah hanya mencapai 48,00 %, Provinsi Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat sebesar 52,00 %. Indeks kemandirian fiskal daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 62,00 % dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 37,00 %, hal ini dikarenakan dampak kontraksi dari Covid-19.

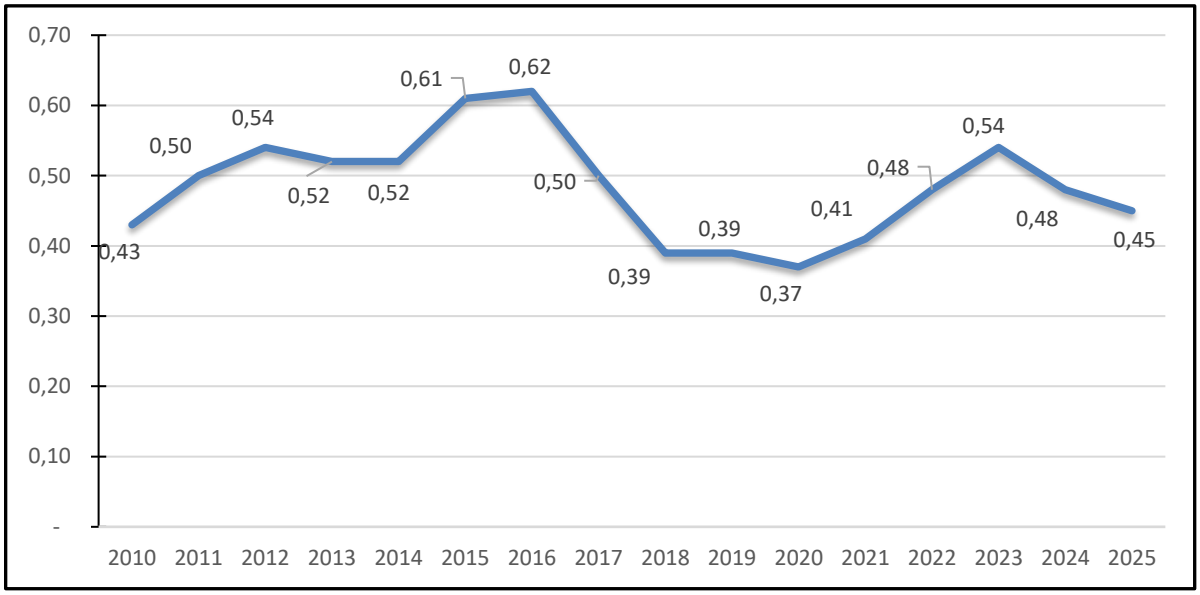

Gambar 3.6
Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Trend tertinggi kemandirian fiskal Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2016 dengan nilai IKF sebesar 0,62 dan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai IKF sebesar 0,37.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2025 dan Target RPJMD

No.	Uraian	Kemandirian Fiskal		Capaian Kinerja
		Realisasi 2025	Target RPJMD 2030	
1.	IKF	0,478	0,520	91,923 %
2.	Pendapatan	9.427.430.159.702,67	13.549.281.593.204,80	0,520
3.	TKD	4.918.233.084.557,00	6.468.639.847.802,56	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah mencapai 91,923 %.

Capaian kinerja realisasi indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2025 sudah sesuai (*on the track*) untuk mencapai target optimis akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 serta akhir periode Renstra tahun 2025 – 2029 yang saat ini sudah mencapai sebesar 91,923 %.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,478	0,520	91,923

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Tingkat kemajuan indeks kemandirian fiskal daerah pada tahun 2025 telah mencapai 91,923 % hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang ada.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka akan memberikan gambaran sebagai berikut:

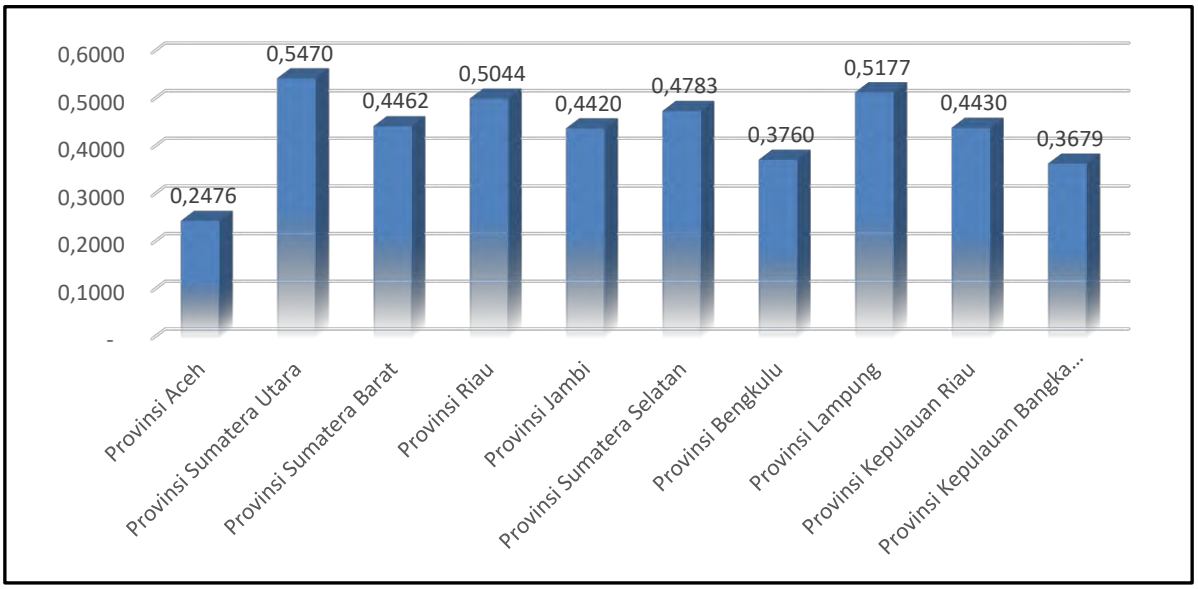

Gambar 3.7
Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Provinsi dengan nilai IKF tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,5470 dengan kategori mandiri sementara nilai IKF terendah pada Provinsi Aceh dengan nilai IKF 0,2476 dengan kategori belum mandiri. Posisi Provinsi Sumatera Selatan pada urutan ke 4 (keempat) dengan nilai IKF 0,478 dengan kategori daerah menuju kemandirian fiskal.

3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.24
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	110,14	Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi kemampuan daerah	
						Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	
						Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk memberikan stimulus peningkatan investasi daerah	
						Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah, antara lain:

1. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak daerah, bersama dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan razia;
2. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;
4. Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
5. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
6. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
7. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
10. Terus melaksanakan program ekstensifikasi pajak daerah atau memperluas pendaftaran objek pajak daerah melalui peran investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.25
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	110,14	980.400.000	814.937.400	83,12	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran <u>Faktor Pendukung</u>: 1. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan 3. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 4. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data 5. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 6. Pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk kendali kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah 7. Meningkatkan intensifikasi, memperluas ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah 8. Memperluas akses keuangan pembayaran pajak daerah melalui plaform digitalisasi untuk inklusi keuangan yang lebih baik

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.26
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	110,14	980.400.000	814.937.400	83,12	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0,478 indeks, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 814.937.400,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja indeks Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0,478 indeks.

3.1.3.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.27
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator indeks kemandirian fiskal daerah sebesar 0,478 Indeks, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.348.725.040,00 telah mengefisiensi sebesar 66,91 % untuk menghasilkan kinerja indeks kemandirian fiskal daerah sebesar 0,478 indeks.

3.1.3.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.28
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 2

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	110,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang

				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

SS.3	**Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD**

".....Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ....."

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah (*government expenditure*) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroekonomi merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap permintaan agregat dengan mengendalikan penerimaan pajak daerah dan intervensi belanja daerah (*government expenditure*). Ketika konsumsi belanja daerah dinaikan dan/atau tarif pajak daerah diturunkan, maka akan terjadi *multiplier effect* dari pemerintah ke sektor swasta dalam bentuk investasi yang berdampak pada permintaan akan barang dan jasa serta modal akan mengalami kenaikan, jika hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan penawaran akan menyebabkan terjadinya inflasi

Formula Perhitungan IKSS.3

$$y = \left(\frac{[Pendapatan\ tahun\ n - Pendapatan\ tahun\ (n-1)}{Pendapatan\ tahun\ (n-1)}\right) x\ 100\ \%$$

Dimana:

y = Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD

Pendapatan n = Realisasi Pendapatan tahun berjalan

Pendapatan (n-1) = Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya

3.1.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja tahun 2025:

Tabel 3.29
Perhitungan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025

No.	Bulan	Realisasi Pendapatan [Rp.]		Pertumbuhan (%)	Target Tahunan 2025
		2024	2025		
1.	Januari	937.131.162.833,45	610.363.668.637,67	(34,689)	1,26
2.	Februari	1.577.409.132.494,04	1.351.055.896.145,99	(14,350)	
3.	Maret	2.255.925.057.076,74	1.699.323.823.000,50	(24,673)	
4.	April	3.291.459.189.500,31	3.082.180.160.422,22	(6,3582)	
5.	Mei	3.955.287.842.849,47	3.736.168.857.076,74	(5,540)	
6.	Juni	4.687.788.699.397,97	4.338.860.285.073,79	(7,743)	
7.	Juli	5.651.408.054.185,98	5.383.297.239.495,94	(4,744)	
8.	Agustus	7.058.362.580.031,98	6.498.375.238.175,03	(7,934)	
9.	September	7.510.343.386.396,40	6.543.538.055.895,93	(12,873)	
10.	Oktober	9.034.450.070.781,23	8.252.134.352.268,70	(8,659)	
11.	November	10.962.497.244.934,50	9.007.267.789.992,25	(17,836)	
12.	Desember	10.962.497.244.934,05	9.007.267.789.992,25	(10,258)	
	TAHUNAN	10.962.497.244.934,05	9.837.929.951.702,67	(10,258)	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel(2025)

Capaian kinerja IKSS.3 tahun 2025 secara year-on-year mengalami pertumbuhan negatif sebesar (10,258 %), maupun secara month-to-month.

Terhadap target tahun 2025 sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029, capaian sebagai berikut:

Capaian $= \frac{(10{,}258)}{1{,}26}\ x\ 100\% = (8{,}14\%)$

Pertumbuhan pendapatan tahun 2025 mengalami pertumbuhan atau kontraksi negatif sebesar (10,258 %), hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang mulai diberlakukan sejak tanggal 05 Januari 2025. Namun melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah karena perlambatan struktur ekonomi daerah, kebijakan ini di samakan dengan equivalen yang berarti tidak ada pembebanan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak daerah.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.3	:	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
IKSS.3	:	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

$$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n-1)]}{Pendapatan\ (n-1)}\right) x\ 100\ \%$$

Dimana :
Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)

No.	Uraian	Tahun		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD (%)
		2025	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW I	Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 2.255.925.057.076,74	-24,673
2	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW II	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 4.687.788.699.397,97	-7,443
3	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW III	Rp 6.543.538.055.895,93	Rp 7.510.343.386.396,40	-12,873
4	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW IV	Rp 9.837.929.951.702,67	Rp 10.962.497.244.934,50	-10,258

No.	TAHUN	PENDAPATAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	2024	Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.409.132.494,04	Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.185,98	Rp 7.058.362.580.031,98	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 9.034.450.070.781,23	Rp 10.962.497.244.934,50	Rp 10.962.497.244.934,50
2	2025	Rp 610.363.668.637,67	Rp 1.351.055.896.145,99	Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 3.082.180.160.422,22	Rp 3.736.168.857.076,74	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 5.383.297.239.495,94	Rp 6.498.375.238.175,03	Rp 6.543.538.055.895,93	Rp 8.252.134.352.268,70	Rp 9.007.267.789.992,25	Rp 9.837.929.951.702,67
% Pertumbuhan Pendapatan Daerah		-34,869	-14,350	-24,673	-6,3582	-5,540	-7,443	-4,744	-7,934	-12,873	-8,659	-17,836	-10,258

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.3	:	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
IKSS.3	:	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

$$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n-1)]}{Pendapatan\ (n-1)}\right) x\ 100\ \%$$

Dimana :
Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)

No.	Uraian	Tahun		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD (%)
		2024	2023	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW I	Rp 2.255.925.057.076,00	Rp 2.002.284.852.029,98	12,668
2	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW II	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 4.271.959.130.659,26	9,734
3	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW III	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 6.502.497.240.699,34	15,499
4	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW IV	Rp 10.965.540.990.987,20	Rp 9.603.554.186.271,61	14,182

No.	TAHUN	PENDAPATAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	2023	Rp 642.422.706.406,28	Rp 1.187.588.378.704,90	Rp 2.002.284.852.029,98	Rp 2.756.544.748.321,62	Rp 3.270.429.803.288,63	Rp 4.271.959.130.659,26	Rp 4.989.773.356.256,68	Rp 5.583.638.844.500,25	Rp 6.502.497.240.699,34	Rp 7.927.349.839.005,46	Rp 8.672.800.719.256,51	Rp 9.603.554.186.271,61
2	2024	Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.409.132.494,04	Rp 2.255.925.057.076,00	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.165,98	Rp 7.058.362.560.031,98	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 9.034.450.070.781,23	Rp 9.734.258.083.136,37	Rp 10.965.540.990.987,20
% Pertumbuhan Pendapatan Daerah		45,875	32,825	12,668	19,4053	20,941	9,734	13,260	26,412	15,499	13,966	12,239	14,182

3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan dalam APBD (IKSS.3) apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya tergambar pada kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 dengan Tahun Sebelumnya

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	PERTUMBUHAN PENDAPATAN
1.	2010	3,222,589,000,000.00	
2.	2011	3,963,984,966,161.18	23,01
3.	2012	5,223,940,074,318.61	31,79
4.	2013	5,473,787,298,623.10	4,78
5.	2014	6,252,136,312,720.01	14,22
6.	2015	5,990,424,062,511.95	(4,19)
7.	2016	6,582,780,929,675.43	9,89
8.	2017	8,195,968,131,799.16	24,51
9.	2018	9,141,371,395,099.70	11,53
10.	2019	9,280,742,072,448.24	1,52
11.	2020	9,278,520,060,061.37	(0,02)
12.	2021	9,611,977,226,695.47	3,59
13.	2022	10,235,849,833,278.70	6,49
14.	2023	9,598,903,780,312.40	(6,22)
15.	2024	10.962.497.244.934,05	14,24
16.	2025	9.837.929.951.702,67	(10,258)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan negatif terendah sebesar (10,258 %) selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir.

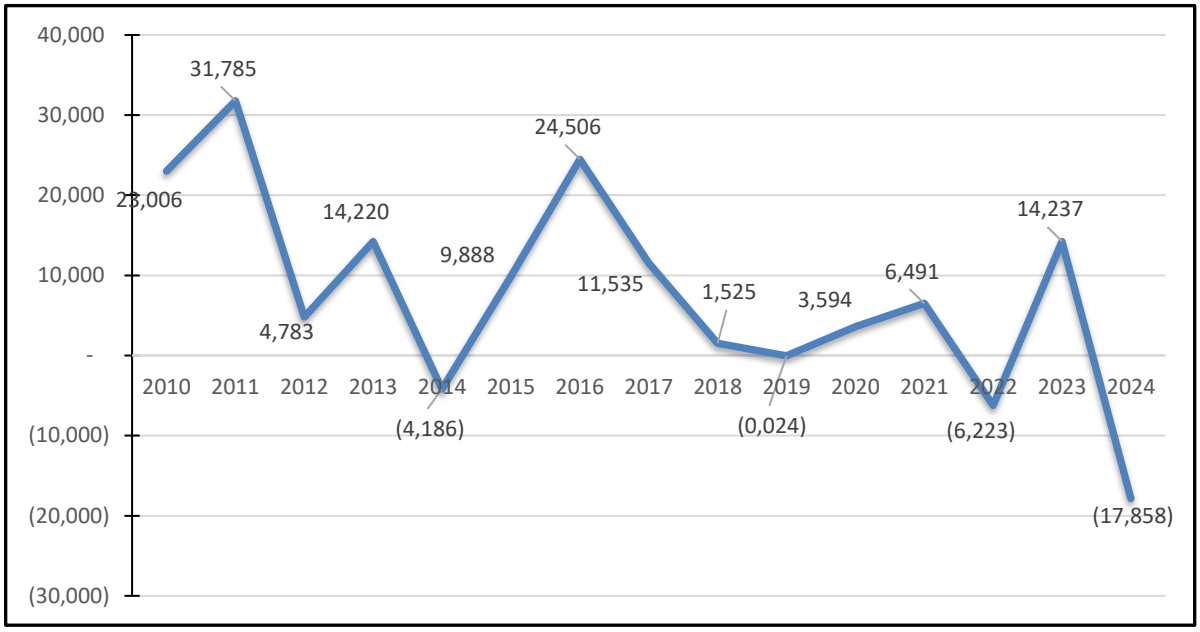

Gambar 3.8
Grafik Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Sumsel dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan (IKSS.3) tahun 2025 terhadap rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Target RPJMD 2030	
1.	2024	10.962.497.244.934,05		(10,258)
2.	2025	9.837.929.951.702,67		
dst				
3.	2029		12.731.101.473.657,10	6,43
4.	2030		13.549.281.593.204,80	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2025)

Capaian realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2025, apabila dibandingkan dengan rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

Pertumbuhan $= \frac{[13.549.281.593.204,80 - 9.007.267.789.992,25]}{9.007.267.789.992,25} x100\% = 50,43\%$

Tabel 3.32
Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	(10,258)	1,48	(5,5)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Kondisi realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kontraksi negatif, sehingga tingkat kemajuan dari periode akhir RPJMD tahun 2025 – 2029 dan periode akhir Renstra tahun 2025 – 2029 masih mengalami tingkat kemajuan yang negatif sebesar (5,5 %), hal ini disebakan karena adanya perubahan regulasi dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

3.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pada 10 (sepuluh) daerah provinsi di Pulau Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa perbandingan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		2024	2025	
1.	Aceh	11.396.040.000.000,00	9.903.940.000.000,00	(13,0931)
2.	Sumatera Utara	13.236.899.906.825,00	8.614.057.090.921,30	(34,9239)
3.	Sumatera Barat	6.482.418.683.405,20	5.637.501.625.930,30	(13,0340)
4.	Riau	9.499.559.746.229,20	6.554.436.778.806,50	(31,0027)
5.	Jambi	4.725.732.848.352,30	3.704.748.654.518,60	(21,6048)
6.	Sumatera Selatan	10.962.497.244.934,50	9.837.929.951.702,67	(10,258)
7.	Bengkulu	3.191.854.148.850,30	2.395.349.147.541,50	(24,9543)
8.	Lampung	7.451.703.679.830,80	4.798.142.574.580,60	(35,6101)

9.	Kepulauan Riau	3.958.295.361.262,70	3.393.963.641.827,40	(14,2569)
10.	Kepulauan Bangka Belitung	2.421.902.411.336,70	1.879.328.194.638,70	(22,4028)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu (2025)

Melihat trend pertumbuhan pendapatan daerah secara year-on-year wilayah provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi pertumbuhan pendapatan negatif, dimana deviasi pertumbuhan negatif terendah berada pada Provinsi Lampung sebesar (35,6101 %) sementara pertumbuhan negatif tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Sumatera Selatan (10,258 %).

3.1.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.34
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023
						Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota	Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota	Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD
						Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan	Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah secara massif
						Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi	Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan
						Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah	Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa pemberian Dana Insentif Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
2. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
3. Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan;
5. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
7. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untukmeningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

Tabel 3.35
Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	535.000.000	456.199.100	85,27	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat</u>: 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota 3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	535.000.000	456.199.100	85,27	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.37
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Program kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	(8,14)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4	**Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

"……Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi……"

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntable. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula

tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

IKSS.4 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Formula Perhitungan IKSS.4:

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{k=18}^{i=1}(Pajak\ Daerah\ Provinsi + Pajak\ Daerah\ Kabupaten/Kota}{Total\ PDRB} x\ 100\ \%$$

Dimana:

Pajak Daerah = Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Non Migas

3.1.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKSS.4 tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.39

Pengukuran Data Kinerja dengan Perbandingan Antara target dan Realisasi IKSS.4 Tahun 2025

No.	Bulan	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB		
1.	Januari	415.317.380.972,18	56.936.149.266.666,70	0,729	1,25
2.	Februari	880.980.781.519,52	85.404.223.900.000,00	1,032	
3.	Maret	1.328.994.487.798,91	170.808.447.800.000,00	0,778	
4.	April	2.013.898.111.908,24	230.958.397.140.000,00	0,872	
5.	Mei	2.502.560.326.082,50	261.033.371.810.000,00	0,959	
6.	Juni	3.626.094.936.395,24	351.258.295.820.000,00	1,032	
7.	Juli	3.783.656.476.320,71	413.023.695.820.000,00	0,916	
8.	Agustus	4.338.198.733.887,11	443.906.395.820.000,00	0,977	
9.	September	4.980.079.723.928,71	536.554.495.820.000,00	0,928	
10.	Oktober	5.630.383.449.666,31	598.319.895.820.000,00	0,941	
11.	November	5.919.827.784.624,31	629.202.595.820.000,00	0,941	
12.	Desember	6.559.367.964.557,74	721.850.695.820.000,00	0,909	
	TAHUNAN	6.559.367.964.557,74	721.850.695.820.000,00	0,909	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Realisasi capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun 2025 sebesar 0,821 %

Capaian terhadap target tahun 2025 $= \frac{0,909}{1,25} x\ 100\ \% = 72,72\ \%$

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun 2025, sebesar 0,909 atau mencapai 72,72 %. Secara total pajak daerah provinsi mengalami penurunan sementara pajak daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada porsi yang lebih besar bagi hasil ke kabupaten/kota melalui Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sebesar 66 % dari pokok pajak PKB dan BBN-KB.

3.1.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB selama 16 (enam belas) tahun:

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Total Pajak Daerah Kabupaten/Kota	PDRB	Persentase (%)
1.	2010	1,360,104,831,900	176,143,095,835	194,012,970,000,000	0.7918
2.	2011	1,385,851,745,000	263,686,757,363	226,666,930,000,000	0.7277
3.	2012	1,724,326,700,000	431,731,335,861	253,265,120,000,000	0.8513
4.	2013	1,882,596,915,640	603,315,408,336	280,348,460,000,000	0.8867
5.	2014	2,267,779,726,034	930,256,331,718	306,421,600,000,000	1.0437
6.	2015	2,324,865,133,162	937,831,527,528	331,765,700,000,000	0.9834
7.	2016	2,378,960,064,733	983,822,031,664	353,866,960,000,000	0.9503
8.	2017	2,835,440,186,800	1,163,228,418,864	382,885,700,000,000	1.0444
9.	2018	3,197,900,645,678	1,281,661,833,682	419,392,160,000,000	1.0681
10.	2019	3,145,558,634,339	1,576,847,392,186	453,402,710,000,000	1.0415
11.	2020	3,081,800,984,700	1,531,554,325,933	454,607,400,000,000	1.0148
12.	2021	3,523,785,342,246	1,575,793,148,298	493,636,850,000,000	1.0331
13.	2022	3,680,900,000,000	2,192,431,962,105	591,603,480,000,000	0.9928
14.	2023	4,149,362,000,000	2,378,564,769,290	629,099,660,000,000	1.0377
15.	2024	4,301,394,172,077	2,477,881,311,653	663,961,700,000,000	1.0210
16.	2025	3.927.846.336.223	2.631.521.628.353	721.850.695.820.000	0.909

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,0681 % dan terendah terjadi pada tahun 0,7277 %.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.4	:	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
IKSS.4	:	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No.	Periode	Pajak Daerah	Total PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.303.214.379.780,00	Rp 157.419.880.000.000,00	0,828
2	Triwulan II	Rp 5.114.186.610.664,10	Rp 323.381.940.000.000,00	1,581
3	Triwulan III	Rp 4.826.588.202.304,24	Rp 495.039.530.000.000,00	0,975
4	Triwulan IV	Rp 7.005.576.280.698,56	Rp 663.961.720.000.000,00	1,055

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Pajak\ Daerah\ Provinsi + Pajak\ Daerah\ Kabupaten/Kota}{Total\ PDRB} \times 100\ \%$$

Dimana :

Pajak Daerah : Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintahan Daerah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Realisasi Bulan Januari	Realisasi s.d Februari	Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d April	Realisasi s.d Mei	Realisasi s.d Juni	Realisasi s.d Juli	Realisasi s.d Agustus	Realisasi s.d September	Realisasi s.d Oktober	Realisasi s.d November	Realisasi s.d Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Provinsi Sumatera Selatan	Rp 338.301.273.608,00	Rp 640.380.662.479,00	Rp 939.309.157.989,00	Rp 1.477.928.189.115,60	Rp 1.794.405.164.629,50	Rp 2.108.501.901.671,50	Rp 2.580.339.157.261,10	Rp 2.940.866.503.514,50	Rp 3.294.153.288.460,30	Rp 3.661.891.432.535,50	Rp 4.147.187.326.033,10	Rp 4.744.701.180.377,20
Kab. Lahat	Rp 4.055.844.995,00	Rp 7.171.704.914,00	Rp 10.842.343.741,00	Rp 21.801.952.476,00	Rp 26.147.242.031,00	Rp 2.108.501.901.671,60	Rp 37.129.042.195,00	Rp 42.219.209.792,00	Rp 55.703.882.930,00	Rp 61.421.431.299,00	Rp 71.442.613.225,00	Rp 84.547.106.156,00
Kab. Musi Banyuasin	Rp 18.277.497.569,53	Rp 10.830.492.055,00	Rp 16.474.964.409,00	Rp 22.284.942.433,00	Rp 30.645.522.723,00	Rp 52.348.402.049,00	Rp 64.830.135.494,00	Rp 72.994.881.470,00	Rp 83.016.226.084,00	Rp 90.160.582.397,00	Rp 102.550.631.590,00	Rp 113.650.131.384,00
Kab. Musi Rawas	Rp 1.757.370.116,00	Rp 3.113.290.636,00	Rp 9.143.519.920,00	Rp 10.608.947.406,00	Rp 12.278.732.135,00	Rp 21.831.753.167,00	Rp 24.186.480.126,00	Rp 26.879.251.326,00	Rp 30.151.539.668,00	Rp 33.942.482.799,00	Rp 36.428.994.213,00	Rp 42.113.876.511,00
Kab. Muara Enim	Rp 7.546.286.811,00	Rp 14.893.309.050,00	Rp 22.831.540.727,00	Rp 30.417.963.243,00	Rp 38.551.902.721,00	Rp 48.553.649.916,00	Rp 61.723.185.889,00	Rp 72.697.773.174,00	Rp 87.468.619.508,00	Rp 101.833.758.672,00	Rp 112.645.043.891,00	Rp 127.905.669.439,00
Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 3.836.771.992,00	Rp 7.205.740.659,00	Rp 10.499.979.800,00	Rp 16.368.648.946,00	Rp 26.028.235.209,00	Rp 29.641.274.807,00	Rp 33.500.240.177,00	Rp 38.746.189.359,00	Rp 64.483.952.995,00	Rp 69.342.136.557,00	Rp 73.689.225.045,00	Rp 127.905.669.439,00
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp 5.410.036.485,00	Rp 10.432.748.428,00	Rp 14.480.225.309,00	Rp 19.171.389.677,00	Rp 23.580.107.340,00	Rp 15.076.981.287,00	Rp 32.289.724.056,00	Rp 38.130.976.404,00	Rp 44.192.574.072,00	Rp 49.484.611.140,90	Rp 54.899.348.481,92	Rp 62.247.346.094,92
Kota Palembang	Rp 72.854.520.201,00	Rp 72.854.520.201,00	Rp 178.370.543.309,00	Rp 286.531.259.322,00	Rp 385.550.200.015,00	Rp 538.730.804.168,00	Rp 567.646.956.719,00	Rp 660.122.398.786,00	Rp 823.840.558.931,00	Rp 917.930.420.644,00	Rp 1.004.857.047.377,00	Rp 1.171.585.354.710,00
Kota Prabumulih	Rp 2.858.560.176,00	Rp 5.815.062.097,00	Rp 8.955.323.761,00	Rp 11.848.689.120,00	Rp 15.602.091.487,00	Rp 18.891.563.199,00	Rp 22.519.298.735,00	Rp 26.925.764.154,00	Rp 30.566.429.293,00	Rp 34.198.166.609,00	Rp 37.376.695.269,00	Rp 40.684.910.404,00
Kota Pagar Alam	Rp 581.355.712,00	Rp 1.155.196.804,00	Rp 1.896.469.737,00	Rp 2.654.539.136,00	Rp 3.504.260.470,00	Rp 4.399.834.299,00	Rp 4.399.834.299,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 11.761.132.232,50
Kota Lubuk Linggau	Rp 4.432.111.600,00	Rp 7.989.242.029,00	Rp 12.135.007.365,00	Rp 15.672.411.901,00	Rp 19.750.762.340,00	Rp 23.337.750.876,00	Rp 30.441.850.291,00	Rp 35.748.462.182,00	Rp 41.581.770.322,00	Rp 49.568.783.917,00	Rp 54.582.812.046,00	Rp 61.457.389.070,00
Kab. Banyuasin	Rp 13.169.075.330,00	Rp 37.585.747.668,00	Rp 49.230.296.515,00	Rp 59.874.195.020,00	Rp 72.795.539.981,00	Rp 91.552.446.328,00	Rp 107.374.878.703,00	Rp 124.378.456.738,00	Rp 152.995.251.256,00	Rp 166.245.863.604,00	Rp 179.956.316.108,00	Rp 191.824.324.978,00
Kab. Ogan Ilir	Rp 13.169.075.330,00	Rp 6.752.282.481,00	Rp 10.588.959.656,00	Rp 14.561.211.337,00	Rp 19.084.688.054,00	Rp 22.848.439.829,00	Rp 26.717.952.975,00	Rp 25.452.924.471,00	Rp 34.128.996.396,00	Rp 38.985.424.310,00	Rp 71.081.807.672,00	Rp 76.028.741.547,00
Kab. OKU Timur	Rp 2.622.500.185,00	Rp 5.457.476.968,00	Rp 8.421.752.750,00	Rp 11.701.224.867,00	Rp 15.595.161.350,00	Rp 5.806.855.327,00	Rp 24.567.314.181,00	Rp 29.558.224.855,00	Rp 35.287.284.064,00	Rp 39.297.258.223,00	Rp 43.545.546.828,00	Rp 48.578.361.113,00
Kab. OKU Selatan	Rp 814.822.024,00	Rp 1.934.481.664,00	Rp 2.948.896.118,00	Rp 4.369.701.301,00	Rp 5.524.141.728,00	Rp 6.821.714.188,00	Rp 8.204.072.261,00	Rp 9.532.585.090,00	Rp 14.688.134.415,00	Rp 16.327.639.275,00	Rp 17.449.506.661,00	Rp 19.814.770.287,00
Kab. Empat Lawang	Rp 573.130.140,00	Rp 1.168.815.535,00	Rp 1.862.074.538,00	Rp 2.538.343.321,00	Rp 3.424.904.662,00	Rp 4.299.716.657,00	Rp 5.192.963.222,00	Rp 6.093.767.965,00	Rp 6.935.778.170,00	Rp 7.704.647.978,00	Rp 8.567.728.304,00	Rp 9.484.599.619,00
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 573.130.140,00	Rp 2.144.010.213,00	Rp 2.915.380.913,00	Rp 3.858.040.963,00	Rp 5.065.949.770,00	Rp 6.690.548.977,00	Rp 7.955.319.073,00	Rp 9.372.845.353,00	Rp 9.373.670.488,00	Rp 9.373.670.488,00	Rp 9.373.670.488,00	Rp 19.163.195.623,00
Kab. Musi Rawas Utara	Rp 638.300.106,00	Rp 1.456.366.470,00	Rp 2.307.943.223,00	Rp 3.679.955.043,00	Rp 5.025.719.437,00	Rp 6.351.072.247,00	Rp 7.700.322.998,94	Rp 9.387.832.871,94	Rp 13.132.827.779,94	Rp 14.595.608.046,94	Rp 15.834.430.772,94	Rp 52.122.521.713,94
TOTAL PAJAK DAERAH	**Rp 491.471.662.520,53**	**Rp 838.341.150.351,00**	**Rp 1.303.214.379.780,00**	**Rp 2.015.871.604.627,60**	**Rp 2.502.560.326.082,50**	**Rp 5.114.186.610.664,10**	**Rp 3.646.718.728.656,04**	**Rp 4.173.995.464.977,44**	**Rp 4.826.588.202.304,24**	**Rp 5.367.191.335.967,34**	**Rp 6.046.356.161.476,96**	**Rp 7.005.576.280.698,56**
PDRB Bruto	**Rp 52.473.293.333.333,30**	**Rp 78.709.940.000.000,00**	**Rp 157.419.880.000.000,00**	**Rp 212.740.566.666.667,00**	**Rp 240.400.910.000.000,00**	**Rp 323.381.940.000.000,00**	**Rp 380.601.136.666.667,00**	**Rp 409.210.735.000.000,00**	**Rp 495.039.530.000.000,00**	**Rp 551.346.926.666.667,00**	**Rp 579.500.625.000.000,00**	**Rp 663.961.720.000.000,00**
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	**0,937**	**1,065**	**0,828**	**0,948**	**1,041**	**1,581**	**0,958**	**1,020**	**0,975**	**0,973**	**1,043**	**1,055**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.4	:	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
IKSS.4	:	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No.	Periode	Pajak Daerah	Total PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.328.994.487.798,91	Rp 170.808.447.800.000,00	0,778
2	Triwulan II	Rp 3.626.094.936.395,24	Rp 351.258.295.820.000,00	1,032
3	Triwulan III	Rp 4.980.079.723.928,71	Rp 536.561.950.000.000,00	0,928
4	Triwulan IV	Rp 6.559.367.964.577,74	Rp 536.561.950.000.000,00	0,909

$$IKSS.4 = \frac{\text{Pajak Daerah Provinsi+Pajak Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Total PDRB}} \times 100\ \%$$

Dimana:

Pajak Daerah : Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintahan Daerah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Realisasi Bulan Januari	Realisasi s.d Februari	Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d April	Realisasi s.d Mei	Realisasi s.d Juni	Realisasi s.d Juli	Realisasi s.d Agustus	Realisasi s.d September	Realisasi s.d Oktober	Realisasi s.d November	Realisasi s.d Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Provinsi Sumatera Selatan	Rp 221.932.930.205,38	Rp 457.750.920.553,67	Rp 708.527.218.847,12	Rp 1.215.326.736.529,10	Rp 1.794.405.164.629,50	Rp 1.751.922.085.177,00	Rp 2.178.314.944.748,80	Rp 2.445.014.404.738,70	Rp 2.727.105.112.589,80	Rp 3.172.365.255.262,40	Rp 3.294.568.134.076,40	Rp 3.927.846.336.223,83
Kab. Lahat	Rp 6.112.518.810,00	Rp 13.170.142.736,00	Rp 20.208.116.795,00	Rp 34.995.321.163,00	Rp 26.147.242.031,00	Rp 53.482.422.940,00	Rp 62.639.868.228,00	Rp 69.964.578.754,00	Rp 79.246.832.251,00	Rp 84.010.609.665,00	Rp 89.964.878.355,00	Rp 89.964.878.355,00
Kab. Musi Banyuasin	Rp 10.312.666.991,00	Rp 33.094.748.950,00	Rp 47.174.419.409,00	Rp 58.478.728.005,35	Rp 30.645.522.723,00	Rp 90.661.650.331,35	Rp 107.794.686.913,35	Rp 124.357.203.334,35	Rp 152.158.419.663,35	Rp 152.158.419.663,35	Rp 167.199.758.635,35	Rp 167.199.758.635,35
Kab. Musi Rawas	Rp 4.003.994.925,00	Rp 7.286.554.906,00	Rp 10.569.440.324,00	Rp 14.395.846.059,00	Rp 12.278.732.135,00	Rp 37.673.366.355,00	Rp 41.617.029.877,00	Rp 45.477.972.336,00	Rp 51.210.630.012,00	Rp 56.125.308.569,00	Rp 62.554.387.131,00	Rp 68.680.809.526,00
Kab. Muara Enim	Rp 23.385.515.723,00	Rp 57.279.078.011,00	Rp 71.187.149.635,00	Rp 82.941.125.824,00	Rp 38.551.902.721,00	Rp 77.428.404.525,54	Rp 127.011.502.539,08	Rp 142.221.512.738,58	Rp 161.145.999.093,08	Rp 177.116.698.295,08	Rp 182.695.813.682,08	Rp 182.695.813.682,08
Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 6.627.794.481,00	Rp 13.315.914.259,00	Rp 20.401.564.709,00	Rp 26.746.027.519,00	Rp 26.028.235.209,00	Rp 42.753.276.477,00	Rp 51.777.944.745,00	Rp 75.690.052.360,00	Rp 108.989.368.211,00	Rp 118.666.429.972,00	Rp 118.666.429.972,00	Rp 118.666.429.972,00
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp 6.446.632.639,00	Rp 13.266.925.930,00	Rp 20.259.704.214,00	Rp 26.070.197.583,00	Rp 23.580.107.340,00	Rp 20.326.023.010,60	Rp 45.948.322.188,00	Rp 46.834.252.600,00	Rp 46.834.252.600,00	Rp 46.834.252.600,00	Rp 46.834.252.600,00	Rp 46.834.252.600,00
Kota Palembang	Rp 92.726.032.033,00	Rp 191.145.895.531,00	Rp 288.159.270.193,00	Rp 373.903.700.731,00	Rp 385.550.200.015,00	Rp 634.818.682.034,00	Rp 780.080.571.592,00	Rp 931.109.823.392,00	Rp 1.131.509.162.722,00	Rp 1.247.713.120.947,00	Rp 1.344.165.663.919,00	Rp 1.344.165.663.919,00
Kota Prabumulih	Rp 4.897.600.371,00	Rp 11.022.324.412,00	Rp 15.609.620.103,00	Rp 20.133.709.149,00	Rp 15.602.091.487,00	Rp 31.504.217.611,00	Rp 39.439.213.548,00	Rp 45.879.176.754,00	Rp 52.718.413.490,00	Rp 58.463.386.407,00	Rp 64.411.983.071,00	Rp 64.411.983.071,00
Kota Pagar Alam	Rp 1.381.543.514,00	Rp 2.560.309.686,00	Rp 3.825.571.517,00	Rp 5.029.241.369,00	Rp 3.504.260.470,00	Rp 634.818.682.034,00	Rp 7.810.634.476,00	Rp 9.643.767.518,00	Rp 11.891.819.497,00	Rp 13.975.870.036,00	Rp 15.838.553.506,00	Rp 15.838.553.506,00
Kota Lubuk Linggau	Rp 5.170.599.627,00	Rp 11.114.115.096,00	Rp 16.354.987.414,00	Rp 20.975.131.731,00	Rp 19.750.762.340,00	Rp 33.794.909.659,00	Rp 41.912.201.967,00	Rp 49.641.870.489,00	Rp 57.497.608.350,00	Rp 64.563.287.087,00	Rp 71.518.101.656,00	Rp 71.653.657.067,00
Kab. Banyuasin	Rp 14.500.685.260,00	Rp 31.672.570.187,00	Rp 51.347.356.274,00	Rp 66.362.403.259,00	Rp 72.795.539.981,00	Rp 113.582.079.036,00	Rp 169.971.911.083,00	Rp 204.742.861.267,00	Rp 225.725.027.516,00	Rp 244.644.569.773,00	Rp 258.642.227.752,00	Rp 258.642.227.752,00
Kab. Ogan Ilir	Rp 5.694.862.408,80	Rp 10.888.601.814,90	Rp 16.094.729.739,84	Rp 20.086.756.350,84	Rp 19.084.688.054,00	Rp 30.760.096.484,80	Rp 37.143.758.801,53	Rp 42.763.731.216,53	Rp 49.635.902.520,53	Rp 62.967.072.415,53	Rp 62.967.072.415,53	Rp 62.967.072.415,53
Kab. OKU Timur	Rp 5.479.906.054,00	Rp 11.417.959.274,95	Rp 16.959.092.202,95	Rp 21.702.417.411,95	Rp 15.595.161.350,00	Rp 33.159.180.149,95	Rp 46.592.231.539,95	Rp 53.950.100.796,95	Rp 63.029.502.480,95	Rp 63.660.144.761,95	Rp 66.387.158.589,95	Rp 66.387.158.589,95
Kab. OKU Selatan	Rp 1.929.150.093,00	Rp 3.883.182.467,00	Rp 4.714.196.594,00	Rp 4.882.012.288,00	Rp 5.524.141.728,00	Rp 8.790.074.536,00	Rp 9.881.547.113,00	Rp 10.959.536.203,00	Rp 12.176.421.568,00	Rp 13.415.451.323,00	Rp 14.855.029.704,00	Rp 14.855.029.704,00
Kab. Empat Lawang	Rp 971.076.121,00	Rp 1.971.294.770,00	Rp 2.890.969.387,00	Rp 3.672.827.922,00	Rp 3.424.904.662,00	Rp 6.196.966.930,00	Rp 7.849.959.396,00	Rp 9.661.764.458,00	Rp 11.487.165.394,00	Rp 13.404.592.466,00	Rp 13.404.592.466,00	Rp 13.404.592.466,00
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 1.937.133.251,00	Rp 4.420.246.152,00	Rp 6.931.024.611,00	Rp 8.660.043.903,00	Rp 5.065.949.770,00	Rp 10.938.752.930,00	Rp 11.095.214.907,00	Rp 11.095.214.907,00	Rp 11.095.214.907,00	Rp 11.095.214.907,00	Rp 12.912.915.464,00	Rp 12.912.915.464,00
Kab. Musi Rawas Utara	Rp 1.806.738.465,00	Rp 5.719.996.783,00	Rp 7.780.055.830,00	Rp 9.535.885.111,00	Rp 5.025.719.437,00	Rp 13.484.066.174,00	Rp 16.774.932.658,00	Rp 19.190.910.024,00	Rp 26.622.871.063,00	Rp 29.203.765.516,00	Rp 32.240.831.629,00	Rp 32.240.831.629,00
TOTAL PAJAK DAERAH	**Rp 415.317.380.972,18**	**Rp 880.980.781.519,52**	**Rp 1.328.994.487.798,91**	**Rp 2.013.898.111.908,24**	**Rp 2.502.560.326.082,50**	**Rp 3.626.094.936.395,24**	**Rp 3.783.656.476.320,71**	**Rp 4.338.198.733.887,11**	**Rp 4.980.079.723.928,71**	**Rp 5.630.383.449.666,31**	**Rp 5.919.827.784.624,31**	**Rp 6.559.367.964.577,74**
PDRB Bruto	**Rp 56.936.149.266.666,70**	**Rp 85.404.223.900.000,00**	**Rp 170.808.447.800.000,00**	**Rp 230.958.397.140.000,00**	**Rp 261.033.371.810.000,00**	**Rp 351.258.295.820.000,00**	**Rp 413.023.695.820.000,00**	**Rp 443.906.395.820.000,00**	**Rp 536.554.495.820.000,00**	**Rp 598.319.895.820.000,00**	**Rp 629.202.595.820.000,00**	**Rp 721.850.695.820.000,00**
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	**0,729**	**1,032**	**0,778**	**0,872**	**0,959**	**1,032**	**0,916**	**0,977**	**0,928**	**0,941**	**0,941**	**0,909**

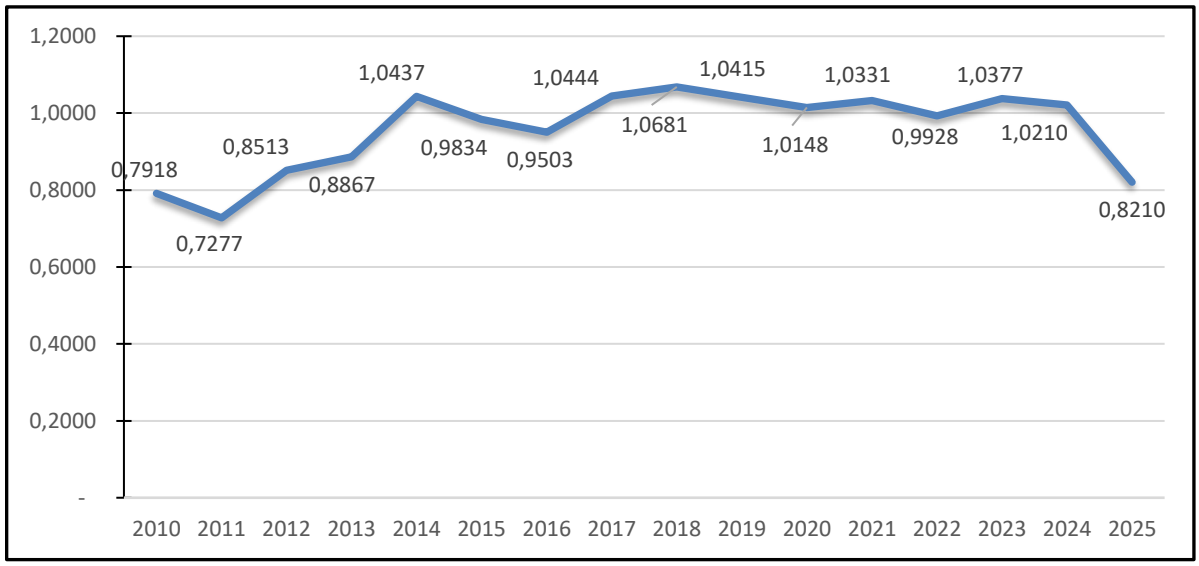

Gambar 3.9
Grafik Perbandingan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

3.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,909	1,27	71,57

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 71,57 %.

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 – 2025 menunjukan perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan investasi yang semakin baik.

3.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Realisasi Tahun 2025		Persentase (%)
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB	
1.	Aceh	2.295.047.804.953,20	243.202.090.000.000,00	0,944
2.	Sumatera Utara	9.991.452.491.400,00	1.146.919.760.000.000,00	0,871
3.	Sumatera Barat	3.347.873.097.654,50	332.936.440.000.000,00	1,006
4.	Riau	5.112.939.107.363,30	1.112.481.620.000.000,00	0,460
5.	Jambi	2.210.051.497.607,80	322.975.530.000.000,00	0,684
6.	Sumatera Selatan	5.926.089.762.430,31	721.850.695.820.000,00	0,909
7.	Bengkulu	1.099.609.462.942,60	103.991.920.000.000,00	1,057
8.	Lampung	3.651.155.865.729,30	483.882.920.000.000,00	0,755
9.	Kepulauan Riau	3.672.994.711.320,30	352.436.430.000.000,00	1,042
10.	Kepulauan Bangka Belitung	1.118.005.943.544,50	107.504.820.000.000,00	1,040

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun 2025 tertinggi pada Provinsi Bengkulu sebesar 1,057 % dan terendah pada Provinsi Riau sebesar 0,460 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,909 %.

Struktur dan pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa di pasar produk untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sangat tinggi sehingga kontribusi pajak daerah menjadi kecil, apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan

3.1.5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.43

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	72,72	Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penguatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah	Konsolidasi Bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah
						Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah	Memberikan insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investasi daerah
						Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB	Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah
						Kendaraan yang beroperasional dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan	Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya
						Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah	Melakukan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk mengendalikan kebocoran penerimaan pajak daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru;
2. Melaksanakan door to door service, penagihan pajak daerah dari satuan rumah tangga yang berkerjasama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
3. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak bersama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Melaksanakan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko;
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan internal sektor pajak daerah;
6. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.44
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	72,72	756.287.000	668.506.000	88,39	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat</u>: 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasional dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.5.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.45
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	72.72	756.287.000	668.506.000	88,39	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.46
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.45
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 4 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	72,72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.6 Sasaran Strategis 5 (SS.5)

SS.5 **Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**

"……Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah……"

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang. Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah yang dikelompokan pada Pendapatan Asli Daerah.

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Walaupun otonomi dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori dana transfer ke daerah. Mandatori dana transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil per kapita juga meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain

dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah. Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal.

IKSS.5 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Formula Perhitungan IKSS.5:

$$\left(\frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah} x\ 100\ \%\right)$$

Dimana:

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah = Realisasi Pendapatan Daerah

3.1.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.5 tahun 2025:

Tabel 3.48
Pengukuran Data Kinerja IKSS 5 Tahun 2025

No.	Bulan	Realisasi 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Januari	610.363.668.637,67	240.196.687.137,67	39,353	48,45
2.	Februari	1.351.055.896.145,99	496.908.944.084,99	36,779	
3.	Maret	1.699.323.823.000,00	800.547.217.519,50	47,110	
4.	April	3.082.180.160.422,22	1.456.859.523.046,22	47,267	
5.	Mei	3.736.168.857.076,74	1.740.160.942.225,74	46,576	
6.	Juni	4.338.860.285.073,79	2.242.892.148.257,79	51,693	
7.	Juli	5.383.297.239.495,94	2.616.648.796.709,94	48,607	
8.	Agustus	6.498.375.238.175,03	2.920.093.633.483,03	44,936	
9.	September	6.543.538.055.895,93	3.201.572.841.453,93	48,927	
10.	Oktober	8.252.134.352.268,70	3.730.677.293.545,70	45,209	
11.	November	9.007.267.189.992,25	4.011.191.364.200,25	44,533	
12.	Desember	9.837.929.951.702,67	4.509.197.075.145,67	45,835	
	TAHUNAN	9.837.929.951.702,67	4.509.197.075.145,67	45,835	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama tahun 2025 secara month-to-month masih mempunyai ketergantungan yang cukup besar dari transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, hal ini dibuktikan nilai realisasi kontribusi PAD masih di bawah 50 %, kinerja tertinggi terjadi pada bulan Juni 2025, dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 45,835 %.

Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk tahun 2025 $= \frac{45,835}{48,450} x\ 100\ \% = 94,601\ \%$

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.509.197.075.145,67 atau memberikan kontribusi sebesar 45,835 % dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 9.837.929.951.702,67 atau sebesar 54,165 %, hal ini mengindikasi bahwa Sumatera Selatan sangat membutuhkan alternatif pembiayaan lainnya (*creative financing*) antara lain Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat, investasi langsung, CSR.

3.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1.	2010	3,222,589,000,000.00	1,369,936,000,000.00	42.51
2.	2011	3,963,984,966,161.18	1,849,119,912,016.18	46.65
3.	2012	5,223,940,074,318.61	2,001,714,583,551.61	38.32
4.	2013	5,473,787,298,623.10	2,027,037,384,205.10	37.03
5.	2014	6,252,136,312,720.01	2,422,673,788,968.36	38.75
6.	2015	5,990,424,062,511.95	2,534,526,413,315.20	42.31
7.	2016	6,582,780,929,675.43	2,546,177,544,347.76	38.68
8.	2017	8,195,968,131,799.16	3,031,633,624,303.15	36.99
9.	2018	9,141,371,395,099.70	3,528,010,712,183.45	38.59
10.	2019	9,280,742,072,448.24	3,494,510,853,251.24	37.65
11.	2020	9,278,520,060,061.37	3,375,100,984,841.37	36.38
12.	2021	9,611,977,226,695.47	3,866,149,015,117.47	40.22
13.	2022	10,235,849,833,278.70	4,931,014,199,344.74	48.17
14.	2023	9,598,903,780,312.40	5,199,971,996,791.40	54.17
15.	2024	10,965,540,990,987.00	5,312,800,889,308.00	48.45
16.	2025	9.837.929.951.702,67	4.509.197.075.145,67	45,835

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Kontribusi PAD terbesar terhadap Pendapatan Daerah terjadi pada tahun 2023 dengan memberikan kontribusi sebesar 54,17 %, namun kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025, mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana APBD, Provinsi Sumatera Selatan masih mengharapkan sumber pembiayaan lainnya non APBD antara lain transfer ke daerah, investasi, CSR, KPBU dan *creative financing* lainnya.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.5	:	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
IKSS.5	:	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

$$\left(\frac{[Pendapatan\ Asli\ Daerah]}{Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\ \%\right)$$

Dimana :

PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah : Realisasi pendapatan daerah

No.	Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.699.323.823.000,00	47,110
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 4.338.860.285.073,79	51,693
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 6.543.538.055.895,93	48,927
4	Triwulan IV	Rp 4.509.197.075.145,67	Rp 9.837.929.951.702,67	45,835

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.633.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.730.677.293.545,70	Rp 4.011.191.364.200,25	Rp 4.509.197.075.145,67
2	PENDAPATAN DAERAH	Rp 610.363.668.637,67	Rp 1.351.055.896.145,99	Rp 1.699.323.823.000,00	Rp 3.082.180.160.422,22	Rp 3.736.168.857.076,74	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 5.383.297.239.495,94	Rp 6.498.375.238.175,03	Rp 6.543.538.055.895,93	Rp 8.252.134.352.268,70	Rp 9.007.267.189.992,25	Rp 9.837.929.951.702,67
% PAD terhadap Pendapatan Daerah		39,353	36,779	47,110	47,267	46,576	51,693	48,607	44,936	48,927	45,209	44,533	45,835

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.5	:	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
IKSS.5	:	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

$$\left(\frac{[Pendapatan\ Asli\ Daerah]}{Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\ \%\right)$$

Dimana :

PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah : Realisasi pendapatan daerah

No.	Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 2.255.925.057.076,74	49,742
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 4.687.788.699.397,97	52,126
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 7.510.343.386.396,40	50,217
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 10.965.540.990.987,20	48,450

No.	URAIAN	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	PENDAPATAN DAERAH	Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.409.132.494,04	Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.185,98	Rp 7.058.362.560.031,98	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 9.034.450.070.781,23	Rp 9.734.258.083.136,37	Rp 10.965.540.990.987,20
% PAD terhadap Pendapatan Daerah		37,840	44,683	49,742	52,049	52,026	52,126	52,817	47,897	50,217	46,124	48,085	48,450

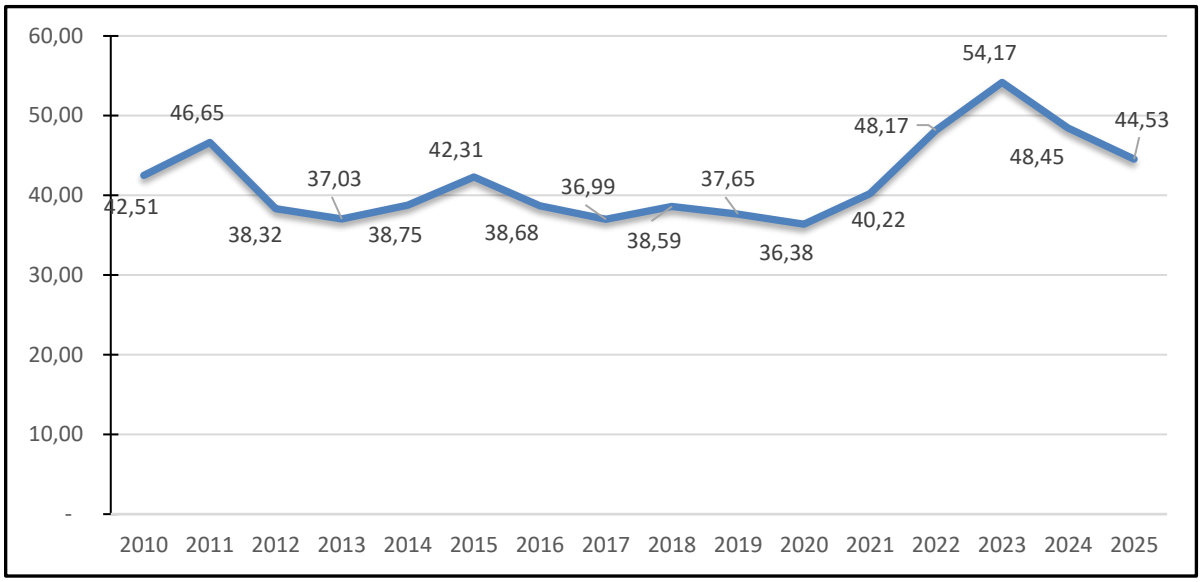

Gambar 3.10
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025, apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	9.837.929.951.702,67	45,835
dst				
2.	2030	7.075.931.702.943,23	13.549.281.593.204,80	55,64

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 $= \frac{45,84}{55,64} x\ 100\ \% = 82,39\ \%$

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,835	55,64	82,39

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dan Renstra tahun 2025 – 2029 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 82,39 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian tahun 2025 sesuai dengan *on the track* dari dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan kondisi bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,835 %, masih harus ditopang oleh sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan Sumatera Selatan

3.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi 2025		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	10.155.352.045.785,00	24,01
2.	Sumatera Utara	4.303.372.94.6127,30	8.614.057.090.921,30	49,95
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	5.637.501.625.930,30	43,62
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	6.554.436.778.806,50	50,35
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	3.704.748.654.518,60	43,93
6.	Sumatera Selatan	4.011.191.364.200,25	9.007.267.189.992,25	45,835
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	2.395.349.147.541,50	37,57
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	4.798.142.574.580,60	51,03
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	3.393.963.641.827,40	44,26
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	1.879.328.194.638,70	36,79

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu 2025

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada Provinsi Lampung sebesar 51,03 % sementara kontribusi terendah pada Provinsi Aceh sebesar 24,01 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 45,835 %. Namun kondisi kontribusi PAD Sumatera Selatan masih dibawah 50 % yang mengindikasikan bahwa masih mempunyai ketergantungan pada transfer ke daerah.

3.1.6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.53
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	94,60	Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan	
						Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retrubusi daerah;
3. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
5. Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
7. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan padaKementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.54
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	94,60	1.140.000.000	1.098.450.000	96,35	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung</u>: 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah 2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam keringanan berusaha 6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru 7. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.6.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.55
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	90,60	1.140.000.000	1.098.450.000	96,35	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 45,835 %, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.098.450.000,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 45,835 %.

3.1.6.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.56
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 45,835 % hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.348.725.040,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 45,835 %.

3.1.6.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.57
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah	94,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.7 Sasaran Strategis 6 (SS.6)

SS.6 **Meningkatnya Pendapatan Daerah**

".....Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat ....."

Pendekatan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah menuju kemandirian fiskal daerah.

Dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai tahun 2001-2020 telah memberikan gambaran perekonomian daerah serta memberikan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ke depannya. Keleluasaan dalam kewenangan pemerintahan daerah untuk menggali sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah terutama yang bersumber pada pendapatan pajak daerah, penerimaan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan terbesar dari penerimaan pendapatan asli daerah, dimana dalam perekonomian pajak memiliki peranan sebagai sumber penerimaan daerah dan juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dengan insentif fiskal daerah melalui pengurangan tarif pajak sehingga merangsang pertumbuhan investasi daerah.

Formula Perhitungan IKSS.6:

$$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n} x\ 100\ \%$$

Dimana:

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

Realisasi PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

Target PAD = Target PAD Tahun ke n yang ditetapkan dalam APBD

3.1.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.6 tahun 2025:

Tabel 3.58
Pengukuran Data Kinerja IKSS 6 Tahun 2025

No.	Bulan	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Realisasi	Target		
1.	Januari	240.196.687.137,67	4.459.311.556.974,42	5,386	92,03
2.	Februari	496.908.944.084,99	4.459.311.556.974,42	11,143	
3.	Maret	800.547.217.519,50	4.459.311.556.974,42	17,952	
4.	April	1.456.859.523.046,22	4.459.311.556.974,42	32,670	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	4.642.152.890.474,00	37,486	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	4.642.152.890.474,00	48,316	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	4.642.152.890.474,00	56,367	
8.	Agustus	2.920.093.633.483,03	4.642.152.890.474,00	62,904	
9.	September	3.201.572.841.453,93	4.838.287.154.591,00	66,172	
10.	Oktober	3.730.677.293.545,70	4.838.287.154.591,00	77,107	
11.	November	4.011.191.364.200,25	4.838.287.154.591,00	82,905	
12.	Desember	4.509.197.075.145,67	4.838.287.154.591,00	93,198	
	TAHUNAN	4.509.197.075.145,67	4.838.287.154.591,00	93,198	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Realisasi pengukuran data kinerja pencapaian PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 secara month-to-month mengalami kenaikan.

Capaian kinerja $= \frac{93,198}{92,03}\ x\ 100\ \% = 101,27\ \%$

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 mencapai nilai Rp. 4.509.197.075.145,67 atau terealisasi sebesar 93,198 % dari rencana target sebesar Rp. 4.838.287.154.591,00 hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sudah sangat baik dengan pencapaian diatas 90 %, namun masih harus ditingkatkan atau di optimalisasikan denga menggali sumber potensi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan karakteristik daerah.

3.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

	Tahun	Target [Rp]	Realisasi [Rp]	Persentase (%)
1.	2010	1.496.643.000.000,00	1.369.936.000.000,00	91,53
2.	2011	1.563.704.000.000,00	1.849.119.912.016,20	118,25
3.	2012	1.899.649.695.000,00	2.001.714.583.551,60	105,37
4.	2013	2.214.420.245.000,00	2.027.037.384.205,10	91,54
5.	2014	2.595.724.088.303,00	2.422.673.788.968,36	93,33
6.	2015	2.871.976.896.280,09	2.534.526.413.315,20	88,25
7.	2016	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.347,76	82,30
8.	2017	3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,15	95,78
9.	2018	3.449.590.628.837,00	3.528.010.712.183,45	102,27
10.	2019	3.436.828.903.746,55	3.494.510.853.251,24	101,68
11.	2020	3.617.058.256.621,75	3.375.100.984.841,37	93,31
12.	2021	4.747.088.053.456,97	3.866.149.015.117,47	81,44
13.	2022	5.385.438.862.341,00	4.931.014.199.344,74	91,56
14.	2023	5.537.632.151.975,00	5.199.971.996.791,40	93,90
15.	2024	5.236.576.566.867,00	5.312.800.889.308,00	101,45
16.	2025	4.838.287.154.591,00	4.509.197.075.145,67	93,198

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Realisasi capaian kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2025 sebesar 93,198 %. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 101,27 %.

Secara rerata, kinerja realisasi PAD terhadap target selama periode 2010 – 2025 sangat baik dengan nilai sebesar 94,68 %, strategi dan upaya untuk meningkatkan PAD berjalan dengan baik.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.6	:	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
IKSS.6	:	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n}\ x\ 100\%$$

Dimana :

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n

Target Tahun = Target Pendapatan Tahun ke n

No.	Uraian	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 4.459.311.556.974,00	17,952
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 4.642.152.890.474,00	48,316
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 4.838.287.154.591,00	66,172
4	Triwulan IV	Rp 4.509.197.075.145,67	Rp 4.838.287.154.591,00	93,198

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.633.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.730.677.293.545,70	Rp 4.011.191.364.200,25	Rp 4.509.197.075.145,67
2	Target PAD	Rp 4.459.311.556.974,42	Rp 4.459.311.556.974,42	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,42	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.838.287.154.591,00	Rp 4.838.287.154.591,00	Rp 4.838.287.154.591,00	Rp 4.838.287.154.591,00
% Realisasi PAD terhadap Target PAD		5,386	11,143	17,952	32,670	37,486	48,316	56,367	62,904	66,172	77,107	82,905	93,198

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.6	:	Meningkatnya Pendapatan Daerah
IKSS.6	:	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n}\ x\ 100\%$$

Dimana :

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n

Target Tahun = Target Pendapatan Tahun ke n

No.	Uraian	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 4.760.692.664.094,00	23,571
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 4.760.692.664.094,00	51,328
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.760.692.664.094,00	79,221
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 5.236.576.566.867,00	101,456

No.	URAIAN	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Target PAD	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 5.236.576.566.867,00	Rp 5.236.576.566.867,00	Rp 5.236.576.566.867,00
% Realisasi PAD terhadap Target PAD		7,449	14,805	23,571	35,986	43,224	51,328	62,699	71,013	79,221	79,575	89,385	101,456

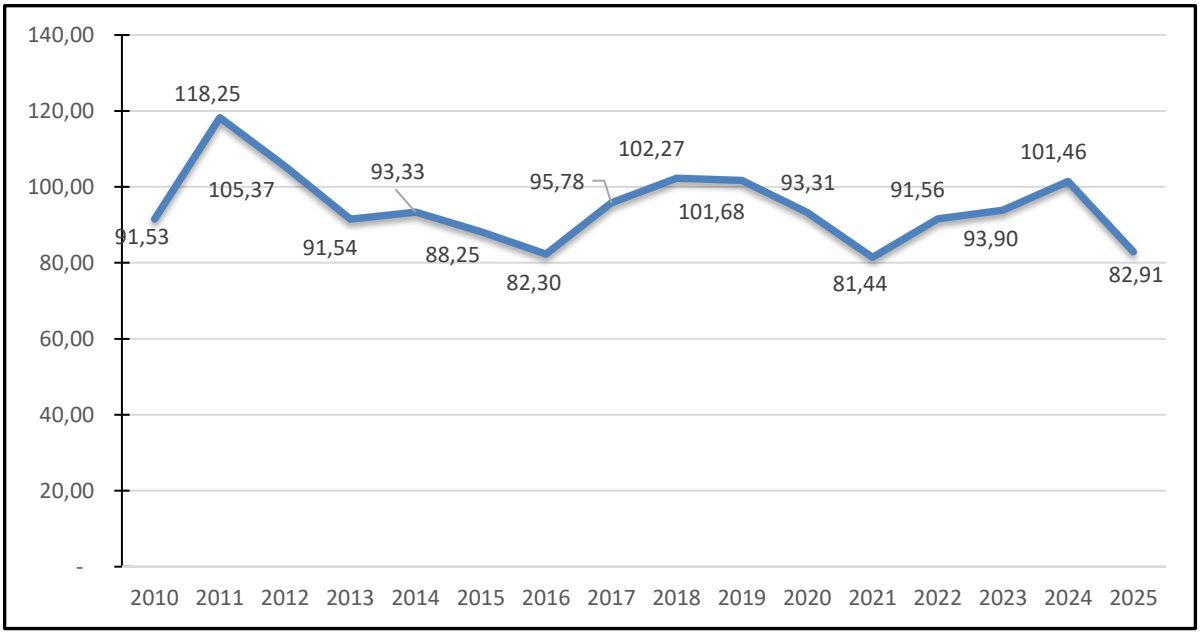

Gambar 3.11
Grafik Perbandingan Kinerja Pencapaian PAD Tahun 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pencapaian PAD tahun 2025 dengan rencana target di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	4.838.287.154.591,00	93,198
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target PAD dalam RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan pada akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.61
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,198	N/A	N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2025 apabila dibandingkan dengan pencapaian 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.62
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah 2025		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	2.859.122.172.935,00	85,29
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	6.419.301.627.754,00	67,04
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	2.807.443.163.516,00	87,59
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	5.200.915.848.254,00	63,45
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	2.074.503.864.666,00	78,45
6.	Sumatera Selatan	4.011.191.364.200,25	4.838.287.154.591,00	93,19
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	1.231.301.332.918,00	73,09
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	4.020.052.532.113,20	60,91
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	1.904.763.732.160,40	78,86
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	986.551.719.389,04	70,09

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu Sumsel 2025

Realisasi capaian kinerja PAD terhadap target tahun 2025 tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 93,198 % dan terendah pada Provinsi Lampung sebesar 60,91 %.

3.1.7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.63

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 6

O.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92,03	93,198	101,27	Melakukan update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat	
						Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah	
						Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya	
						Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu	
						Cascading pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD, antara lain:

1. Melaksanakan program intensifikasi pajak daerah, dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
2. Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan penambahan objek pajak baru melalui kerjasama investasi daerah dengan Perangkat Daerah DMPTSP;
3. Meningkatkan deversifikasi pajak daerah dengan konsolidasi fiskal Pemerintah Pusat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
7. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.64
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92,03	93,198	101,27	634.000.000	550.200.000	86,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya *cross-cutting* bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung</u>: 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.7.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.65
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 Tahun 2025 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	92,03	93,198	101,27	634.000.000	550.200.000	86,78	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,198 %, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 550.200.000,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,198 %.

3.1.7.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.66
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 Tahun 2025 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,198 % hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.348.725.040,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,198 %.

3.1.7.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.67
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,198	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.8 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

SS.7	**Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB**

"……Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah ……"

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah menunjukan bahwa kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah suatu produk pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik daerah timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor produksi yang dimiliki residen atau non–residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi lapangan usaha, PDRB merupakan akumulasi dari seluruh komponen pembentuk nilai tambah bruto yang mampu dihasilkan oleh setiap lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Formula Perhitungan IKSS.7:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ Non\ Migas} x\ 100\ \%$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB = Realisasi PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas

3.1.8.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.7 tahun 2025:

Tabel 3.67
Pengukuran Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2025

No.	Bulan	Uraian		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB Non Migas		
1.	Januari	240.196.687.137,67	51.717.800.000.000,00	0,464	0,96
2.	Februari	496.908.944.084,99	103.435.600.000.000,00	0,480	
3.	Maret	800.547.217.519,50	155.153.400.000.000,00	0,516	
4.	April	1.456.859.523.046,22	208.558.180.000.000,00	0,699	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	261.962.960.000.000,00	0,664	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	320.428.680.000.000,00	0,700	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	374.956.641.111.111,00	0,698	
8.	Agustus	2.920.093.633.483,03	429.484.602.222.222,00	0,680	
9.	September	3.201.572.841.453,93	490.751.650.000.000,00	0,652	
10.	Oktober	3.730.677.293.545,70	531.647.620.833.333,00	0,702	
11.	November	4.011.191.364.200,25	490.751.650.000.000,00	0,817	
12.	Desember	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,682	
	TAHUNAN	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,682	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Realisasi kinerja IKSS.7 tahun 2025 secara month-to-month menunjukan kenaikan secara bertahap yang mengindikasikan kinerja positif kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan realisasi sebesar 0,682 %.

Capaian kinerja $= \frac{0,682}{0,960}\ x\ 100\ \% = 71,04\ \%$

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB sektor riil mencapai 0,682 %, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap PDRB lapangan usaha masih terlatif kecil. Sektor riil yang perlu dilakukan stimulus dari insentif pajak daerah yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor home industry

3.1.8.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun:

Tabel 3.69

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Realisasi PAD [Rp]	PDRB ADHB Non Migas [Rp]	Persentase (%)
1.	2010	1.369.936.000.000,00	194.012.970.000.000,00	0,70
2.	2011	1.849.119.912.016,18	226.666.930.000.000,00	0,82
3.	2012	2.001.714.583.551,61	253.265.120.000.000,00	0,79
4.	2013	2.027.037.384.205,10	280.348.460.000.000,00	0,72
5.	2014	2.422.673.788.968,36	306.421.600.000.000,00	0,79
6.	2015	2.534.526.413.315,20	331.765.700.000.000,00	0,76
7.	2016	2.546.177.544.347,76	353.866.960.000.000,00	0,72
8.	2017	3.031.633.624.303,15	336.219.400.000.000,00	0,90
9.	2018	3.528.010.712.183,45	367.862.100.000.000,00	0,96
10.	2019	3.494.510.853.251,24	397.889.000.000.000,00	0,88
11.	2020	3.375.100.484.841,37	406.862.100.000.000,00	0,83
12.	2021	3.866.149.015.117,47	435.838.000.000.000,00	0,89
13.	2022	4.931.014.199.344,74	521.236.150.000.000,00	0,95
14.	2023	5.197.288.200.424,89	569.675.270.000.000,00	0,91
15.	2024	5.312.794.988.178,45	663.961.720.000.000,00	0,80
16	2025	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,682

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas secara year-on-year terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,96 % dan kontribusi terendah pada tahun 2025 sebesar 0,682 %.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.7	:	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB Non Migas	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 155.153.400.000.000	0,516
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 320.428.680.000.000	0,700
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 490.751.650.000.000	0,652
4	Triwulan IV	Rp 4.509.197.075.145,67	Rp 490.751.650.000.000	0,919

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas}\ x\ 100\%$$

Dimana :

Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB = PDRB Non Migas

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.533.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.730.677.293.545,70	Rp 4.011.191.364.200,25	Rp 4.509.197.075.145,67
2	Realisasi PDRB Non Migas	Rp 51.717.800.000.000,00	Rp 77.576.700.000.000,00	Rp 155.153.400.000.000,00	Rp 210.245.160.000.000,00	Rp 237.791.040.000.000,00	Rp 320.428.680.000.000,00	Rp 377.203.003.333.333,00	Rp 405.590.165.000.000,00	Rp 490.751.650.000.000,00	Rp 547.525.973.333.333,00	Rp 575.913.135.000.000,00	Rp 661.074.620.000.000,00
% Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas		0,464	0,641	0,516	0,693	0,732	0,700	0,694	0,720	0,652	0,681	0,696	0,682

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.7	:	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB Non Migas	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 141.637.750.000.000	0,792
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 292.449.210.000.000	0,836
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 448.972.980.000.000	0,840
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 602.503.020.000.000	0,882

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas}\ x\ 100\%$$

Dimana :

Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB = PDRB Non Migas

No.	URAIAN	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.336.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Realisasi PDRB Non Migas	Rp 47.212.583.333.333,30	Rp 70.818.875.000.000,00	Rp 141.637.750.000.000,00	Rp 191.908.236.666.667,00	Rp 217.043.480.000.000,00	Rp 292.449.210.000.000,00	Rp 344.623.800.000.000,00	Rp 370.711.095.000.000,00	Rp 448.972.980.000.000,00	Rp 500.149.660.000.000,00	Rp 525.738.000.000.000,00	Rp 602.503.020.000.000,00
% Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas		0,751	0,995	0,792	0,893	0,948	0,836	0,866	0,912	0,840	0,833	0,890	0,882

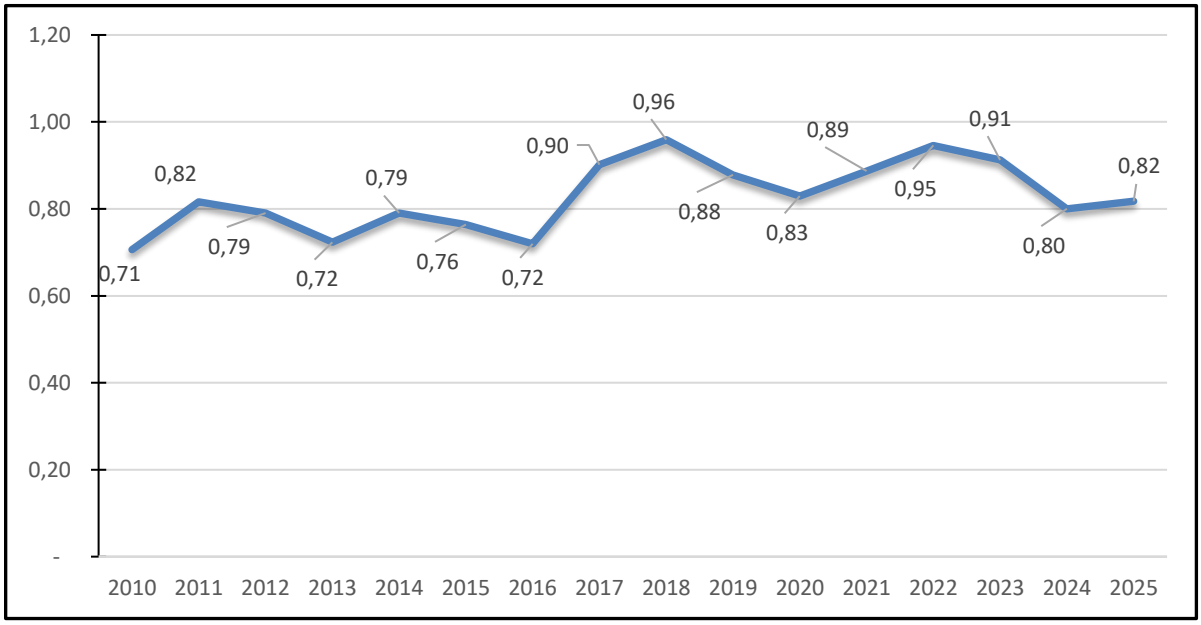

Gambar 3.12
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel dan BPS Sumsel

3.1.8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.70
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,682
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.71
Capaian Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,82	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebegai berikut:

Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	243.202.090.000.000,00	1,00
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	1.146.919.760.000.000,00	0,38
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	332.936.440.000.000,00	0,74
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	1.112.481.620.000.000,00	0,30
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	322.975.530.000.000,00	0,50
6.	Sumatera Selatan	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,68
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	103.991.920.000.000,00	0,87
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	483.882.920.000.000,00	0,51
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	352.436.430.000.000,00	0,43
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	107.504.820.000.000,00	0,64

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terbesar pada Provinsi Aceh dengan nilai sebesar 1,00 %, sementara kontribusi terkecil pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar 0,38 %, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,682 %.

3.1.8.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.73
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	71,04	Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru	Diperlukan menciptakan peluang investasi daerah mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal daerah
						Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan	Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih atau Posko Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan sampai ke wilayah pedesaan
						Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal	Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
						Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara massif dan berkala waktu
						Belum optimalnya pelaksanaan atas rekomendasi dari KPK	Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Lapangan Usaha Non Migas, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.74
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	71,04	300.000.000	257.345.430	85,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system *treasury deposit facility* cukup efisien <u>Faktor Penghambat</u>: 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalian sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.8.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.75
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2025 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	0,96	0,682	71,04	300.000.000	257.345.430	85,78	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,682 % hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 257.345.430,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,682 %.

3.1.8.1.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.76

Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2025 Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,682 % hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.348.725.040,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,682 %.

3.1.8.1.8 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.77

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 7 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	71,04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak	61,40	Menunjang

					Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Formula Perhitungan IKSS.8:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pola opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan menjadi sumber kekuatan pajak daerah yang berdasarkan basis data pajak daerah berdasarkan domisili penduduk. Penguatan basis data pajak daerah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah dalam menggali potensi pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.8.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.8 tahun 2025:

Tabel 3.78
Pengkuran Data Kinerja IKSS 8 Tahun 2025

No.	Bulan	Uraian		Rasio	Target Tahunan 2025
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB PKPD		
1.	Januari	240.196.687.137,67	154.392.592.592,59	1,556	1,12
2.	Februari	496.908.944.084,99	308.785.185.185,19	1,609	
3.	Maret	800.547.217.519,50	463.177.777.777,78	1,728	
4.	April	1.456.859.523.046,22	632.988.518.518,52	2,302	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	802.799.259.259,26	2,168	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	1.018.864.444.444,44	2,201	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	1.194.929.444.444,44	2,190	
8.	Agustus	2.920.093.633.483,03	1.370.994.444.444,44	2,130	
9.	September	3.201.572.841.453,93	1.584.585.000.000,00	2,020	
10.	Oktober	3.730.677.293.545,70	1.716.633.750.000,00	1,890	
11.	November	4.011.191.364.200,25	1.584.585.000.000,00	2,531	
12.	Desember	4.509.197.075.145,67	1.584.585.000.000,00	2,097	
	TAHUNAN	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,56	2,097	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah secara month-to-month tahun 2025 tertinggi terjadi pada Bulan November 2025 sebesar 2,531 dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2025 sebesar 1,556.

Capaian kinerja $= \frac{2,097}{1,12}\ x\ 100\ \% = 187,23\ \%$

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tahun 2025 mencapai 2,097 %, hal ini mengindikasikan bahwa tagging pendapatan yang menjadi proxy belanja pengeluaran pemerintah daerah yang selanjutnya dikonsumsi masyarakat dengan membeli produk barang dan jasa masih sangat kecil dengan nilai 2,097 %.

Peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembentuk perekonomian daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi proxy pengeluaran belanja pemerintah daerah yang menghasilkan produk barang dan jasa

di masyarakat. Selama periode tahun 2010 – 2025, perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.8	:	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB PKPD	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 463.177.777.778	1,728
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 1.018.864.444.444	2,201
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 1.584.585.000.000	2,020
4	Triwulan IV	Rp 4.509.197.075.145,67	Rp 1.584.585.000.000	2,846

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana :

Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.633.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 3.245.209.347.130,10	Rp 4.011.191.364.200,25	Rp 4.509.197.075.145,67
2	Realisasi PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rp 154.392.592.592,59	Rp 231.588.888.888,89	Rp 463.177.777.777,78	Rp 648.406.666.666,67	Rp 741.021.111.111,11	Rp 1.018.864.444.444,44	Rp 1.207.437.962.962,96	Rp 1.301.724.722.222,22	Rp 1.584.585.000.000,00	Rp 1.773.158.518.518,52	Rp 1.867.445.277.777,78	Rp 2.150.305.555.555,56
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		1,556	2,146	1,728	2,247	2,348	2,201	2,167	2,243	2,020	1,830	2,148	2,097

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.8	:	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB PKPD	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 407.138.333.333	2,756
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 970.850.000.000	2,517
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 1.511.552.222.222	2,495
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 2.276.276.666.667	2,334

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana :

Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.336.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Realisasi PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rp 135.712.777.777,78	Rp 203.569.166.666,67	Rp 407.138.333.333,33	Rp 595.042.222.222,22	Rp 688.994.166.666,67	Rp 970.850.000.000,00	Rp 1.151.084.074.074	Rp 1.241.201.111.111	Rp 1.511.552.222.222,22	Rp 1.766.460.370.370	Rp 1.893.914.444.444,44	Rp 2.276.276.666.666,67
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		2,613	3,462	2,756	2,879	2,987	2,517	2,593	2,724	2,495	2,359	2,471	2,334

3.1.8.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya:

Tabel 3.79
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun	Realisasi PAD [Rp]	PDRB ADHB PKPD [Rp]	Rasio
1.	2010	1.369.936.000.000,00	876.092.777.777,78	1,56
2.	2011	1.849.119.912.016,18	1.027.828.888.888,89	1,80
3.	2012	2.001.714.583.551,61	1.135.833.888.888,89	1,76
4.	2013	2.027.037.384.205,10	1.252.367.222.222,22	1,62
5.	2014	2.422.673.788.968,36	1.358.042.777.777,78	1,78
6.	2015	2.534.526.413.315,20	1.438.316.666.666,67	1,76
7.	2016	2.546.177.544.347,76	1.461.885.555.555,56	1,74
8.	2017	3.031.633.624.303,15	1.661.254.444.444,44	1,82
9.	2018	3.528.010.712.183,45	1.803.348.333.333,33	1,96
10.	2019	3.494.510.853.251,24	2.038.159.444.444,44	1,71
11.	2020	3.375.100.484.841,37	1.777.500.000.000,00	1,90
12.	2021	3.866.149.015.117,47	1.891.977.777.777,78	2,04
13.	2022	4.931.014.199.344,74	1.897.995.555.555,56	2,60
14.	2023	5.197.288.200.424,89	2.074.106.111.111,11	2,51
15.	2024	5.312.794.988.178,45	2.276.276.111.111,11	2,33
16.	2025	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,56	2,097

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada tahun 2,51 dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,56.

Belanja daerah (government expenditure) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan

adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

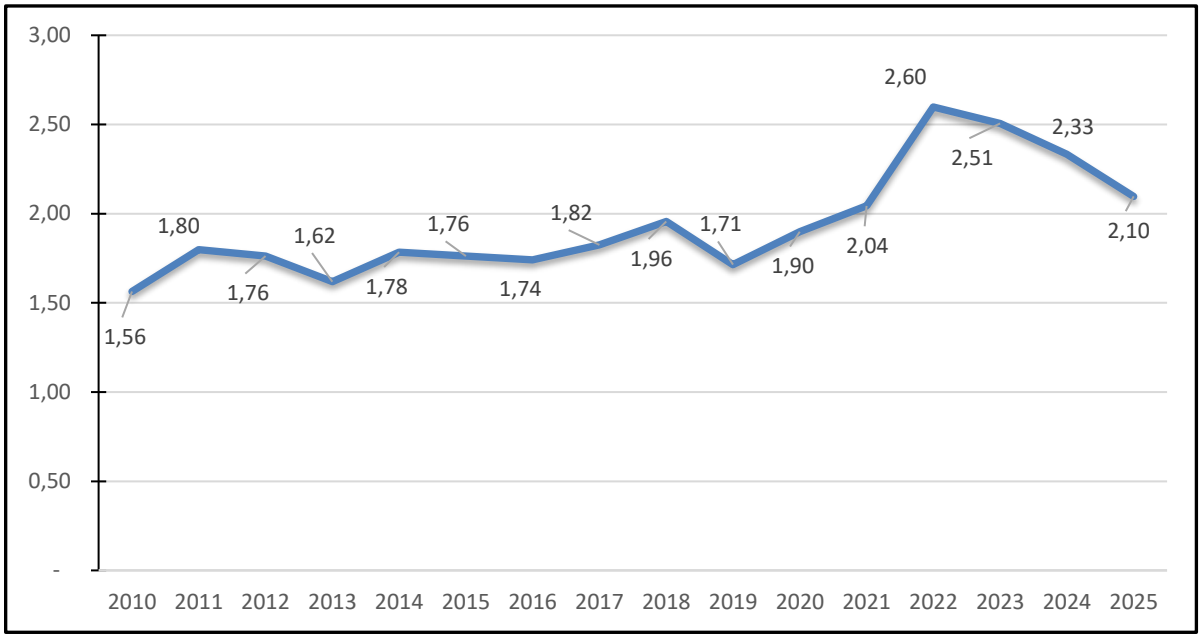

Gambar 3.13
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

3.1.8.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029

Tabel 3.80
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,26	2,10
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat

dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.81
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025		Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3 9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB 1	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	2,097		N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Tahun 2025		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	1.203.761.666.666,67	2,03
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	1.406.190.882.352,94	3,06
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	1.086.127.500.000,00	2,26
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	1.951.934.615.384,62	1,69
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	1.142.010.833.333,33	1,43
6.	Sumatera Selatan	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,56	2,097
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	1.186.617.272.727,27	0,76
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	1.361.949.375.000,00	1,80
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	1.317.737.500.000,00	1,14
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	869.270.000.000,00	0,80

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,06, terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 0,76, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 2,097.

3.1.8.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.83

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,097	187,23	Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif Rp. 0	
						Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Penempelan stiker tanda lunas di kendaran bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak	
						Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan door to door service	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.84
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,097	187,23	500.000.000	414.311.000	82,86	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung</u>: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.8.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.2.5.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.85

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 Tahun 2025 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1,12	2,097	187,23	500.000.000	414.311.000	82,86	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,10 hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 414.311.000,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,097.

3.1.1.1.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.86
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 Tahun 2025 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		94,46	86,71	91,79	**220.000.000,00**	**209.331.072,00**	**95,15**	**12,23**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			93,64	91,92	98,16	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		94,62	89,70	94,80	**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**	**12,23**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						**5.618.909.010,00**	**3.348.725.040,00**	**59,59**	**12,23**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebesar 12,23 % untuk mendukung kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,097 hal ini mengindikasikan bahwa dengan kebutuhan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.348.725.040,00 telah mengefisiensi sebesar 12,23 % untuk menghasilkan kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,097.

3.1.8.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.87

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	187,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang

				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak	Jumlah Dokumen Keberatan	56,09	Menunjang

				Daerah	yang telah ditindaklanjuti		
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

A. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi:

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

a. Capaian Keluaran

1) Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (∏) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik ∏) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$CKP = \prod_{i=1}^{m}(((\prod_{m}^{n}\frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i})^{\frac{1}{n}})\ ^{\frac{1}{m}})\ x\ 100\ \%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

Tabel 3.88

Pengukuran Capaian Keluaran Program Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Capaian Keluaran (Output) Program (CKP)	Indikator Keluaran (Output) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP 1	90,17	82,47
CKP 2	IKP 2	95,03	92,89
CKP 3	IKP 3	82,12	58,15

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

$$CKP = \left(\left(\left(\frac{82,47}{90,17}\right) x \left(\frac{92,89}{95,03}\right) x \left(\frac{58,15}{82,12}\right)\right)\ ^{\frac{1}{3}}\right) x\ 100\ \%$$

$$CKP = \left((0,91\ x\ 0,97\ x\ 0,71)\ ^{\frac{1}{3}}\right) x\ 100\ \%$$

$$CKP = 85,57\ \%$$

2) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric (∏) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume

keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric (∏) perbandingan antara capaian dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$CKK = \prod_{i=1}^{m} ((\frac{RVK\ ke\ i}{TVK\ ke\ i} x\ (\prod_{j=1}^{n} \frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i}) \quad \frac{1}{n}) \quad \frac{1}{m})$$

Keterangan :

CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

Tabel 3.89

Pengukuran Capaian Keluaran Program Kinerja Anggaran

Capaian Keluaran (Output) Kegiatan (CKK)	Volume		Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan (IKK)		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Keluaran 1 (SDM)	423	418	IKK ke 1	100,00	96,13
			IKK ke 2	35,00	30,00
Keluaran 2 (Laporan)	64	60	IKK ke 1	3,00	3,00
			IKK ke 2	4,00	4,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	13,00	13,00
			IKK ke 10	3,00	3,00
			IKK ke 11	3,00	3,00
			IKK ke 12	2,00	2,00
			IKK ke 13	29,00	25,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
Keluaran 3 (Dokumen)	58	52	IKK ke 1	2,00	2,00
			IKK ke 2	1,00	1,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	2,00	2,00
			IKK ke 10	2,00	2,00
			IKK ke 11	1,00	1,00
			IKK ke 12	12,00	11,00
			IKK ke 13	29,00	24,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
			IKK ke 15	2,00	2,00

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

$$CKK$$

$$= ((\frac{418}{423} x \left(\frac{96,13}{100} x \frac{30}{35}\right) \quad \frac{1}{2}\right) x \left(\frac{60}{64} x \left(\frac{3}{3} x \frac{4}{4} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{13}{13} x \frac{3}{3} x \frac{3}{3} x \frac{2}{2} x \frac{25}{29} x \frac{1}{1}\right) \quad \frac{1}{14}\right) x$$

$$\left(\frac{52}{58} x \left(\frac{2}{2} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{1}{1} x \frac{2}{2} x \frac{2}{2} x \frac{1}{1} x \frac{11}{12} x \frac{24}{29} x \frac{1}{1} x \frac{2}{2}\right) \quad \frac{1}{15}\right) x \, 100 \, \%$$

$$CKK = 87,64$$

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} x \, 100 \, \%$$

Keterangan:

P	:	Penyerapan Anggaran
RA	:	Akumulasi Realisasi Anggaran
PA	:	Akumulasi Pagu Anggaran

Tabel 3.90

Pengukuran Penyerapan Anggaran Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**			**226.466.839.034,00**	**186.772.021.363,00**	**82,47**
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**174.300.000,00**	**98.055.116,00**	**56,26**
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.000.000,00	36.284.836,00	62,56
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	59.000.000,00	24.157.7052,00	40,95
		1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.300.000,00	37.612.578,00	65,64
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**168.827.292.000,00**	**137.776.114.439,00**	**81,61**
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168.426.842.000,00	137.441.519.398,00	81,60
		2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.450.000,00	199.340.000,00	82,22
		2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	158.000.000,00	135.255.041,00	85,60
	3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**16.600.000,00**	**5.504.000,00**	**33,16**
		3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.600.000,00	5.504.000,00	33,16
	4.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**319.180.000,00**	**224.233.306,00**	**70,25**
		4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	32.480.000,00	-	0,00
		4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	87.000.000,00	81.996.206,00	94,25
		4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	157.000.000,00	102.277.100,00	65,14
		4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.700.000,00	39.960.000,00	93,58
	5.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**936.843.524,00**	**429.603.060,00**	**45,86**
		5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	31.200.000,00	-	0,00
		5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	265.400.000,00	168.630.000,00	63,54
		5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	279.225.000,00	260.973.060,00	93,46
		5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	361.018.524,00	-	0,00
	6.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**22.892.747.920,00**	**19.586.238.672,00**	**85,56**
		6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	759.828.800,00	91,20
		6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	699.750.000,00	693.515.514,00	99,11
		6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500.000.000,00	495.912.000,00	99,18
		6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.809.062.220,00	1.667.268.137,00	92,16
		6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.419.362.980,00	5.417.617.167,00	99,97
		6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	45.650.000,00	91,30
		6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.400.000,00	138.455.600,00	97,92
		6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.400.000,00	546.548.924,00	90,88
		6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.838.600.000,00	9.821.442.530,00	76,50
	7.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.100.000.000,00**	**998.219.017,00**	**90,75**
		7.1	Pengadaan Mebel	400.000.000,00	398.819.017,00	99,70
		7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000,00	599.400.000,00	99,90
		7.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00	-	0,00
	8.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**25.160.520.204,00**	**22.299.748.124,00**	**88,63**
		8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.400.000,00	33.353.600,00	42,01
		8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.184.696.268,00	2.464.759.289,00	77,39
		8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.400.000,00	175.290.000,00	96,63
		8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.715.023.936,00	19.626.345.235,00	90,38
	9.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**7.039.355.386,00**	**5.354.305.629,00**	**76,06**

		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.000.000.000,00	1.595.047.591,00	79,75
		9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.789.635.180,00	1.760.598.978,00	63,11
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.304.945,00	401.819.000,00	83,14
		9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.766.415.261,00	1.596.840.060,00	90,40
II.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			**115.000.000,00**	**106.826.431,00**	**92,89**
	1.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**115.000.000,00**	**106.826.431,00**	**92,89**
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	115.000.000,00	106.826.431,00	92,89
III.	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**			**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**
	1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**5.398.909.010,00**	**3.139.393.968,00**	**58,15**
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	397.825.000,00	362.778.919,00	91,19
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	324.000.000,00	128.959.423,00	39,80
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	737.500.000,00	290.596.984,00	39,40
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	422.507.400,00	274.338.573,00	64,93
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	92.900.000,00	21.767.110,00	23,43
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	496.581.260,00	358.325.750,00	72,16
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50.300.000,00	34.018.860,00	67,63
		1.10	Penagihan Pajak Daerah	312.615.350,00	183.841.350,00	58,81
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.000.000,00	11.720.204,00	43,41
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	231.280.000,00	207.017.260,00	89,51
		1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.400.000,00	-	0,00
		1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	83.000.000,00	15.302.590,00	18,44
	JUMLAH			**231.980.748.044,00**	**190.018.241.762,00**	**81,91**

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)} x\ 100\ \%$$

Keterangan :
E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.91
Pengukuran Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Keluaran (*Output*) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realsasi (RAK)
Keluaran 1 (dokumen)	0,7347	174.300.000,00	98.055.116,00
Keluaran 2 (SDM)	0,9623	168.827.292.000,00	137.776.114.439,00
Keluaran 3 (dokumen)	0,8336	16.600.000,00	5.504.000,00
Keluaran 4 (dokumen)	0,8872	319.180.000,00	224.233.306,00
Keluaran 5 (SDM)	0,8719	936.843.524,00	429.603.060,00
Keluaran 6 (laporan)	0,8562	22.892.747.920,00	19.586.238.672,00
Keluaran 7 (unit)	0,8283	1.100.000.000,00	998.219.017,00
Keluaran 8 (laporan)	0,8552	25.160.520.204,00	22.299.748.124,00
Keluaran 9 (unit)	0,8276	7.039.355.386,00	5.354.305.629,00
Keluaran 10 (laporan)	0,8671	115.000.000,00	106.826.431,00
Keluaran 11 (dokumen)	0,8970	5.398.909.010,00	3.139.393.968,00

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

$$E = \frac{\sum_1^{11}((174.300.000{,}00\ x\ 73{,}47) - 98.055.116{,}00\ ) + ((168.827.292.000{,}00\ x\ 96{,}23) - 137.776.114.439{,}00)) + \cdots \ldots + Un\ 11}{\sum_1^{11}((174.300.000{,}00\ x\ 73{,}47) + (168.827.292.000{,}00\ x\ 96{,}23) + \cdots \ldots . + Un11}\ )\ x\ 100\ \%$$

$$E = 12{,}23$$

Keterangan:
Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah (20%).

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{RPDKn - \ |RPDKn - RAKn|}{RPDKn}\ x\ 100\ \%)}{n}$$

Keterangan:

K	:	Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
RAK	:	Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ke i
RPDK	:	Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
n	:	Jumlah bulan

Tabel 3.92
Pengukuran Konsisitensi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Terhadap Perencanaan

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	18.110.626.753,00	18.110.626.753,00	4.268.453.514,00	4.268.453.514,00
Februari	13.805.048.660,95	31.915.675.413,95	2.417.381.990,00	6.685.835.504,00
Maret	15.936.930.417,00	47.852.605.830,95	7.501.930.422,00	14.187.765.926,00
April	24.666.288.032,25	72.518.893.863,20	28.741.665.872,00	42.929.431.798,00
Mei	23.563.502.197,00	96.082.396.060,20	9.652.554.472,00	52.581.986.270,00
Juni	21.268.901.590,00	117.351.297.650,20	9.940.167.273,00	62.522.153.543,00
Juli	10.853.947.026,00	128.205.244.676,20	28.712.484.989,00	91.234.638.532,00
Agustus	40.564.415.109,19	168.769.659.785,39	7.210.486.504,00	98.445.125.036,00
September	23.150.974.000,00	191.920.633.785,39	8.668.553.252,00	107.113.678.288,00
Oktober	17.871.423.567,61	209.792.057.353,00	25.903.234.548,00	133.016.912.836,00
November	6.326.684.458,00	216.118.741.811,00	14.441.431.963,00	147.458.344.799,00
Desember	15.862.006.233,00	231.980.748.044,00	42.559.896.963,00	190.018.241.762,00

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Dari tabel diatas, dapat dihitung nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagai berikut :

RPDK bulan Januari (1) = 18.110.626.753,00

RAK bulan Januari = 4.268.453.514,00

$$K = \left(\frac{\frac{18.110.626.753,00 - |18.110.626.753,00 - 4.268.453.514,00|}{18.110.626.753,00}}{1} \right) x\ 100\ \%$$

$$K = 23,57$$

Dengan metode analisis perhitungan yang sama, maka didapat nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan per bulan sebagai berikut :

Tabel 3.93

Nilai Konsisitensi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Terhadap Perencanaan

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan (%)
Januari	23,57
Februari	20,95
Maret	29,65
April	59,20
Mei	54,73
Juni	53,28
Juli	71,16
Agustus	58,33
September	55,81
Oktober	63,40
November	68,23
Desember	81,91

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{23,57 + 20,95 + 29,65 + 59,20 + 54,73 + 53,28 + 71,16 + 58,33 + 55,81 + 63,40 + 68,23 + 81,91}{12}$$

$$K = 53,35$$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%- 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar (20%) dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh

karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\ \% + (\frac{E}{20} x\ 50)$$

Keterangan:

NE	:	Nilai Efisiensi
E	:	Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Dari hasil analisa, bahwa efisiensi yang diperoleh (E) = 12,23 %, maka nilai efisiensi:

$$NE = 50\% + \left(\frac{12{,}23}{20} x\ 50\right)$$

$$NE = 80{,}575$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P\ x\ Wp) + (K\ x\ Wk) + (CKP\ atau\ CKK\ x\ Wck) + (NE\ x\ We)$$

Keterangan:

NKI	:	Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi
P	:	Penyerapan Anggaran
K	:	Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
CKP	:	Capaian Keluaran (*Output*) Program
CKK	:	Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

NE : Nilai efisiensi

Wp : Bobot penyerapan anggaran

Wk : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Wck : Bobot capaian keluaran

We : Bobot efisiensi

Dimana, bobot masing – masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Maka nilai (NKI) : (P x Wp) + (K x Wk) + (CKP x Wck) + (NE x We)

NKI : (81,91 % x 9,7 %) + (53,35 % x 18,2 %) + (85,57 % x 43,5 %) + (80,575 % x 28,6 %)

NKI : 77,84 %

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Perangkat Daerah tersebut sebesar 77,84 %, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Cukup.

B. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (∏) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (∏) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$CSS = \prod_{i=1}^{m}\left(\left(\left(\prod_{j=1}^{n}\frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i}\right)^{\frac{1}{n}}\right)\ \ ^{\frac{1}{m}}\right)\ x\ 100\ \%$$

Keterangan :

CSS : Capaian Sasaran Strategis

m : Jumlah Sasaran Strategis

n : Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.94
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis / Outcomes	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		
	IKSS	Target (TIKSS)	Realisasi (RIKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS.1)	IKSS ke 1	5,00	10,0491
Sasaran Strategis 2 (SS.2)	IKSS ke 1	0,434	0,478
Sasaran Strategis 3 (SS.3)	IKSS ke 1	1,26	10,258
Sasaran Strategis 4 (SS.4)	IKSS ke 1	1,25	9,09
Sasaran Strategis 5 (SS.5)	IKSS ke 1	48,45	45,835
Sasaran Strategis 6 (SS.6)	IKSS ke 1	92,21	93,198
Sasaran Strategis 7 (SS.7)	IKSS ke 1	0,96	0,682
Sasaran Strategis 8 (SS.8)	IKSS ke 1	1,12	2,097

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

$$CSS = \left(\left(\left(\left(\frac{10{,}0491}{5{,}00} x\right) x \left(\frac{0{,}478}{0{,}434}\right)\right) x \left(\frac{10{,}258}{1{,}26}\right) x \left(\frac{9{,}09}{1{,}25}\right) x \left(\frac{45{,}835}{48{,}45}\right) x \left(\frac{93{,}198}{92{,}21}\right) x \left(\frac{0{,}682}{0{,}96}\right) x \left(\frac{2{,}097}{1{,}12}\right) \quad \frac{1}{8}\right)\right) x\ 100\ \%$$

$$CSS = 89{,}55$$

2. Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (∏) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (∏) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$CSP = \prod_{i=1}^{m} \left(\left(\left(\prod_{j=1}^{n} \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i}\right) \quad \frac{1}{n}\right) \quad \frac{1}{m}\right) x\ 100\ \%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program

m : Jumlah Sasaran Program

n : Jumlah Indikator Sasaran Program

Tabel 3.95
Pengukuran Capaian Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (ISP)	Realisasi (RISP)
Outcomes Program 1	ISP	90,17	82,47
Outcomes Program 2	ISP	95,03	92,89
Outcomes Program 3	ISP	82,12	58,15

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

$$CSP = \left(\left(\left(\frac{82,47}{90,17}\right) x \left(\frac{92,89}{95,03}\right) x \left(\frac{58,15}{82,12}\right)\right)\right) x\ 100\%$$

$$CSP = 85,57$$

C. Penilaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

1. Penilaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

Penilaian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Perangkat Daerah dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III / program lingkup kewenangan Perangkat Daerah. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$NKK = \frac{CSS + rata - rata\ nilai\ kinerja\ anggaran\ tingkat\ eselon\ III/Program}{2}$$

Keterangan:

NKK : Nilai Kinerja tingkat Perangkat Daerah

CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat

$$NKK = \frac{89,55\ \% + 85,57\ \%}{2}$$

$$NKK = 87,56\ \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut sebesar 87,56 %, maka nilai Kinerja Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon III/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan rata-rata nilai Kineja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon III/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon III/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$Nilai\ Kinerja\ atas\ Aspek\ Manfaat\ dan\ Implementasi = (NKI\ x\ Wi) + (CSP\ x\ Wm)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

Wi : Bobot Aspek Implementasi

Wm : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing – masing aspek sebagai berikut :

Aspek Implementasi (Wi) = 33,3 %, terdiri dari :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Aspek Manfaat (Wm) = 66,7 %

$$(NKI\ x\ Wi) + (CSP\ x\ Wm) = (77{,}84\ \%\ x\ 33{,}3\ \%) + (85{,}57\ \%\ x\ 66{,}7\ \%) = 67{,}13\ \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III/program tersebut sebesar 82,99 %, maka nilai Kinerja eselon III/program tersebut termasuk kategori Baik.